



LAPORAN AKTUALISASI

“OPTIMALISASI PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (SIMAS PUU) GUNA MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG PARTISIPATIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL”

Disusun Oleh:

Nama : ESTHER PUTRI L. PANJAITAN, S.H

NIP : 19960623 201903 2 002

Instansi : PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI

**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN
Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
Angkatan II – 2019

Judul : Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel

Nama : Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H

NIP : 19960623 201903 2 002

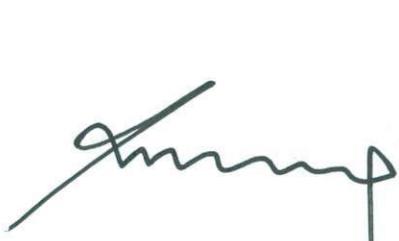
NDH : 36

Golongan/Pangkat : Penata Muda / III-A

Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, 2 September 2019

Coach,



Dr. Fitriani, AP., M. Si.

NIP. 197410171993112001

Mentor,



Ricko Wahyudi, S.H., M.H.

NIP. 197802082002121005

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas cinta kasih-Nya, Penulis dapat menyelesaikan Laporan Aktualisasi ini dengan baik. Penulisan Laporan Aktualisasi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk terpenuhinya rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Laporan Aktualisasi merupakan hasil pelaksanaan Aktualisasi yang telah diterapkan pada unit kerja Penulis yaitu di Pusat Perancangan Undang-Undang. Penulis menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak menjadi sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan Laporan Aktualisasi. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H, M.M selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
2. Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum selaku Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
3. Ibu Dr. Fitriani, AP., M.Si selaku *Coach*;
4. Bapak Ricko Wahyudi, S.H., M.H selaku Mentor;
5. Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Angkatan ke – II;
6. Orang tua dan keluarga Penulis;
7. Para Calon Perancang Undang-Undang dan Perancang Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang;
8. Rekan-rekan Calon Pegawai Negeri Sipil PNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019 Angkatan ke-II; dan
9. Seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Aktualisasi, ini yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar- besarnya apabila terdapat kata dan kalimat dalam penulisan Laporan Aktualisasi ini yang tidak berkenan. Semoga Laporan Aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, Pusat Perancangan Undang- Undang dan terlebih Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 2 September 2019



Esther Putri Lasmaida Panjaitan, SH.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG.....	5
2. VISI MISI KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG.....	7
3. RINCIAN KEGIATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA.....	7
4. KONDISI SAATINI (EXISTING CONDITION).....	10
5. KONDISI IDEAL (IDEAL CONDITION).....	13
6. GAP ANALYSIS.....	13
7. IDENTIFIKASI ISU.....	13
8. TEKNIS ANALISIS USG.....	15
9. GAGASAN PEMECAHAN ISU.....	16
10. TUJUAN.....	17
11. MANFAAT.....	17
BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	18
A. RANCANGAN AKTUALISASI.....	18
B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN.....	27
C. STAKEHOLDER.....	87
D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN.....	88
E. ANTISIPASI MASALAH.....	88
F. TIME SCHEDULE.....	90
BAB III PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN.....	92
B. SARAN.....	92
LAMPIRAN	

BAB I **PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki semua prakondisi untuk mewujudkan visi Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditandai dengan kekayaan alam yang melimpah, potensi sumber daya manusia, peluang pasar yang besar dan demokrasi yang relatif stabil. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif dan efisien oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih tertinggal dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Sejumlah keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan.

Selama ini pelatihan pembentukan CPNS dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan pelatihan yang pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk karakter PNS yang kuat dan profesional. Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN, CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat

profesionalisme serta kompetensi bidang. Penulis telah mengikuti pembelajaran klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan yang nantinya akan memadukan Pelatihan di tempat Pelatihan maupun di tempat kerja, sehingga memungkinkan Penulis mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam diri sebagai karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas.

Penulis telah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan pada unit kerja Perancangan Undang-Undang sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama. Selama bekerja, Penulis menemukan beberapa kondisi yang belum efektif sehingga tugas dan fungsi Penulis belum berjalan secara optimal. Salah satunya adalah terkait dengan belum optimalnya pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) yang menyebabkan tidak terlaksananya dengan baik salah satu tugas Penulis dalam mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik dan rancangan undang-undang.

Adapun partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan dan peran dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Partisipasi dapat didefinisikan secara umum sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan cara memilih pemimpin negara serta secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo 2013). Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1994:17) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Kata partisipasi menyiratkan menyiratkan adanya peran serta atau keikutsertaan (mengawasi, mengontrol dan mempengaruhi) masyarakat

dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan peraturan (KBBI 2011). Oleh sebab itu partisipasi masyarakat termasuk dalam partisipasi politik (Halim dan Putera 2010). Dalam partisipasi publik, pengambilan kebijakan yang mengikat seluruh warga adalah cara efektif untuk mencapai pola hubungan setara antara pemerintah dan rakyat, karena di negara-negara demokrasi partisipasi warga negara dalam proses kebijakan merupakan hal yang laizm. Tanpa adanya partisipasi, niscaya demokrasi tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negara sampai kapan pun (Handoyo 2008).

Partisipasi masyarakat merupakan prasyarat dan representasi dari terealisasinya pemerintahan yang demokratis. Dalam pemerintahan yang tak disertai partisipasi dan hanya mengandalkan mobilisasi, demokrasi niscaya tidak akan terwujud dalam sistem pemerintahan negaranya. Untuk itu, sebuah pemerintahan yang baik perlu berupaya meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan suara bagi pihak-pihak yang terimbas kebijakan publik.

Oleh sebab itu, sebagai salah satu prinsip *good governance* dan wujud kedaulatan rakyat, partisipasi publik dalam wujud pengambilan kebijakan publik harus terjamin dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“**UU 12/2011**”) dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) telah mengakomodir jaminan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan sebagai berikut:

“Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

Demokrasi partisipatoris diharapkan menjamin terwujudnya produk undang-undang yang responsif, karena masyarakat turut menyusun dan

membidani lahirnya suatu undang-undang. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang ini akan menjadikan masyarakat lebih dipentingkan dan pemerintah lebih tanggap dalam proses demokrasi, sehingga melahirkan pemerintahan yang bermoral dan warga negara yang bertanggung jawa (Huntington 1994:25).

Undang-undang tidak dibuat dalam ruang yang hampa tetapi dalam dinamika kehidupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Artinya, masyarakat yang akan dituju oleh suatu undang-undang menghadapi berbagai keterbatasan dalam menerima kehadirannya (Saldiman 2001:5). Suatu undang-undang yang dibuat secara sepihak oleh legislatif sangat mungkin kehadirannya akan ditolak karena memenuhi rasa keadilan masyarakat. Di sinilah arti penting masyarakat dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang.

Tuntutan demokrasi partisipatoris melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik telah menjadi isu penting dalam konteks global dewasa ini. Di Indonesia di mana yang dianut adalah sistem demokrasi, wacana tentang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses berdemokrasi. Peran berbagai elemen masyarakat sangat diperlukan dalam rangka menciptakan demokrasi partisipatoris.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis merasa perlu dilakukannya optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) baik dari sisi keaktifan para Perancang Undang-Undang dalam melakukan pengunggahan *draft* Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang dalam SIMAS PUU hingga tindak lanjut dari partisipasi masyarakat yang masuk sehingga dapat terwujudnya peran masyarakat yang partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

Unit kerja Penulis berada di Pusat Perancangan Undang-Undang (Pusat PUU), yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 291 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan Undang-Undang;
2. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Perancangan Undang-Undang;
3. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Perancangan Undang-Undang;
4. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang; Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan Perancangan Undang-Undang;
5. Pelaksanaan dukungan evaluasi Perancangan Undang-Undang;
6. Pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang;
7. Penulisan Laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; dan
8. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian.

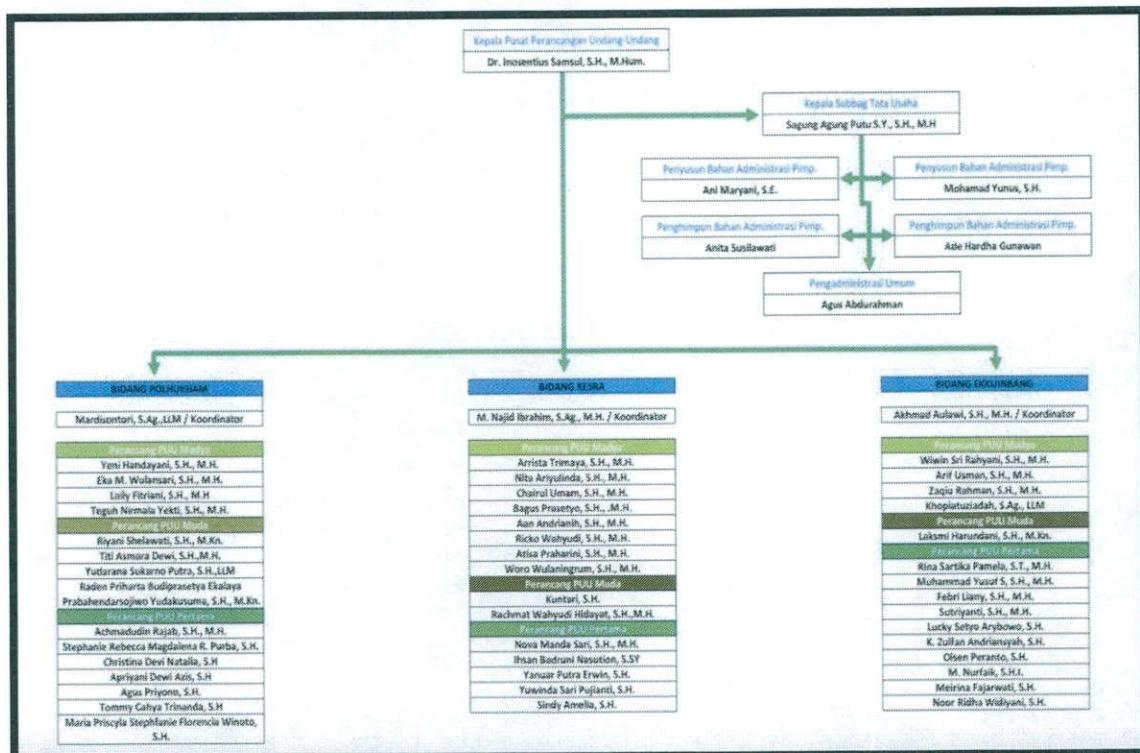
Selain menjalankan fungsi sebagaimana tercantum diatas, Pusat Perancangan Undang-Undang juga melaksanakan dukungan Perancangan Undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 tahun 2015

tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, meliputi:

1. Penyiapan Naskah Program Legislasi Nasional;
2. Penyiapan Naskah Akademik RUU;
3. Penyiapan Penulisan RUU; dan
4. Pendampingan pembahasan RUU.

Adapun struktur organisasi Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai berikut:

Gambar I.A.1 Struktur Organisasi Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



2. VISI MISI KEPALA PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG

VISI

“Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel dan Berkualitas”

MISI

- a. memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan
- b. memperkuat manajemen pengetahuan yang bernalih.

3. RINCIAN KEGIATAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 Tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dan Angka Kreditnya, rincian kegiatan Perancang Pertama, adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan konsep usul prakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. mengumpulkan data dalam rangka menelaah usul penyusunan peraturan perundang- undangan dari unit teknis;

- c. mengumpulkan data sidang pembahasan dalam rangka penyusunan paling sedikit meliputi: program legislasi nasional/program penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, program penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, program penyusunan Rancangan Peraturan Menteri, program penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga, program legislasi daerah/program pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, penetapan prioritas tahunan;
- d. mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik;
- e. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- f. merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan I;
- g. mengumpulkan data dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan;
- h. merumuskan konsep pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
- i. mengumpulkan data yang akan dibahas dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- j. mengumpulkan data dalam rangka mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri/Gubernur;
- k. mengumpulkan data dalam rangka memberikan tanggapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- l. merumuskan tanggapan rancangan peraturan perundang- undangan tingkat kesulitan I;
- m. menyusun notula/risalah rapat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, persetujuan internasional, memorandum of understanding, kontrak

internasional, atau kontrak nasional/perjanjian kerja sama, pengujian peraturan perundang-undangan;

- n. mengumpulkan data dalam rangka kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan;
- o. merumuskan kajian atau evaluasi peraturan perundang-undangan tingkat kesulitan I;
- p. mengumpulkan data dalam rangka memberikan konsultasi langsung terhadap produk hukum daerah dan permasalahan hukum di daerah;
- q. mengumpulkan data dalam rangka pemetaan produk hukum daerah;
- r. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden, Instruksi/Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- s. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan perjanjian internasional;
- t. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan persetujuan internasional;
- u. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan *memorandum of understanding*;
- v. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak internasional;
- w. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan kontrak nasional/perjanjian kerja sama;
- x. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan keterangan dan kesimpulan Pemerintah/ Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon atas permohonan Uji

Materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang di Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- y. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan somasi;
- z. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan legal opinion;
- aa. mengumpulkan data dalam rangka memberikan mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan hukum;
- bb. menyusun laporan hasil mediasi.

4. KONDISI SAATINI (EXISTING CONDITION)

Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) merupakan program dari Pusat Perancangan Undang-Undang berupa website dengan alamat <http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index> yang dibuat guna mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif melalui beberapa instrumen, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan database *stakeholder* yang meliputi data kepakaran, ketokohan, lembaga kemasyarakatan umum, atau yang terdaftar serta mitra strategis yang telah melakukan MOU dengan Badan Keahlian DPR RI.
- 2) **Menginformasikan kepada publik rencana penyusunan Naskah Akademik dan *draft* RUU di Badan Keahlian DPR RI.**
- 3) Menyampaikan masukan masyarakat secara tersistematis dan terstruktur terhadap Naskah Akademik dan RUU yang sedang disiapkan.
- 4) Pengolahan masukan masyarakat secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.
- 5) Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya.

Adapun rencana penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang saat ini ada di website SIMAS PUU adalah sebagai berikut:

Gambar I.A.2. Screenshot Tampilan daftar NA pada SIMAS PUU

The screenshot shows the SIMAS PUU website with the following details:

- Header:** PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
- Navigation:** BKD, BERANDA, TENTANG KAMI, PROFIL, PRODUK, SIMAS PUU, GALERI, HUBUNGI KAMI
- Section:** Naskah Akademik
- Text:** Berikut ini naskah akademik yang sedang disusun oleh Pusat PUU BK DPR RI
- Table:** A list of academic manuscripts with columns for Name, Stage, and Detail.
- Table Data:**

Nama NA	Tahapan	Detail
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Rencana Penyusunan NA	DETAIL
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Rencana Penyusunan NA	DETAIL
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Penyadapan	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Permusikan	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rencana Penyusunan NA	DETAIL
- Page:** Showing 1 to 10 of 15 entries
- Footer:** ©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706

Gambar I.A.3. Screenshot Tampilan daftar RUU pada SIMAS PUU

The screenshot shows the SIMAS PUU website with the following details:

- Header:** PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI
- Navigation:** BKD, BERANDA, TENTANG KAMI, PROFIL, PRODUK, SIMAS PUU, GALERI, HUBUNGI KAMI
- Section:** Rancangan Undang-Undang (RUU)
- Text:** Berikut ini rancangan undang-undang (ruu) yang sedang disusun oleh Pusat PUU BK DPR RI
- Table:** A list of bills with columns for Name, Stage, and Detail.
- Table Data:**

Nama RUU	Tahapan	Detail
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Penyadapan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Permusikan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
- Page:** Showing 1 to 10 of 15 entries
- Footer:** ©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706

Sedangkan daftar RUU tahap penyusunan adalah sebagai berikut:

Gambar I.A.4. Daftar RUU Tahap Penyusunan Pada Masa Sidang IV



DAFTAR RUU PENYUSUNAN

BIDANG POLHUKAM

RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (JPPAT)
RUU tentang Penyadapan
RUU tentang Keamanan Siber
RUU tentang Keamanan Laut
RUU tentang Penyiaran
RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTI)

BIDANG EKSKUINBANG

RUU MPR
RUU Hubungan Antara MPR, DPR dan DPD
RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
RUU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
RUU Energi Baru Dan Terbarukan

BIDANG KESRA

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
RUU tentang Permusikan
RUU tentang Dosen
RUU tentang Guru
RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Dari ketiga gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa **terdapat ketidaksesuaian Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang ada di SIMAS PUU dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun saat ini**. Kondisi saat ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat memberikan partisipasinya pada Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun oleh Perancang Undang-Undang.

Lebih lanjut, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang telah diunggah di SIMAS PUU belum diketahui statusnya apakah sudah ada perubahan atau belum. Apabila sudah ada perubahan sepatutnya juga dilakukan pengunggahan ulang Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan yang sedang disusun saat ini.

Kemudian, pada kondisi saat ini **tidak terdapat tindak lanjut dari Perancang Undang-Undang bagi masyarakat yang telah**

menyampaikan tanggapannya atas Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang pada SIMAS PUU sehingga alur partisipasi masyarakat berhenti pada tahap sebatas ada masukan dari masyarakat saja tetapi tidak ada tindak lanjutnya.

5. KONDISI IDEAL (*IDEAL CONDITION*)

Kondisi idealnya adalah adanya kesesuaian antara Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang diunggah di SIMAS PUU dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun oleh Perancang Undang - Undang agar masyarakat bisa berpartisipasi langsung dalam perancangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun. Kondisi ideal selanjutnya adalah adanya bentuk konkret tindak lanjut tanggapan yang masuk pada SIMAS PUU oleh para Perancang Undang-Undang.

6. GAP ANALYSIS

Antara *existing condition* dan *ideal condition* dan terdapat gap atau jarak yaitu tidak terlaksananya program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) dikarenakan belum optimalnya pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun dan belum tersedianya tindak lanjut dari tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU.

7. IDENTIFIKASI ISU

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).

Uraian:

- a. Sampai saat ini, SIMAS PUU belum dikelola dengan baik karena tidak berjalannya pengunggahan *draft* NA dan RUU sehingga

masyarakat tidak dapat menyampaikan aspirasinya pada NA dan RUU yang sedang disusun saat ini.

- b. Belum optimalnya SIMAS PUU juga menyulitkan Perancang Undang-Undang dalam mengumpulkan data terkait partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang.
 - c. Isu ini menyangkut hajat hidup orang banyak karena berdampak pada optimalisasi peran masyarakat dalam penyusunan undang-undang.
 - d. Isu ini juga memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Perancang dalam mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belum terbukunya konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penggerjaan penyusunan perubahan undang-undang yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi

Uraian:

- a. Sampai saat ini belum terdapat konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) penggerjaan penyusunan perubahan undang-undang yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Dengan tidak terdapatnya konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait isu ini, menyebakan tidak seragamnya alur penyusunan perubahan undang-undang yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Isu ini menjadi *problem* bagi Perancang Undang-Undang dalam menyusun perubahan undang-undang yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.
- d. Isu ini juga memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Perancang dalam mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah

akademik dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

- 3) Belum terlaksananya penggunaan fitur *track changes* dalam penyusunan *draft* Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-Undang.

Uraian:

- a. Sampai saat ini penyusunan *draft* Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tidak menggunakan fitur *track changes* sehingga menjadi tidak efisien.
- b. Menyulitkan Perancang karena harus membuat tabel perubahan sehingga menjadi membingungkan.
- c. Isu ini menjadi *problem* bagi perancang undang-undang dalam menyusun Naskah Akademik dan *draft* Rancangan Undang-Undang.
- d. Isu ini juga memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Perancang dalam mengumpulkan data dalam rangka menyiapkan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. TEKNIS ANALISIS USG

Tabel I.A.1 Teknis Analisis USG

No.	Isu	U	S	G	Total	Ranking
1.	Belum optimalnya pelaksanaan program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).	5	4	4	14	1
<u>Uraian</u>						
Urgency (U): Isu ini sangat mendesak karena tingginya keinginan masyarakat						

No.	Isu	U	S	G	Total	Ranking
	<p>untuk terlibat dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi langsung pada Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang terkait.</p> <p>Seriousness (S): Isu ini serius untuk diselesaikan karena hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam perancangan undang-undang telah diatur dalam UU 12/2011 sehingga apabila isu ini tidak diselesaikan dapat mencederai hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Growth (G): Dalam hal isu ini dibiarkan berkembang tanpa ada penyelesaian akan akan berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat dan kurangnya nilai akuntabilitas kinerja Perancang Undang-Undang dalam Perancangan Undang-Undang DPR RI.</p>					
2.	Belum terbukunya konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait alur kerja perancangan perubahan undang-undang yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.	3	3	2	8	2
3.	Belum terlaksananya penggunaan fitur <i>track changes</i> dalam penyusunan <i>draft</i> Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-Undang.	2	3	1	6	3

Keterangan:

5 = Sangat besar 4 = Besar 3 = Sedang 2 = Kecil 1 = Sangat kecil

9. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Berdasarkan uraian di atas, gagasan pemecahan isu yang diangkat oleh Penulis adalah optimalisasi pelaksanaan program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) melalui pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun dan pembakuan tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU.

10. TUJUAN

Adapun tujuan yang Penulis harapkan dengan dilaksanakannya gagasan pemecahan isu sebagaimana telah diuraikan di atas adalah optimalnya pelaksanaan program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) guna mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

11. MANFAAT

Penulis membagi manfaat yang diperoleh dengan direalisasikannya gagasan pemecahan isu ke dalam 2 (dua) bagian, sebagai berikut:

Internal

1. Meningkatkan kinerja Perancang Undang-Undang dalam melakukan pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun.
2. Meningkatkan kinerja Perancang dalam menindaklanjuti tanggapan masyarakat yang masuk dalam SIMAS PUU guna sebagai pertimbangan dalam data masukan masyarakat dalam penyusunan Naskah Akademik
3. Meningkatkan kinerja Perancang dalam mensosialisasikan program SIMAS PUU.

Eksternal

1. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi langsung dalam perancangan undang-undang melalui penyampaian aspirasi terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun.
2. Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja dari Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

BAB II

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. RANCANGAN AKTUALISASI

Tabel II.A.1 Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Identifikasi Isu	:	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya pelaksanaan program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).2. Belum terbukukannya konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait alur kerja perancangan perubahan undang-undang yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.3. Belum terlaksananya penggunaan fitur track changes dalam penyusunan <i>draft</i> Naskah Akademik maupun Rancangan Undang-Undang.
Isu yang Diangkat	:	Belum optimalnya pelaksanaan program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).
Gagasan Pemecahan Isu	:	Pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun dan pembakuan tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU.

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	Pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada SIMAS PUU.	<p>1. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU, Koordinator Bidang dan Perancang Undang-Undang terkait program aktualisasi Penulis.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU terkait persetujuan pengunggahan NA dan RUU di SIMAS PUU.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Ketua Tim serta Koordinator Bidang Pusat PUU terkait pengunggahan NA dan RUU di SIMAS PUU.</p> <p>4. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha</p>	<p>1. Undangan Rapat Koordinasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang terkait pembahasan program aktualisasi Penulis.</p> <p>2. Laporan singkat hasil rapat koordinasi terkait pembahasan program aktualisasi Penulis.</p> <p>3. Daftar hadir</p>	Nilai Dasar ASN: 1. Akuntabilitas. (Tanggung jawab) 2. Nasionalisme. (Pancasila sila ke-4) 3. Etika Publik. (Nilai Sopan Santun) Kedudukan dan Peran ASN: 1. Manajemen ASN	<p>1. Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung visi organisasi yaitu Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai Organisasi Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia</p>	<p>1. Akuntabel. 2. Profesional.</p>

		<p>Pusat Perancangan Undang-Undang untuk pengajuan Penulis sebagai admin SIMAS PUU.</p>	<p>rapat koordinasi terkait pembahasan program aktualisasi Penulis.</p> <p>4. Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang diunggah di SIMAS PUU sesuai dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun.</p>	<p>(Kerjasama dalam Pusat PUU)</p> <p>2. <i>Whole of Government</i> (Koordinasi dalam Pusat PUU)</p>	<p>(DPR RI) Bidang Keahlian Perancangan Undang-Undang yang Profesional, Akuntabel dan Berkualitas</p> <p>2. Seluruh rangkaian kegiatan ini mendukung misi</p>	
2.	<p>Publikasi program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang</p>	<p>1. Menyusun kerangka substansi konten videografis terkait program SIMAS PUU dan tutorial pemberian tanggapan pada Naskah Akademik dan</p>	<p>1. Laporan singkat hasil rapat koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen.</p>	<p>Nilai Dasar ASN:</p> <p>1. Akuntabilitas . (tanggung jawab)</p> <p>2. Nasionalism</p>	<p>organisasi yaitu memperkuat penyelenggaraan fungsi</p>	<p>1. Akuntabel.</p> <p>2. Profesional.</p>

<p>(SIMAS PUU) dalam bentuk konten videografis yang diunggah di seluruh media sosial DPR RI.</p>	<p>Rancangan Undang-Undang yang terdapat di SIMAS PUU.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pusat PUU terkait penyusunan surat tugas pembuatan videografis oleh Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen Badan Keahlian DPR RI. 3. Berkoordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen terkait pembuatan konten videografis terkait SIMAS PUU. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Daftar hadir rapat koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen. 3. Konten videografis terkait program SIMAS PUU dan tutorial pemberian tanggapan pada Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang terdapat di SIMAS PUU yang telah diunggah di seluruh media social DPR RI. 	<p>e. (Pancasila sila ke-4)</p> <p>3. Etika Publik. (nilai sopan santun)</p> <p>4. Komitmen Mutu. (nilai kebaruan dan kemanfaatan)</p> <p>Peran dan Kedudukan ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Publik. (sosialisasi kepada masyarakat) 2. Whole of Government. (koordinasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen) 	<p>dukungan Perancangan Undang-Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan; dan memperkuat manajemen pengetahuan yang bernali.</p>	
---	--	--	--	--	--

3.	<p>Penambahan fitur <i>no-reply email</i> pada website SIMAS PUU guna memberikan konfirmasi langsung kepada email masyarakat yang bersangkutan bahwa tanggapannya telah diterima dan akan ditindaklanjuti.</p>	<p>1. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pusat PUU terkait penyusunan surat tugas terkait penambahan fitur <i>no-reply email</i> pada website SIMAS PUU yang oleh BDTI Setjen BK DPR RI.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan BDTI terkait penambahan fitur <i>no-reply email</i> pada website SIMAS PUU yang oleh BDTI Setjen BK DPR RI.</p>	<p>1. Laporan singkat hasil rapat koordinasi dengan BDTI.</p> <p>2. Daftar hadir rapat koordinasi dengan BDTI.</p> <p>3. Adanya fitur tambahan baru pada website SIMAS PUU berupa <i>no reply-email</i> guna memberikan konfirmasi langsung kepada email masyarakat yang bersangkutan bahwa tanggapannya telah diterima dan akan ditindaklanjuti.</p>	<p>Nilai Dasar ASN:</p> <p>1. Akuntabilitas . (tanggung jawab)</p> <p>2. Nasionalisme. (Pancasila sila ke -4)</p> <p>3. Etika Publik (nilai sopan santun)</p> <p>3. Komitmen Mutu. (nilai kebaruan dan kemanfaatan)</p>	<p>Kedudukan dan Peran ASN:</p> <p>1. Pelayanan Publik. (kemudahan bagi masyarakat)</p>	Profesional
----	---	---	---	--	--	-------------

				2. Whole of Government. (koordinasi dengan BDTI)		
4.	Pembuatan alur tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU yang perlu dilakukan oleh Perancang Undang-Undang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa kondisi saat ini terkait bagaimana tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU. 2. Berkoordinasi dengan para Perancang Undang-Undang di pusat PUU terkait tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU. 3. Menyusun alur tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU. 	<p>Alur tindak lanjut dari Perancangan Undang-Undang terkait tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU.</p>	Nilai Dasar ASN: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas. (tanggung jawab) 2. Nasionalisme. (Pancasila sila ke-4) 3. Etika Publik. (nilai sopan santun) 4. Komitmen Mutu (nilai kebaruan dan kemanfaatan) 		1. Akuntabel. 2. Profesional.

				<p>Peran dan Kedudukan ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen ASN (Kerjasama antar Perancang Undang-Undang) 2. <i>Whole of Government</i> (Koordinasi) 		
5.	<p>Sosialisasi program aktualisasi Penulis di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.</p>	<p>Berkoordinasi dengan Perancang Undang-Undang di Pusat PUU terkait beberapa perubahan dalam program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).</p>	<p>Laporan hasil koordinasi dengan Perancang Undang-Undang di Pusat PUU terkait beberapa perubahan dalam program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan</p>	<p>Nilai Dasar ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas (tanggung jawab) 2. Nasionalisme (Pancasila sila ke-4) 3. Etika Publik (nilai sopan 		<p>1. Akuntabel 2. Profesional</p>

			Undang-Undang (SIMAS PUU).	<p>santun)</p> <p>Kedudukan dan Peran ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen ASN (Kerjasama antar Perancang Undang-Undang) 2. Whole of Government (Koordinasi) 		
6.	Evaluasi pelaksanaan aktualiasi dengan pembuatan kuisioner yang ditujuan kepada stakeholder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan konsep kuisioner 2. Perincian daftar stakeholder yang akan diberikan stakeholder 3. Menghubungi stakeholder terkait pengisian kuisioner 4. Pembuatan kuisioner melalui google form 5. Penyebaran kuisioner kepada para 	Laporan singkat hasil kuisioner terkait evaluasi pelaksanaan aktualisasi	<p>Nilai Dasar ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas (tanggung jawab) 2. Nasionalisme (Pancasila sila ke-4) 		<p>1. Akuntabel 2. Profesional</p>

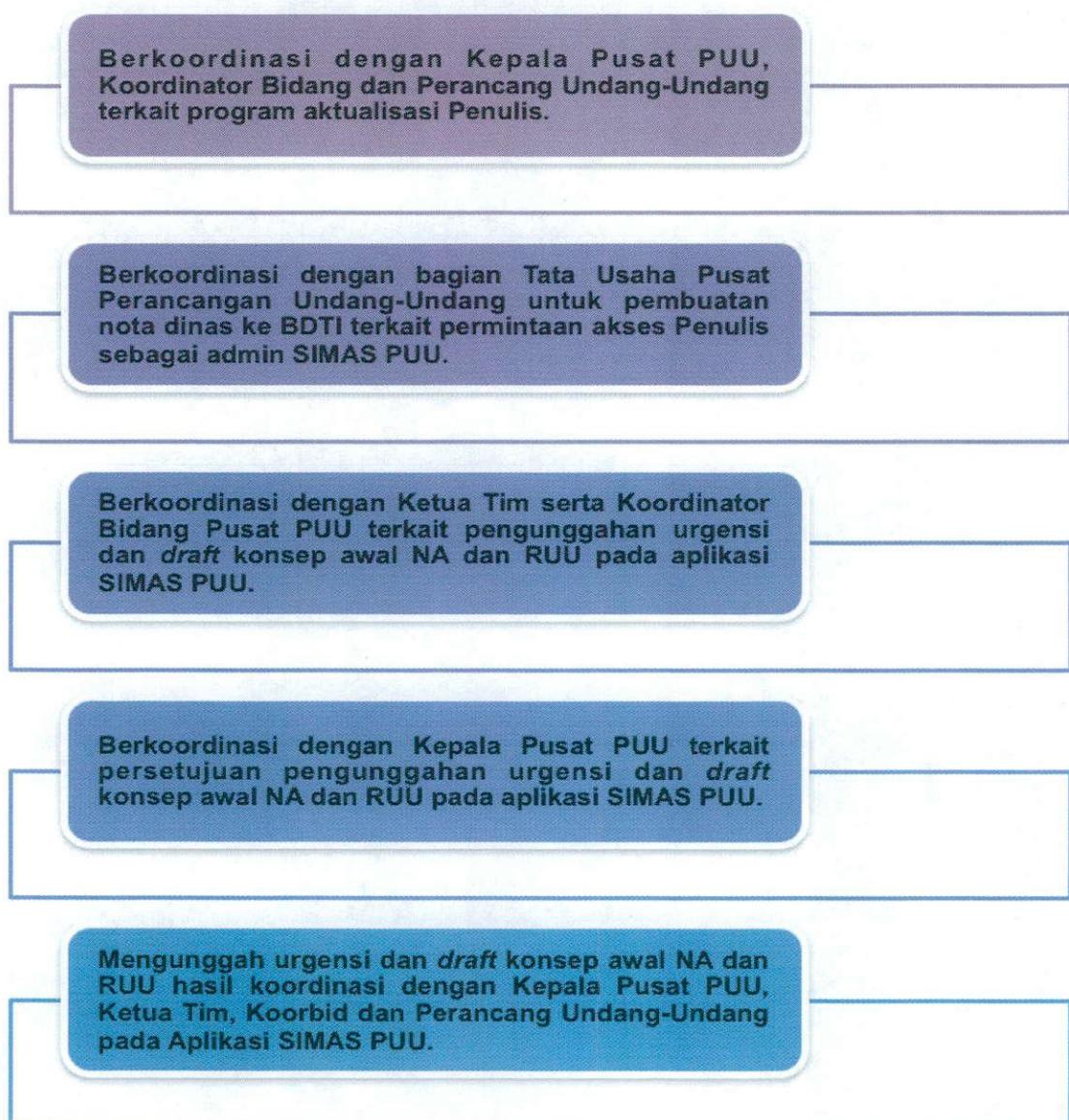
		<p>stakeholder</p> <p>6. Pengumpulan kuisioner</p> <p>7. Pembuatan laporan singkat hasil kuisioner</p>		<p>3. Etika Publik (nilai sopan santun)</p> <p>Kedudukan dan Peran ASN: Pelayanan Publik (Kuisioner kepada masyarakat)</p>		
7.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi	<p>1. Pengumpulan data baik tulisan maupun gambar mengenai hasil tiap tahapan kegiatan aktualisasi</p> <p>2. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi</p>	Laporan hasil pelaksanaan aktualisasi	<p>Nilai Dasar ASN: Akuntabilitas (tanggung jawab)</p>		<p>1. Akuntabel 2. Profesional</p>

B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

B.I. *Flowchart* Kegiatan Pertama

Pengunggahan Urgensi dan *Draft* Konsep Awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada Aplikasi SIMAS PUU

Gambar B.I.1. *Flowchart* Tahapan Kegiatan – Kegiatan Pertama

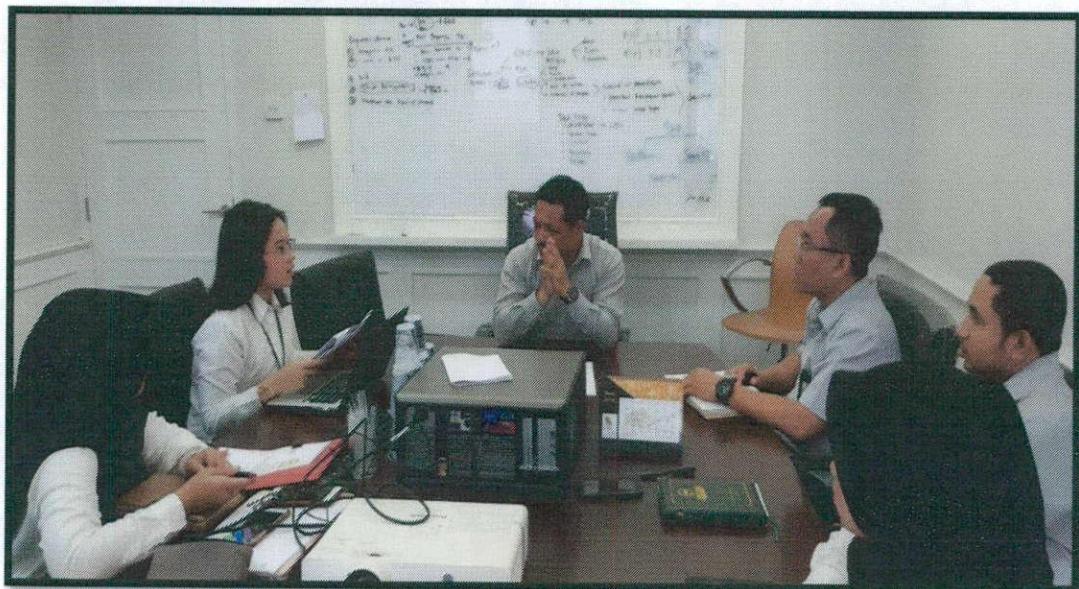


B.II. Uraian Tahapan Kegiatan – Kegiatan Pertama

1. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU, Koordinator Bidang dan Perancang Undang-Undang terkait program aktualisasi Penulis.

Pada hari Selasa, 23 Juli 2019, pada pukul 08.00 – 10.00 WIB, Penulis telah berkoordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum beserta dengan Mentor, Bapak Ricko Wahyudi S.H., M.H terkait dengan program aktualisasi Penulis yang berjudul "*Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel*" melalui rapat koordinasi program aktualisasi peserta pelatihan dasar CPNS angkatan II tahun 2019 pada unit kerja Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kepala Pusat PUU, Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Gambar B.II.1. Rapat Koordinasi Program Aktualisasi Penulis bersama dengan Koordinator Bidang dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian RI





Dalam rapat koordinasi ini Penulis memaparkan kegiatan, tahapan kegiatan, *output* serta *time schedule* program aktualisasi Penulis kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang dan Mentor Penulis, Bapak Ricko Wahyudi, S.H., M.H. Pada akhir pemaparan, baik Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang maupun Mentor, mendukung penuh setiap tahapan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Penulis. Adapun undangan rapat, daftar hadir dan laporan singkat rapat koordinasi tersebut, dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran I.

2. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang untuk pembuatan nota dinas ke BDTI terkait permintaan akses Penulis sebagai admin SIMAS PUU.

Penulis melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu koordinasi dengan Bapak Fahmi Asyari, S.Sos selaku Kasub. Bag Tata Usaha pada unit

kerja Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun nota dinas kepada Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi perihal permohonan akses sebagai Admin SIMAS PUU atau aplikasi Pusat PUU pada Portal Setjen DPR RI atas nama Penulis.

Koordinasi sebagaimana di uraikan di atas Penulis telah lakukan pada hari Selasa, 23 Juli 2019 pada pukul 11.00 WIB di Ruang Tata Usaha Perancangan Undang-Undang, Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.

Gambar B.II.2. Koordinasi dengan Kasubag TU Pusat PUU Terkait dengan Penyusunan Nota Dinas ke BDTI Perihal Permohonan Akses Penulis sebagai Admin SIMAS PUU



Adapun keterangan lebih lanjut mengenai Nota Dinas dari Pusat PUU ke BDTI perihal permohonan akses Admin SIMAS PUU atas nama Penulis, dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.

3. Berkoordinasi dengan Ketua Tim serta Koordinator Bidang Pusat PUU terkait pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU.

Dalam tahapan ketiga ini, Penulis telah berkoordinasi dengan para koordinator bidang dan ketua tim penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI terkait dengan permintaan *soft file* urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan diunggah pada aplikasi SIMAS PUU.

Pada Pusat Perancangan Undang-Undang sendiri, saat ini terdapat kurang lebih 13 (tiga belas) RUU yang sedang disusun, yaitu sebagai berikut:

Tabel B.II.1 Tabel Daftar RUU yang Sedang Disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

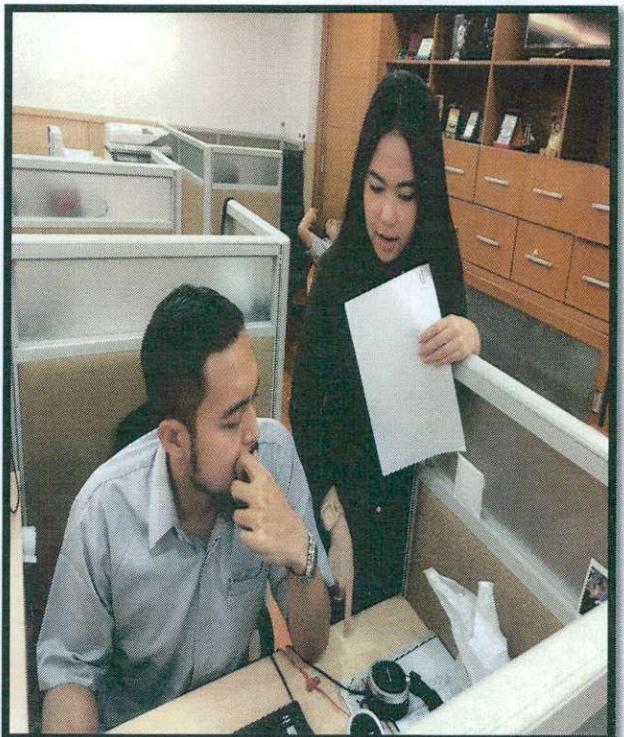
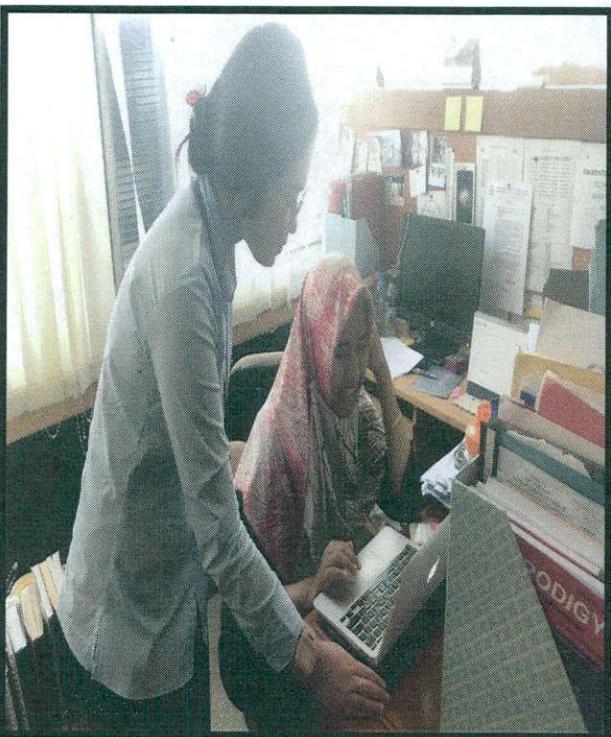
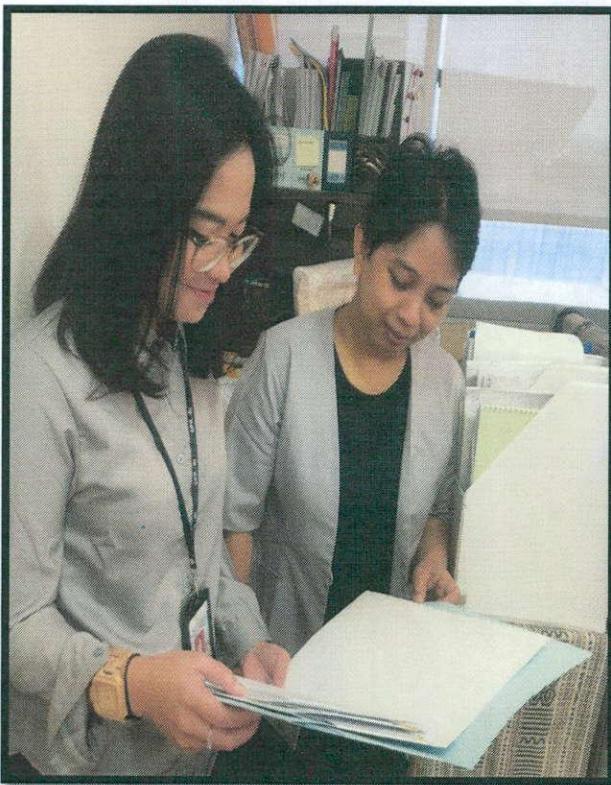
No.	Nama RUU
1.	RUU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat
2.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah
3.	RUU tentang Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan
4.	RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan
5.	RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat
6.	RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah
7.	RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
9.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
10.	RUU tentang Guru
11.	RUU tentang Dosen

No.	Nama RUU
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana
13.	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Koordinasi tersebut Penulis telah lakukan dari tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan 1 Agustus 2019.

Gambar B.II.3. Koordinasi Permintaan *Soft File* Urgensi dan *Draft konsep awal NA* dan *RUU* untuk Diunggah pada Aplikasi **SIMAS PUU Bersama Para Ketua Tim Penyusun *NA* dan *RUU* di Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI**





4. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU terkait persetujuan pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU.

Setelah Penulis mendapatkan seluruh *soft file* urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sudah dapat diunggah di aplikasi SIMAS PUU, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019, Penulis telah berkoordinasi dengan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum terkait dengan persetujuan akhir pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di aplikasi SIMAS PUU.

Gambar B.II.4. Penulis Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU Terkait Persetujuan Pengunggahan Urgensi dan *Draft* Konsep Awal NA serta RUU pada Aplikasi SIMAS PUU.



Hasil koordinasi ini, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang menyetujui urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang ada pada Penulis untuk diunggah pada aplikasi SIMAS PUU. Koordinasi sebagaimana diuraikan di atas dilakukan di Ruang Rapat Kepala Pusat PUU, Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI.

5. Mengunggah urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU hasil koordinasi dengan Kepala Pusat PUU, Ketua Tim, Koorbid dan Perancang Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU.

Setelah keempat tahapan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas dilakukan, Penulis melanjutkan dengan tahapan kegiatan yang kelima yaitu mengunggah urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang hasil koordinasi dengan kepala Pusat PUU, Ketua Tim, Koorbid dan Perancang Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU.

Terkait mekanisme teknis pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU, yang dapat diunggah hanya RUU yang terdapat dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sementara untuk RUU yang terdapat di luar Prolegnas, secara sistem tidak dapat diunggah pada aplikasi SIMAS PUU.

Uraian Hambatan:

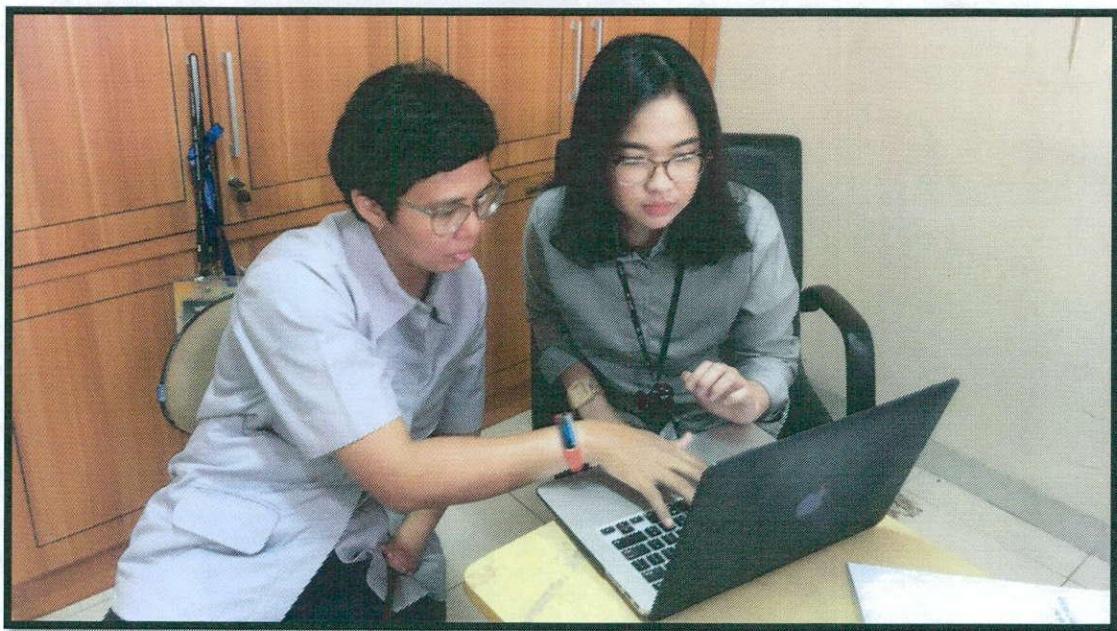
Penulis telah berkoordinasi dengan pranata komputer madya BDTI, Bapak Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I., dan salah satu admin aplikasi SIMAS PUU, Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.Kn terkait dengan sistem pada aplikasi SIMAS PUU yang hanya dapat mengunggah urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU sesuai dengan daftar RUU yang terdapat dalam Prolegnas. Berdasarkan keterangan dari Ibu Laksmi,

sistem tersebut telah demikian sedari awal aplikasi SIMAS PUU dibuat, sebagai proteksi dari Pusat PUU agar masyarakat tidak memiliki pandangan yang keliru mengenai kondisi di mana Pusat PUU menyusun RUU di luar Prolegnas. Mengapa demikian? Karena Pusat PUU sendiri pada prinsipnya mengerjakan NA dan RUU sesuai dengan permintaan anggota DPR RI dan pada dasarnya para Perancang Undang-Undang tidak dapat menolak untuk mengerjakan penyusunan NA atau RUU sehingga meskipun RUU tersebut di luar Prolegnas, para Perancang Undang-Undang pada Pusat PUU tetap mengerjakan sesuai dengan permintaan anggota DPR RI.

Solusi atas Hambatan:

Kondisi sebagaimana diuraikan di atas berdampak pada, dalam hal kondisi tertentu, seluruh RUU yang sedang digarap di Pusat PUU di luar Prolegnas, maka tidak ada urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU yang dapat diunggah pada aplikasi SIMAS PUU yang berakibat pada masyarakat tidak dapat menyampaikan pendapatnya pada aplikasi SIMPAS PUU. Sehingga untuk menindaklanjuti kondisi tersebut, Penulis telah berdiskusi dengan Kepala Pusat PUU, Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum untuk melakukan adanya koordinasi lanjutan dengan Badan Legislasi (Baleg) sebagai koor penyusunan Prolegnas yang diunggah melalui aplikasi Silegnas dengan BDTI sebagai pelaksana sistem aplikasi SIMAS PUU agar dapat mengakomodir pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas pada aplikasi SIMAS PUU agar masyarakat bisa berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU.

Gambar B.II.5. Penulis Berkoordinasi dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H., M.Kn Terkait dengan Sistem Pada Aplikasi SIMAS PUU yang Hanya Dapat Mengunggah Urgensi dan *Draft* Konsep Awal NA dan RUU Sesuai dengan yang Terdapat dalam Prolegnas



Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, berikut keterangan lebih lanjut terkait rincian status pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU:

Tabel B.II.2. Status Pengunggahan Urgensi dan *Draft* Konsep Awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU

No.	Nama RUU	Keterangan	Status Unggah pada SIMAS PUU
1.	RUU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat	Tidak terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Belum diunggah <i>Catatan: Urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU belum rampung</i>

No.	Nama RUU	Keterangan	Status Unggah pada SIMAS PUU
2.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Belum diunggah
3.	RUU tentang Sistem Pendukung Lembaga Perwakilan	Tidak terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Belum diunggah <i>Catatan: Urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU belum rampung</i>
4.	RUU tentang Etika Penyelenggaraan Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Belum diunggah <i>Catatan: Urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU belum rampung</i>
5.	RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat	Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Belum diunggah <i>Catatan: Urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU belum rampung</i>
6.	RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah	Tidak Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Belum diunggah <i>Catatan: Urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU belum rampung</i>
7.	RUU tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tidak Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Belum diunggah <i>Catatan: Urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU belum rampung</i>
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang	Terdapat dalam Prolegnas 2015-	Belum diunggah

No.	Nama RUU	Keterangan	Status Unggah pada SIMAS PUU
	Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	2019	
9.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Sudah diunggah
10.	RUU tentang Guru	<p>Tidak Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019</p> <p><i>Catatan: NA dan RUU sudah rampung tetapi terdapat pemisahan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</i></p>	Belum diunggah
11.	RUU tentang Dosen	<p>Tidak Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019</p> <p><i>Catatan: NA dan RUU sudah rampung tetapi terdapat pemisahan dalam RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</i></p>	Belum diunggah
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana	<p>Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019</p> <p><i>Catatan: Konsep awal draft NA dan RUU belum rampung, yang</i></p>	Belum diunggah

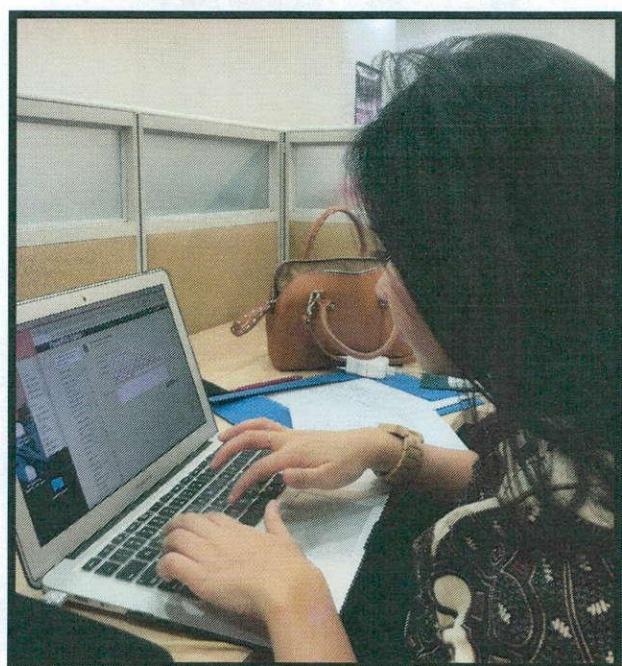
No.	Nama RUU	Keterangan	Status Unggah pada SIMAS PUU
			<i>dapat diunggah hanya Urgensi</i>
13.	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	Tidak Terdapat dalam Prolegnas 2015-2019	Belum diunggah <i>Catatan: Urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU belum rampung</i>

Keterangan:

- = Urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU yang dapat diunggah pada aplikasi SIMAS PUU.

Berdasarkan uraian di atas, dari 13 (tiga belas) RUU yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, berikut daftar urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU yang telah Penulis unggah pada aplikasi SIMAS PUU pada tanggal 2 Agustus 2019:

Gambar B.II.6. Penulis Mengunggah Urgensi dan *Draft* Konsep Awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU



Tabel B.II.3. Urgensi dan *Draft Konsep Awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang Telah Diunggah pada Aplikasi SIMAS PUU oleh Penulis*

No.	Judul RUU	Status Unggah pada Aplikasi SIMAS PUU		
		Urgensi	<i>Draft Konsep Awal NA</i>	<i>Draft Konsep Awal RUU</i>
1.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	✓	✓	✓
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	✓	✓	✓
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana	✓	✗	✗

Gambar B.II.7. Urgensi dan *Draft Konsep Awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang Telah Diunggah dan Terdapat dalam Aplikasi SIMAS PUU*

Rencana Penyusunan NA dan Konsep Awal NA
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BAND KEAHLIAN DPR RI

BKD BERANDA TENTANG KAMI PROFIL PRODUK SIMAS PUU GALERI HUBUNGI KAMI

Naskah Akademik

Berikut ini naskah akademik yang sedang disusun oleh Pusat PUU BK DPR RI

Show 10 entries Search:

Nama NA	Tahapan
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Konsep Awal NA DETAIL
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Konsep Awal NA DETAIL
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	Konsep Awal NA DETAIL
RUU tentang Siber	Rencana Penyusunan NA DETAIL
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Rencana Penyusunan NA DETAIL
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Konsep Awal NA DETAIL

Showing 11 to 16 of 16 entries Previous 1 2 Next

©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Kehilangan DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Kehilangan DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706

Rencana Penyusunan RUU dan Konsep Awal RUU RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah

**PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BANDAR KEAHLIAN DPR RI**

BKD BERANDA TENTANG KAMI PROFIL PRODUK SIMAS PUU GALERI HUBUNGI KAMI

Rancangan Undang-Undang (RUU)

Berikut ini rancangan undang-undang (ruu) yang sedang disusun oleh Pusat PUU BK DPR RI

Show 10 entries Search:

Nama RUU	Tahapan	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keutuhanan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Siber	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Konsep Awal RUU	DETAIL

Showing 11 to 17 of 17 entries Previous 1 2 Next

©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706

Rencana Penyusunan NA dan Konsep Awal NA RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

**PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BANDAR KEAHLIAN DPR RI**

BKD BERANDA TENTANG KAMI PROFIL PRODUK SIMAS PUU GALERI HUBUNGI KAMI

Naskah Akademik

Berikut ini naskah akademik yang sedang disusun oleh Pusat PUU BK DPR RI

Show 10 entries Search:

Nama NA	Tahapan	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Rencana Penyusunan NA	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Keutuhanan	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	Konsep Awal NA	DETAIL
RUU tentang Siber	Rencana Penyusunan NA	DETAIL
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Rencana Penyusunan NA	DETAIL
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Konsep Awal NA	DETAIL

Showing 11 to 18 of 18 entries Previous 1 2 Next

©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706

Rencana Penyusunan RUU dan Konsep Awal RUU RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

The screenshot shows a website for the 'PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI'. The main content is titled 'Rancangan Undang-Undang (RUU)'. It lists various draft laws, with the 'RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri' highlighted in red. The table includes columns for 'Nama RUU', 'Tahapan', and 'DETAIL'. The 'DETAIL' link for this specific draft is also highlighted in red. The footer contains copyright information and address details.

Nama RUU	Tahapan	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	Konsep Awal RUU	DETAIL
RUU tentang Siber	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Rencana Penyusunan RUU	DETAIL
RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Konsep Awal RUU	DETAIL

Urgensi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana

The screenshot shows a website for the 'PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI'. The main content is titled 'Detail Naskah Akademik (Rencana Penyusunan NA)'. It highlights the 'RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana'. The text discusses the need for disaster mitigation laws to protect the Indonesian nation and its people, mentioning various challenges and the need for a comprehensive approach.

Upaya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menuntut tanggung jawab negara untuk melindungi bangsa Indonesia dalam bentuk perlindungan dalam hal terjadi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU tentang Penanggulangan Bencana) pada prinsipnya mengatur mengenai tanggung jawab dan wewenang pemerintah serta pemerintah daerah, hak dan kewajiban masyarakat, kelembagaan, pendanaan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Namun di dalam implementasinya, terdapat beberapa permasalahan. Pertama, definisi bencana dalam UU tentang Penanggulangan Bencana, belum menggambarkan bahwa bencana dapat terjadi secara tiba-tiba atau bertahap yang mengancam atau menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mengakibatkan kerugian terhadap fisik dan psikis manusia, ekonomi, dan lingkungan. Kedua, beberapa jenis bencana yang disebutkan dalam UU tentang Penanggulangan Bencana sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain, diantaranya untuk bencana sosial telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menangani penanganan konflik sosial, dan untuk epidemi, wabah penyakit, kejadian luar biasa telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang menangani bidang kesehatan. Ketiga, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah dalam UU tentang Penanggulangan Bencana menjadi salah satu wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penetapan status dan tingkatan bencana tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena belum ada peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai indikator penetapan status dan tingkatan bencana. Keempat, perlu restrukturisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kelima, penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih terfokus pada tahap tanggap darurat dan pascabencana. Penanggulangan bencana pada tahap prabencana belum menjadi perhatian yang serius, sehingga perlu penguturan mengatur terhadap tahap prabencana. Berdasarkan perimbangan tersebut, diperlukan perubahan UU tentang Penanggulangan Bencana agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan membangun sinergi antar berbagai pemangku kepentingan serta sesuai dengan dinamika hukum dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan undang-undang ini juga diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B.III. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan Kedudukan serta Peran ASN

Setelah menyelesaikan kelima tahapan kegiatan pada kegiatan pertama ini yaitu *“Pengunggahan Urgensi dan Draft Konsep Awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada Aplikasi SIMAS PUU”* terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, Whole of Government dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut:

Nilai-Nilai ANEKA

1. Akuntabilitas

Aplikasi SIMAS PUU menjadi salah bentuk bukti transparansi kinerja para Perancang Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kondisi sebelum aktualisasi Penulis menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran para Perancang Undang-Undang dalam mengunggah urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU yang sedang disusun pada Pusat PUU BK DPR RI.

Setelah Penulis menyelesaikan kegiatan pertama yaitu pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada Aplikasi SIMAS PUU, kegiatan ini mencerminkan nilai akuntabilitas yaitu untuk memperbaiki kinerja Perancang Undang-Undang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU yang sedang disusun di Pusat PUU pada aplikasi SIMAS PUU sehingga masyarakat dapat

terlibat secara aktif dalam perancangan undang-undang dengan memberikan tanggapan dan/atau masukan.

2. Etika Publik

Dalam kegiatan pertama ini, Penulis banyak melakukan koordinasi dengan para Perancang Undang-Undang, Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang, Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum serta pranata komputer dari BDTI. Dari koordinasi tersebut tercermin nilai Etika Publik yaitu *menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama*. Karena hingga rampungnya kegiatan ini, Penulis telah berkomunikasi, berkonsultasi maupun bekerjasama dengan para Perancang Undang-Undang dan Kepala Pusat PUU terkait urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU mana saja yang dapat diunggah pada aplikasi SIMAS PUU.

Setelah menyelesaikan kegiatan ini tercermin juga nilai lainnya dari etika publik yaitu *mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik*. Pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU yang sedang disusun di Pusat PUU pada aplikasi SIMAS PUU merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Penulis sebagai Perancang Undang-Undang pada Pusat PUU Badan Keahlian DPR RI.

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN

1. Whole of Government (WoG)

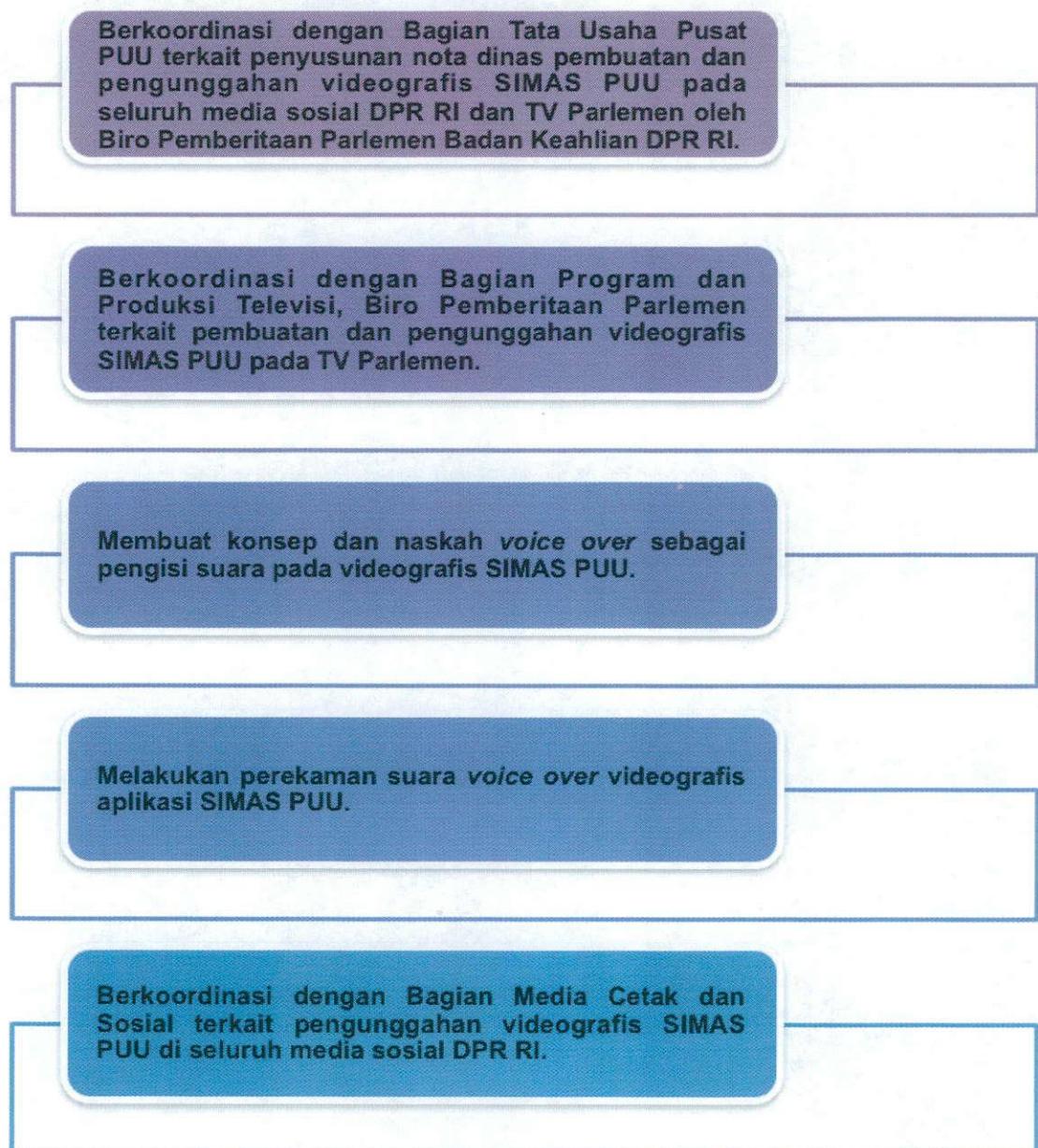
WoG dipandang sebagai bentuk kerjasama antar seluruh aktor dalam instansi pelayanan publik yang bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama. Dari kegiatan pertama ini, tercermin nilai-nilai WoG ketika Penulis berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Kepala

Pusat PUU, para Perancang Undang-Undang, Tata Usaha Pusat PUU dan pranata komputer madya BDTI terkait dengan pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU serta permohonan akses admin aplikasi Pusat Perancangan Undang-Undang.

B.IV. *Flowchart* Kegiatan Kedua

Publikasi Aplikasi SIMAS PUU dalam Bentuk Videografis yang Diunggah di Seluruh Media Sosial DPR RI dan TV Parlemen

Gambar B.IV.1. *Flowchart* Tahapan Kegiatan – Kegiatan Kedua



B.V. Uraian Tahapan Kegiatan – Kegiatan Kedua

1. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pusat PUU terkait penyusunan nota dinas pembuatan dan pengunggahan videografis SIMAS PUU pada seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen oleh Biro Pemberitaan Parlemen Badan Keahlian DPR RI.

Pada tahapan kegiatan yang pertama, Penulis telah berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI terkait penyusunan nota dinas pembuatan dan pengunggahan videografis SIMAS PUU oleh Biro Pemberitaan Parlemen Badan Keahlian DPR RI.

Gambar B.V.1. Penulis Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pusat PUU Terkait Penyusunan Nota Dinas Pembuatan Dan Pengunggahan Videografis SIMAS PUU oleh Biro Pemberitaan Parlemen Badan Keahlian DPR RI



Koordinasi tersebut telah Penulis lakukan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pada pukul 10.00 WIB pada Ruang Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Lt.7. Adapun nota dinas pembuatan dan pengunggahan videografis aplikasi SIMAS PUU pada seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen oleh Biro Pemberitaan Parlemen Badan Keahlian DPR RI dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.

2. Berkoordinasi dengan Bagian Program dan Produksi Televisi, Biro Pemberitaan Parlemen terkait pembuatan dan pengunggahan videografis aplikasi SIMAS PUU pada TV Parlemen.

Tahapan kegiatan selanjutnya, Penulis melakukan koordinasi dengan bagian Program Dan Produksi Televisi, Biro Pemberitaan Parlemen terkait dengan pembuatan dan pengunggahan videografis aplikasi SIMAS PUU pada TV Parlemen. Rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 pada pukul 08.00 s/d 10.00 WIB pada Ruang Rapat Program Dan Produksi Televisi, Gedung Nusantara IV DPR RI yang dihadiri oleh Penulis, Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi, Bapak Bayu Setiadi, S.IP., Penyelia Editor, Bapak Ferdiyan dan Editor, Bapak Ganda Tumanggor. Undangan rapat dan daftar hadir rapat koordinasi tersebut dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran IV.

Adapun pokok-pokok pembicaraan dalam rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H memaparkan maksud dan tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi dengan bagian Program dan Produksi Televisi yaitu pembuatan dan pengunggahan videografis SIMAS PUU pada TV Parlemen dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktualisasi peserta Latsar CPNS angkatan II tahun 2019.*
2. *Bapak Bayu Setiadi, S.IP menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan tindak lanjut rapat koordinasi sebagai berikut:*

- a. Pembuatan konsep videografis oleh Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H diserahkan paling lambat Kamis, 25 Juli 2019.
- b. Pembuatan videografis akan dikerjakan oleh Sdr. Ferdiyan selaku Penyelia Editor dan Ganda Tumanggor selaku Editor.
- c. Video akan menggunakan pengisi suara (voice over) oleh Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H yang naskah videografisnya dibuat dan diserahkan oleh Sdri. Esther paling lambat Kamis, 25 Juli 2019.
- d. Perekaman suara (voice over) untuk keperluan videografis dilakukan pada hari Kamis, 25 Juli 2019.

Laporan singkat rapat koordinasi pembahasan pembuatan dan pengunggahan videografis SIMAS PUU pada TV Parlemen dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran V.

Gambar B.V.2. Rapat Koordinasi Pembuatan dan Pengunggahan Videografis Aplikasi SIMAS PUU pada TV Parlemen



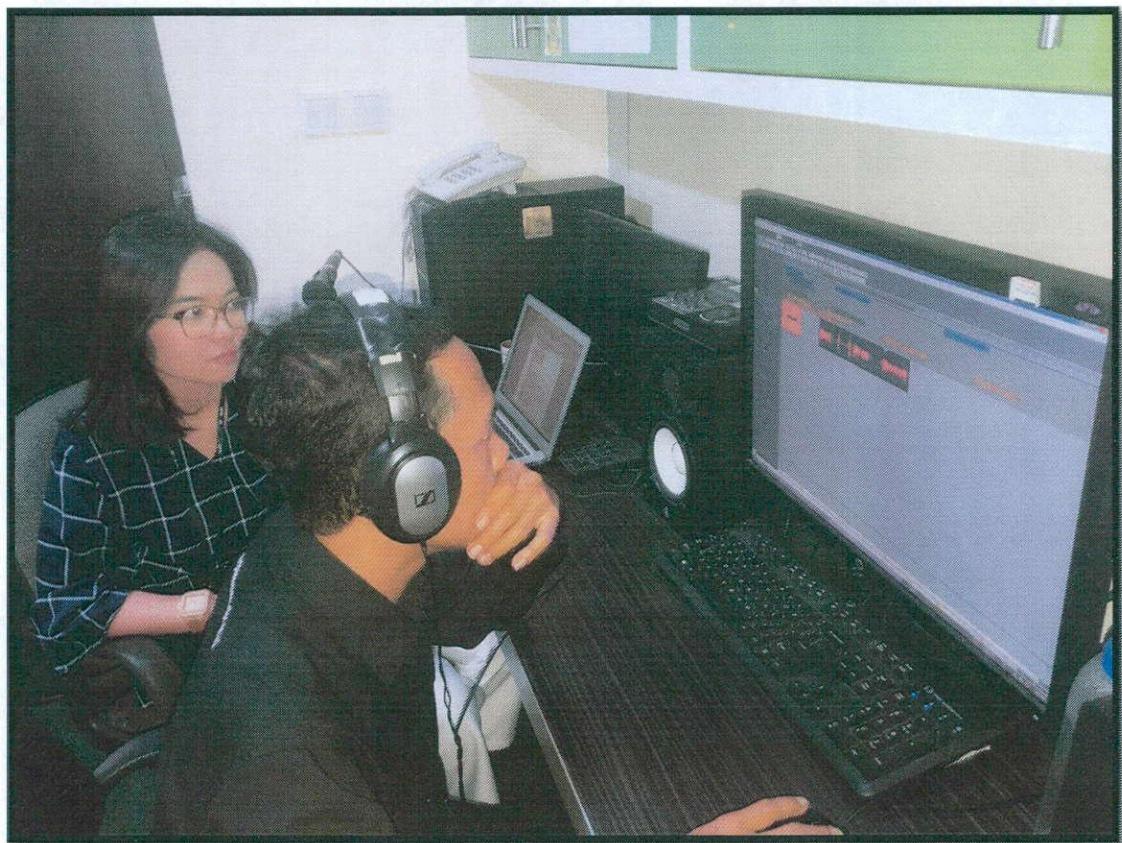
3. Membuat konsep dan naskah *voice over* sebagai pengisi suara pada videografis SIMAS PUU.

Menindaklanjuti dari tahapan kegiatan sebelumnya, Penulis kemudian membuat konsep dan naskah *voice over* untuk pengisi suara pada videografis aplikasi SIMAS PUU. Adapun konsep dari videografis SIMAS PUU adalah animasi berupa pengenalan SIMAS PUU dan tata cara (tutorial) bagaimana masyarakat memberikan tanggapan dan/atau masukan pada aplikasi SIMAS PUU. Selanjutnya, Penulis membuat naskah *voice over* sebagai pengisi suara pada videografis SIMAS PUU. Naskah *voice over* videografis aplikasi SIMAS PUU yang dibuat oleh Penulis dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI.

4. Melakukan perekaman suara *voice over* videografis aplikasi SIMAS PUU.

Pada tahapan kegiatan yang keempat, Penulis bersama dengan 2 (dua) *editor* dari TV Parlemen yaitu Bapak Ganda dan Bapak Bagas melakukan perekaman *voice over* videografis SIMAS PUU menggunakan naskah yang telah dibuat oleh Penulis. Perekaman tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 di *Ruang Voice Over* TV Parlemen, Gedung Nusantara IV pada pukul 13.00 WIB.

Gambar B.V.3. Perekaman suara Penulis untuk Keperluan Voice Over Videografis Aplikasi SIMAS PUU



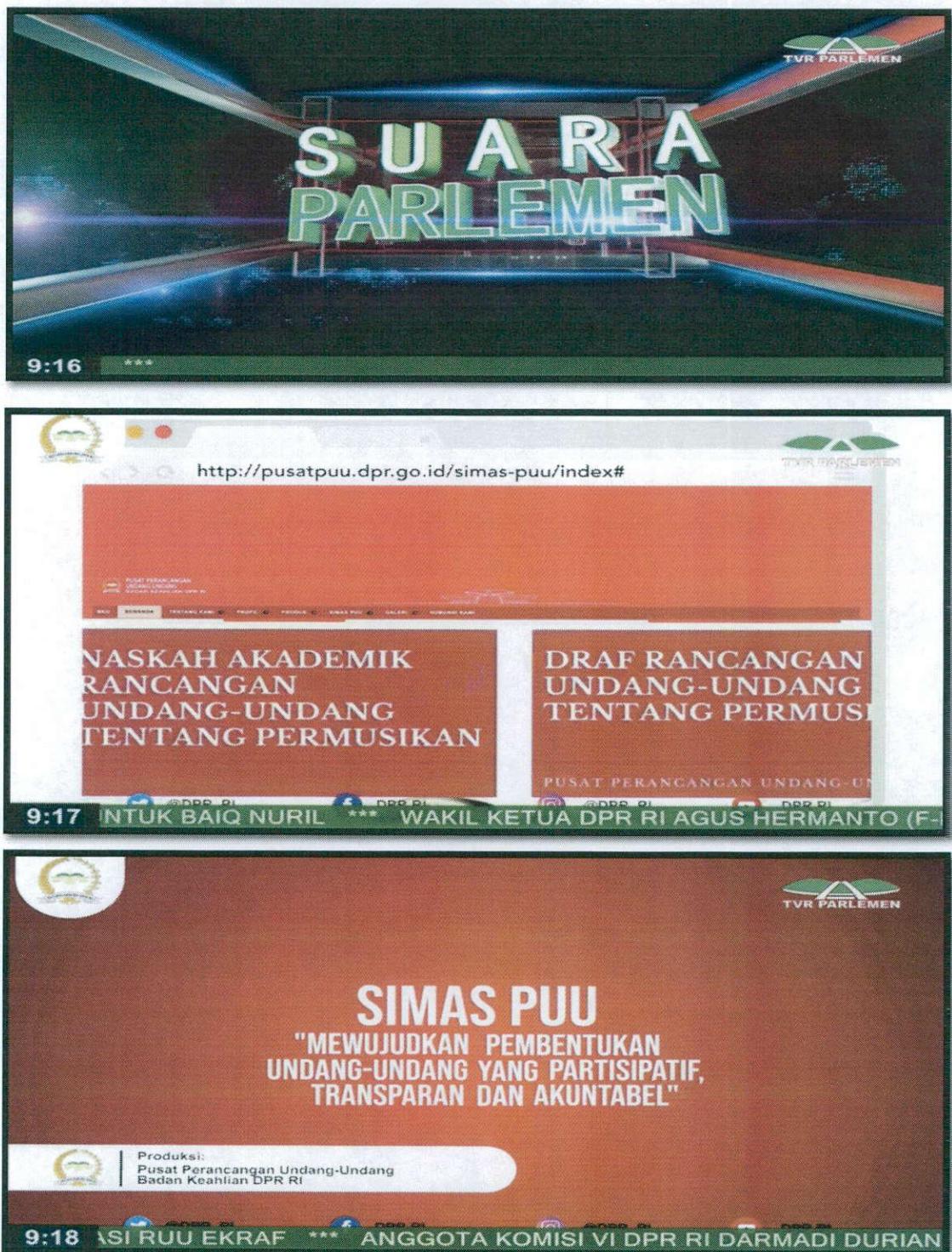
Setelah menyelesaikan rangkaian tahapan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas, videografis SIMAS PUU yang telah rampung kemudian dipublikasikan melalui penayangan pada TV Parlemen. Videografis SIMAS PUU tersebut ditayangkan pada setiap jeda program TV Parlemen sebagai iklan dengan periode penayangan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Gambar B.V.4. Videografis Aplikasi SIMAS PUU

A screenshot of a website titled 'PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN DPR RI'. The main content area is titled 'Naskah Akademik' and lists various academic manuscripts. Each entry includes the title, a small thumbnail image, the 'Tahapan' (Stage) column, and a 'DETAL' (Detail) link. The 'Tahapan' column shows stages like 'Rencana Penyusunan NA', 'Konsep Awal NA', and 'Konsep Awal NA'. The 'DETAL' links are blue and underlined. At the bottom of the page, there are social media icons for Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube, each with the handle '@DPR_RI'. The URL in the browser bar is 'http://pusatpuu.dpr.go.id/simas-puu/index#'.

Nama NA	Tahapan	DETAL
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Rencana Penyusunan NA	DETAL
RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	Konsep Awal NA	DETAL
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Rencana Penyusunan NA	DETAL
RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	Konsep Awal NA	DETAL
RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Konsep Awal NA	DETAL
RUU tentang Penyadapan	Konsep Awal NA	DETAL
RUU tentang Permusikan	Konsep Awal NA	DETAL
RUU tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD & DPRD	Konsep Awal NA	DETAL
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Konsep Awal NA	DETAL
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2006 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rencana Penyusunan NA	DETAL

Gambar B.V.5. Penayangan Videografis Aplikasi SIMAS PUU pada TV Parlemen



5. Berkoordinasi dengan Bagian Media Cetak dan Sosial dan terkait pengunggahan videografis SIMAS PUU di seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen.

Pada tahapan kegiatan yang terakhir dalam kegiatan kedua ini, pada tanggal 29 Agustus 2019, Penulis telah melakukan koordinasi dengan Kepala Subbagian Media Sosial dan Website, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen, Ibu Nita Juwita S.Sos terkait pengunggahan videografis SIMAS PUU di seluruh media sosial DPR dan TV Parlemen yaitu:

- 1) Facebook;
- 2) Twitter;
- 3) Youtube; dan
- 4) Instagram.

Untuk pengunggahan videografis SIMAS PUU pada instagram, selain diunggah pada laman akun DPR RI, videografis SIMAS PUU juga diunggah pada *instastory* DPR RI setiap hari Sabtu dan/atau Minggu.

Gambar B.V.6. Penulis Berkoordinasi dengan Ibu Nita Juwita S.Sos Terkait Pengunggahan Vidografis SIMAS PUU pada Seluruh Media Sosial DPR RI

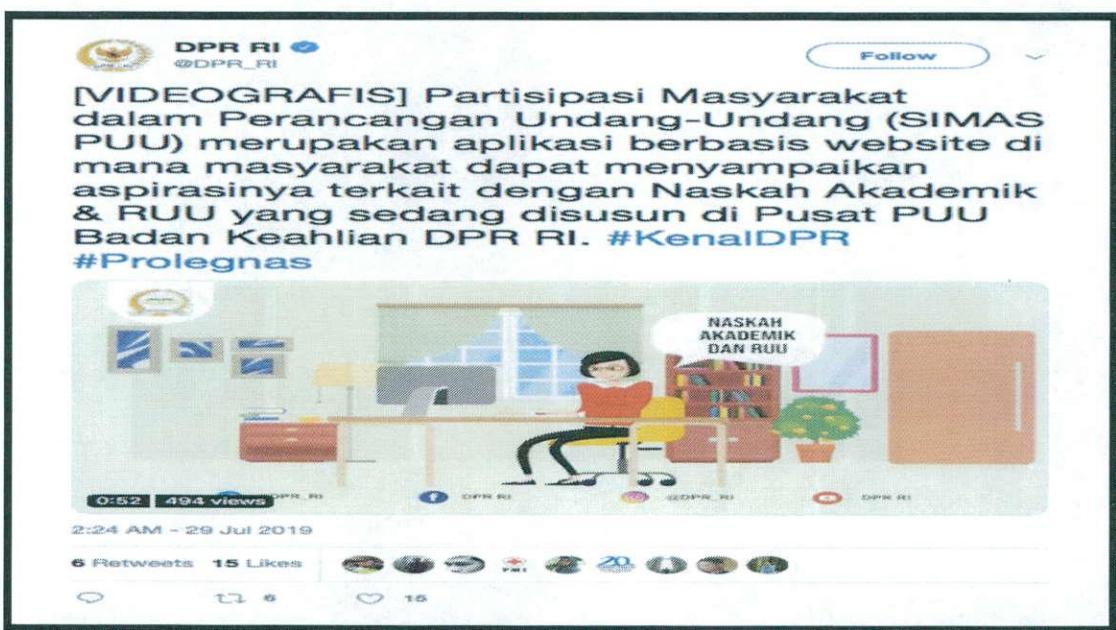


Gambar B.V.7. Screenshot Unggahan Videografis SIMAS PUU pada Seluruh Media Sosial DPR RI

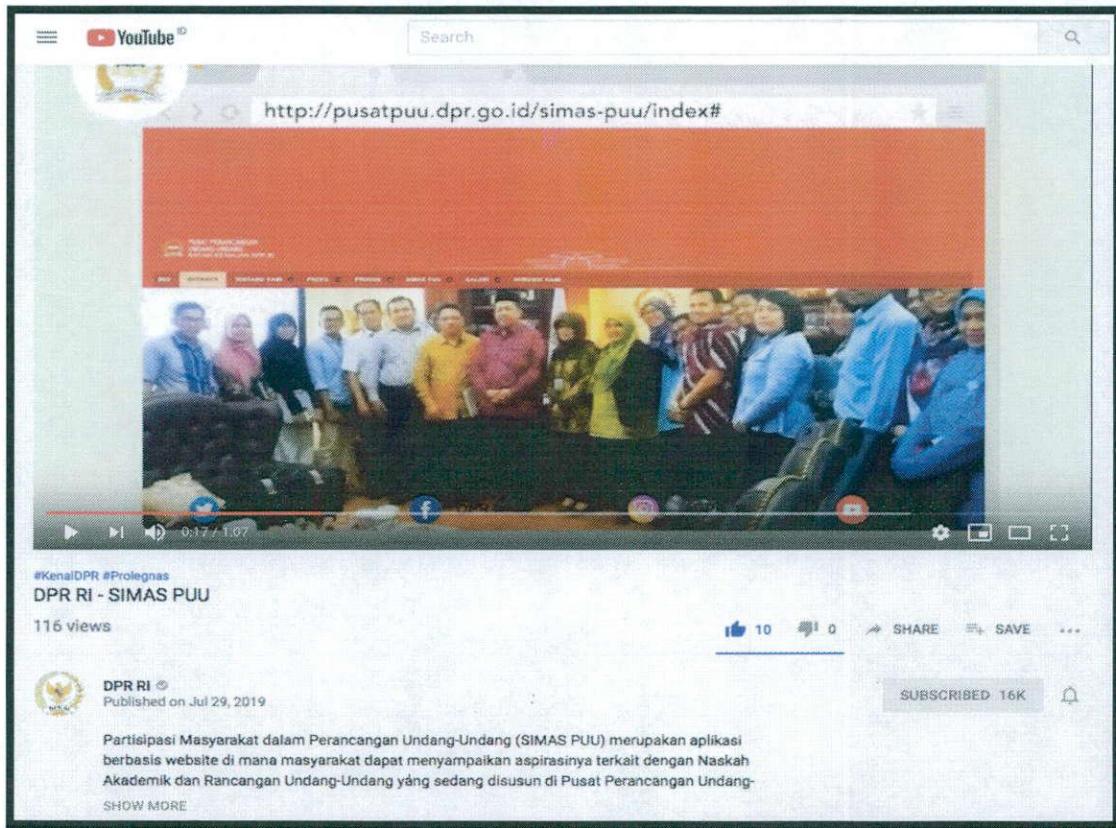
Facebook (DPR RI)



Twitter (@DPR_RI)



Youtube (DPR RI)



#KenalDPR #Prolegnas
DPR RI - SIMAS PUU

116 views

10 likes, 0 dislikes, 0 shares, 0 saves

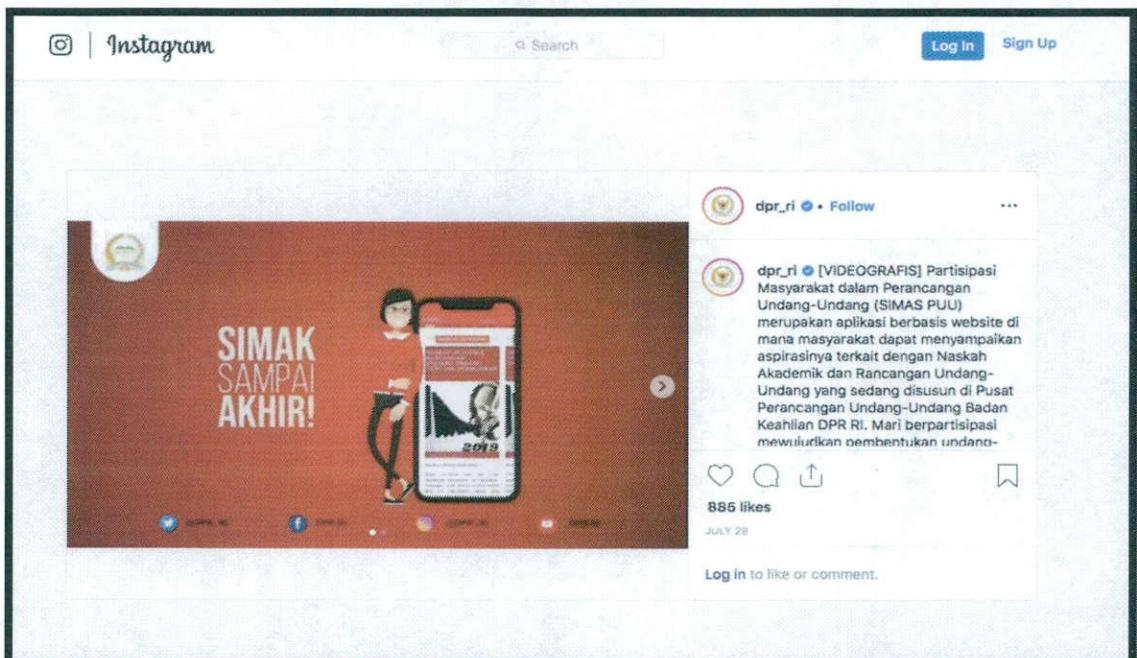
Published on Jul 29, 2019

Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) merupakan aplikasi berbasis website di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terkait dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang.

SHOW MORE

SUBSCRIBED 16K

Instagram (dpr_ri)



dpr_ri • Follow

[VIDEOGRAFIS] Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) merupakan aplikasi berbasis website di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya terkait dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Mari berpartisipasi mewujudkan pembentukan undang-

886 likes

JULY 29

Log in to like or comment.

B.VI. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan Kedudukan serta Peran ASN

Setelah menyelesaikan kelima tahapan kegiatan pada kegiatan pertama ini yaitu ***“Publikasi Aplikasi SIMAS PUU dalam Bentuk Videografi yang Diunggah di Seluruh Media Sosial DPR RI dan TV Parlemen”*** terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, *Whole of Government* dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut:

Nilai-Nilai ANEKA

1. Akuntabilitas

Publikasi aplikasi SIMAS PUU pada seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen mencerminkan nilai akuntabilitas karena publikasi tersebut menjadi wujud pertanggungjawaban kinerja para Perancang Undang-Undang melalui aplikasi SIMAS PUU.

2. Komitmen Mutu

Dalam kegiatan ini juga tercermin nilai komitmen mutu karena adanya kebaruan yaitu pada pembuatan videografi aplikasi SIMAS PUU yang menjadi objek publikasi kepada masyarakat luas yang sebelumnya belum pernah ada. Publikasi aplikasi SIMAS PUU ini juga memiliki nilai kemanfaatan yaitu agar masyarakat luas mengetahui bahwa saat ini masyarakat dapat terlibat aktif dalam perancangan undang-undang melalui aplikasi SIMAS PUU.

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN

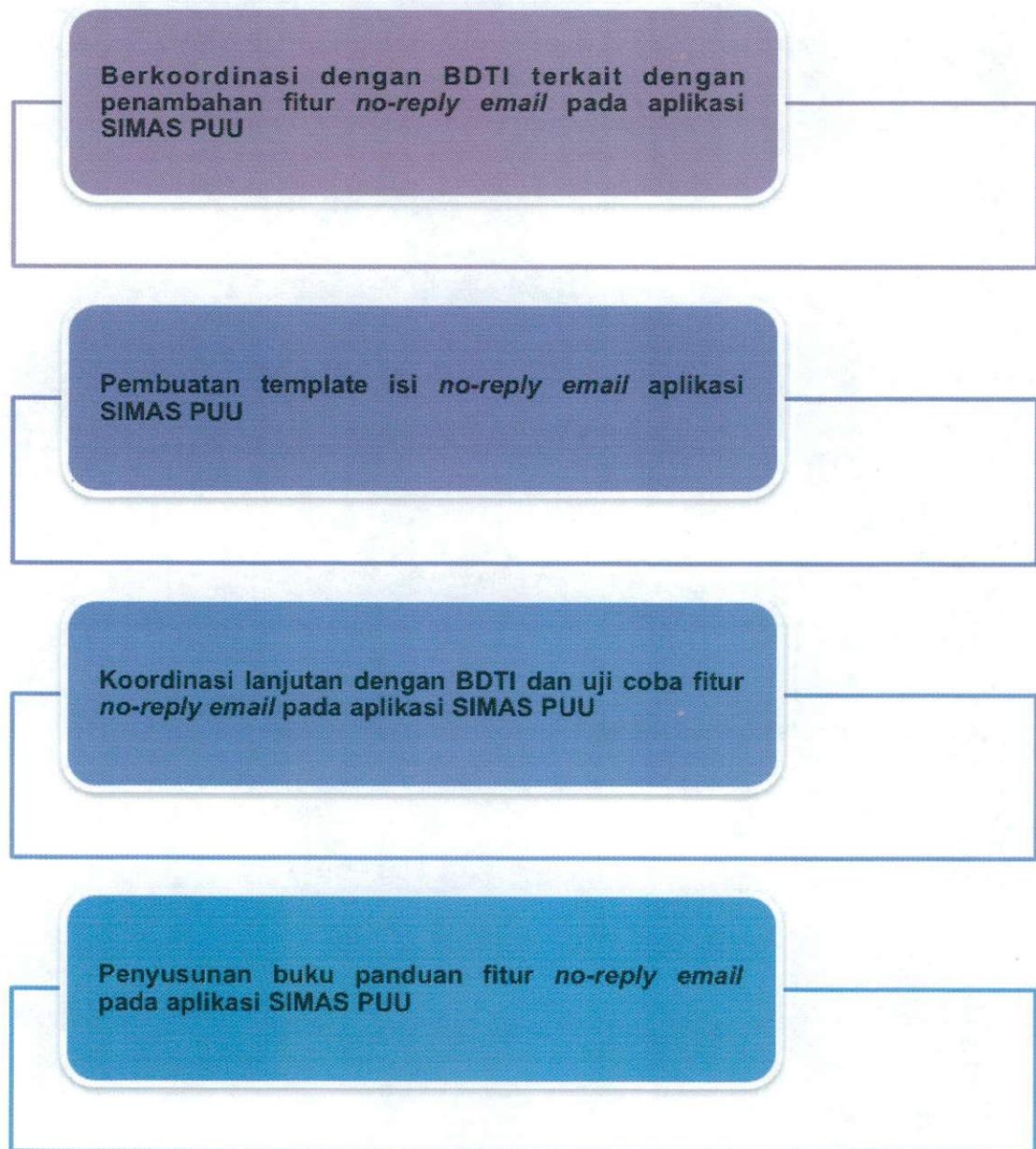
1. *Whole of Government (WoG)*

Dari kegiatan kedua ini, tercermin nilai-nilai WoG ketika Penulis berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Bagian Program Dan Produksi Televisid dan Bagian Media Cetak dan Sosial Biro Pemberitaan Parlemen terkait dengan publikasi aplikasi SIMAS PUU dalam bentuk videografis yang diunggah di seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen.

B.VII. *Flowchart* Kegiatan Ketiga

Penambahan fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU guna memberikan konfirmasi langsung kepada masyarakat bahwa tanggapannya telah diterima dan/atau ditindaklanjuti

Gambar B.VII.1. *Flowchart* Tahapan Kegiatan – Kegiatan Ketiga



B.VIII. Uraian Tahapan Kegiatan – Kegiatan Ketiga

1. Berkoordinasi dengan BDTI terkait dengan penambahan fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU

Pada tahapan kegiatan pertama, Penulis telah melakukan koordinasi dengan BDTI terkait dengan penambahan fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU melalui rapat koordinasi dengan Pranata Komputer Madya, Bapak Airlangga Eka Wardhana, S.Kom.,M.T.I. Rapat koordinasi tersebut telah dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Juli 2019 pada pukul 08.30 s.d 12.00 WIB. Adapun pokok pembahasan rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Masing-masing peserta latsar CPNS angkatan II tahun 2019 memaparkan kegiatan aktualiasinya yang memerlukan koordinasi dengan BDTI.*
- 2) *Peserta latsar CPNS angkatan II tahun 2019 membuat laporan masing-masing kegiatan aktualiasinya yang memerlukan koordinasi dengan BDTI kemudian dikompilasikan ke dalam 1 (satu) file dengan format pdf.*

Pada rapat koordinasi tersebut, Penulis memaparkan rencana kegiatan terkait dengan penambahan fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU kepada Bapak Airlangga. Adapun fungsi dari fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU ini adalah untuk memberikan pemberitahuan secara otomatis kepada masyarakat yang telah memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU, sehingga masyarakat dapat mengetahui status tanggapan dan/atau masukan yang telah diberikan pada aplikasi SIMAS PUU.

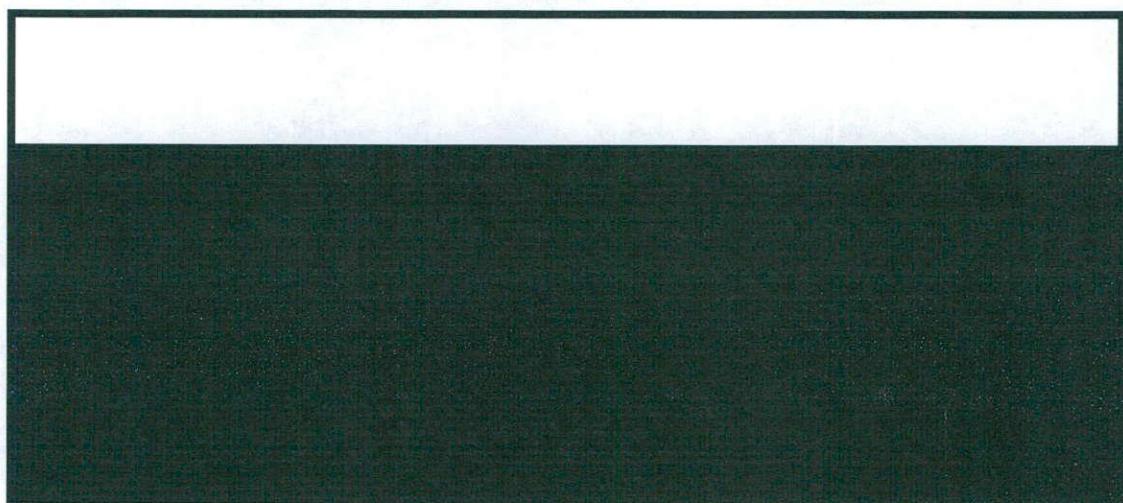
Pemberitahuan sebagaimana diuraikan di atas akan secara otomatis terkirim pada *email* pengirim tanggapan dan/atau masukan pada aplikasi SIMAS PUU agar dapat mempermudah masyarakat untuk tidak perlu setiap saat memantau aplikasi SIMAS PUU untuk mengetahui status tanggapan

dan/atau masukannya sudah diterima oleh admin SIMAS PUU atau sudah ditindaklanjuti.

Arahan lanjutan dari beliau untuk Penulis adalah membuat template isi *no-reply email* yang terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam SIMAS PUU; dan
- 2) Pemberitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam SIMAS PUU.

Gambar B.VIII.1. Rapat Koordinasi Aktualisasi Penulis dengan BDTI Terkait Penambahan Fitur No-Reply Email pada Aplikasi SIMAS PUU



Undangan rapat, daftar hadir serta laporan singkat rapat koordinasi tersebut di atas, dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII.

2. Pembuatan template isi *no-reply email* aplikasi SIMAS PUU

Setelah menyelesaikan tahapan kegiatan pertama, Penulis menindaklanjuti arahan dari Bapak Airlangga BDTI untuk menyusun *template* isi dari *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU. Adapun template isi *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU terdiri dari 2 (dua) *template* yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam SIMAS PUU; dan
- 2) Pemberitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam SIMAS PUU.

Pengerjaan template isi *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU rampung pada hari Kamis, 25 Juli 2019. Adapun template isi *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU yang dibuat oleh Penulis dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran VIII.

3. Koordinasi lanjutan dengan BDTI dan uji coba fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU

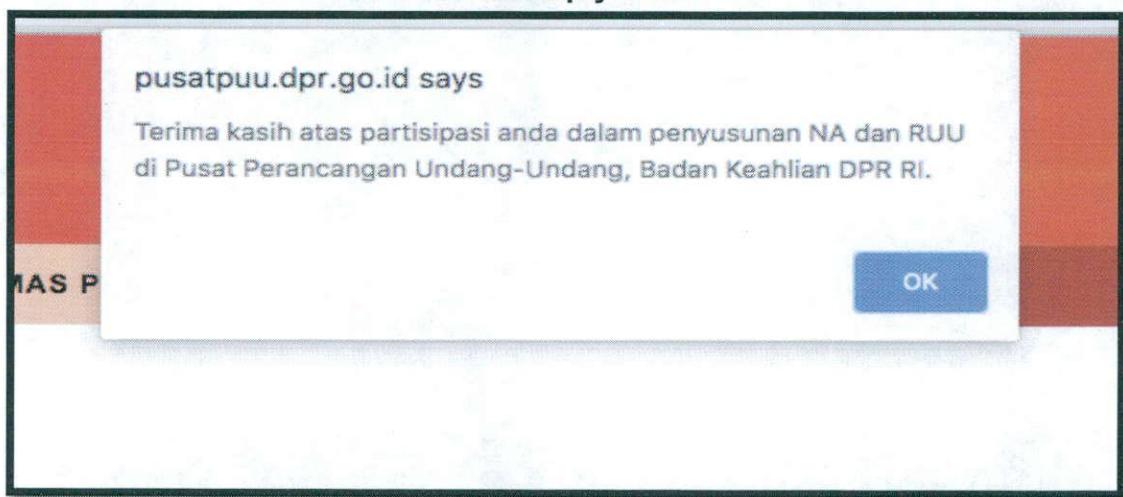
Pada tahapan kegiatan yang ketiga, Penulis beserta Pranata Komputer Madya, Bapak Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I., dan Pranata Komputer Muda, Bapak Erdinal Hendradjaja, ST., M.Sc melaksanakan rapat koordinasi lanjutan terkait hasil fitur tambahan pada aplikasi SIMAS PUU yang diajukan oleh Penulis. Rapat koordinasi lanjutan tersebut telah dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Agustus 2019 pada pukul 14.00 s/d selesai bertempat di Ruang Rapat Pusdiklat Lt. 4 Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Gambar B.VIII.2. Rapat Koordinasi Lanjutan dengan BDTI Terkait Fitur *No-Reply Email* pada Aplikasi SIMAS PUU



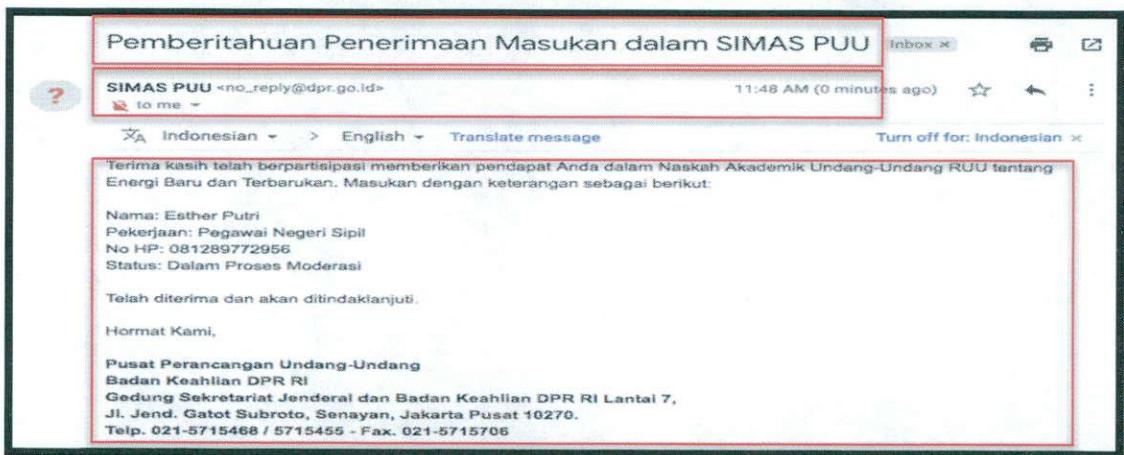
Dalam rapat koordinasi lanjutan ini, Penulis melakukan uji coba fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU. Sebelum terselesaikannya kegiatan aktualisasi ini, ketika masyarakat selesai memberikan tanggapan dan/atau masukan terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU, notifikasi telah diterimanya masukan dan/atau tanggapan hanya berupa *pop-up notification* pada aplikasi SIMAS PUU yang muncul sesaat setelah masyarakat memberikan tanggapan dan/atau masukan.

Gambar B.VIII.3. *Pop-up Notification* Telah Diterimanya Tanggapan dan/atau Masukan pada Aplikasi SIMAS PUU Sebelum Adanya Fitur No-Reply Email



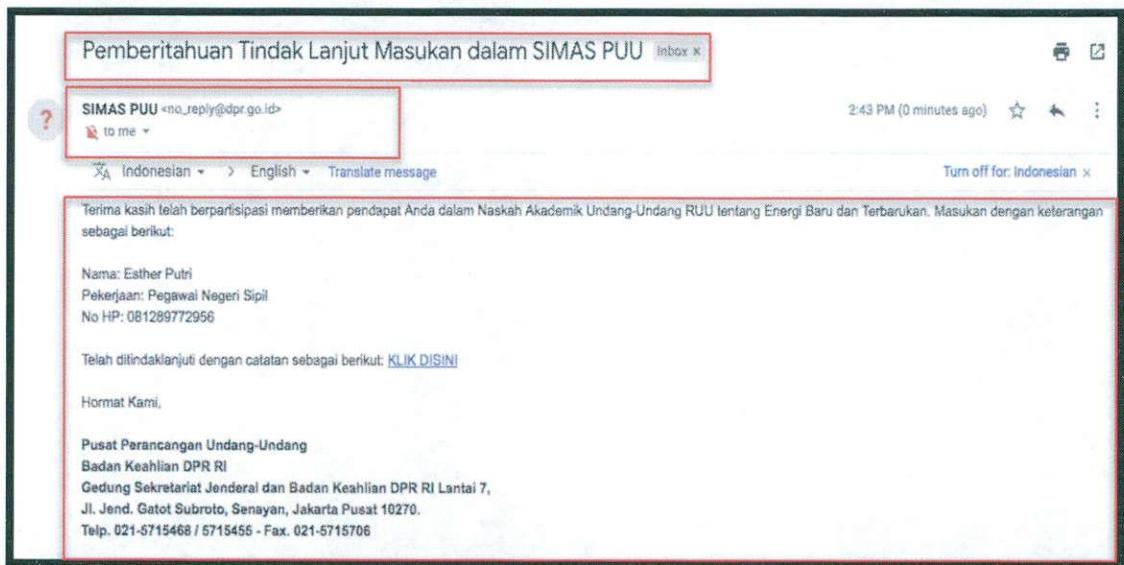
Dalam hal jaringan internet sedang tidak baik, *pop-up notification* di atas terkadang tidak muncul sehingga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui status tanggapan dan/atau masukannya sudah diterima atau belum. Sehingga, untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui status tanggapan dan/atau masukannya sudah diterima atau belum, Penulis menambahkan fitur *no-reply email* yang otomatis terkirim pada *email* pemberi tanggapan dan/atau masukan pada aplikasi SIMAS PUU.

Gambar B.VIII.4. Fitur *No-Reply Email* Pemberitahuan Penerimaan Tanggapan dan/atau Masukan pada Aplikasi SIMAS PUU



Selain itu, Penulis juga menambahkan fitur yang sebelumnya belum ada yaitu fitur *no-reply email* pemberitahuan tindak lanjut masukan pada aplikasi SIMAS PUU. Kondisi sebelum aktualisasi ini, ketika masyarakat telah memberikan tanggapan dan/atau masukannya pada aplikasi SIMAS PUU yang kemudian ditindaklanjuti oleh admin aplikasi SIMAS PUU, masyarakat harus selalu memantau bagaimana status tanggapannya pada aplikasi SIMAS PUU sehingga kondisi tersebut menjadi tidak efisien bagi masyarakat. Agar mempermudah masyarakat dalam mengetahui status tindak lanjut tanggapan dan/atau masukannya pada aplikasi SIMAS PUU, Penulis menambahkan fitur no-reply email yang secara otomatis akan memberikan pemberitahuan terkait tindak lanjut atas masukannya pada aplikasi SIMAS PUU.

Gambar B.VIII.5. Fitur *No-Reply Email* Pemberitahuan Tindak Lanjut Tanggapan dan/atau Masukan pada Aplikasi SIMAS PUU



4. Penyusunan buku panduan fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU

Pada tahapan kegiatan yang terakhir, Penulis menyusun buku panduan fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU guna mempermudah admin SIMAS PUU dalam memahami fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU. Buku panduan fitur *no-reply email* pada aplikasi SIMAS PUU ini disusun oleh Penulis bersama dengan Pranata Komputer Pelaksana, Bapak Daniel Tri Widyatmoko, A.Md.

Penyusunan buku panduan sebagaimana diuraikan di atas rampung pada tanggal Jumat, 9 Agustus 2019 dan dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran IX.

B.IX. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan Kedudukan serta Peran ASN

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan pertama ini yaitu "**Penambahan fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU guna memberikan konfirmasi langsung kepada masyarakat bahwa tanggapannya telah diterima dan/atau ditindaklanjuti**" terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, Whole of Government dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut:

Nilai-Nilai ANEKA

1. Akuntabilitas

Penambahan fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU mencerminkan nilai akuntabilitas sebagai bentuk transparansi agar masyarakat dapat mengetahui status tanggapan dan/atau masukannya terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU telah diterima dan/atau ditindaklanjuti.

2. Komitmen Mutu

Dalam kegiatan ini juga tercermin nilai komitmen mutu karena adanya kebaruan yaitu adanya fitur baru dalam aplikasi SIMAS PUU yang sebelumnya belum ada yaitu fitur no-reply email. Adapun nilai kemanfaatan dari fitur no-reply ini adalah agar masyarakat dapat mengetahui status tanggapan dan/atau masukannya terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU telah diterima dan/atau ditindaklanjuti.

3. Etika Publik

Dalam kegiatan pertama ini, Penulis banyak melakukan koordinasi dengan para Pranata Komputer BDTI serta teman-teman CPNS Latsar Angkatan II yang aktualisasinya memerlukan koordinasi dengan BDTI. Dari koordinasi tersebut tercermin nilai Etika Publik yaitu *menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama*. Karena hingga rampungnya kegiatan ini, Penulis telah berkomunikasi, berkonsultasi maupun bekerjasama dengan pihak-pihak yang telah Penulis uraikan di atas.

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN

1. Pelayanan Publik

Fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU ini juga mencerminkan nilai pelayanan publik karena semangat dari kegiatan ini adalah untuk mempermudah masyarakat dalam mengetahui status tanggapan dan/atau masukannya terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU telah diterima dan/atau ditindaklanjuti.

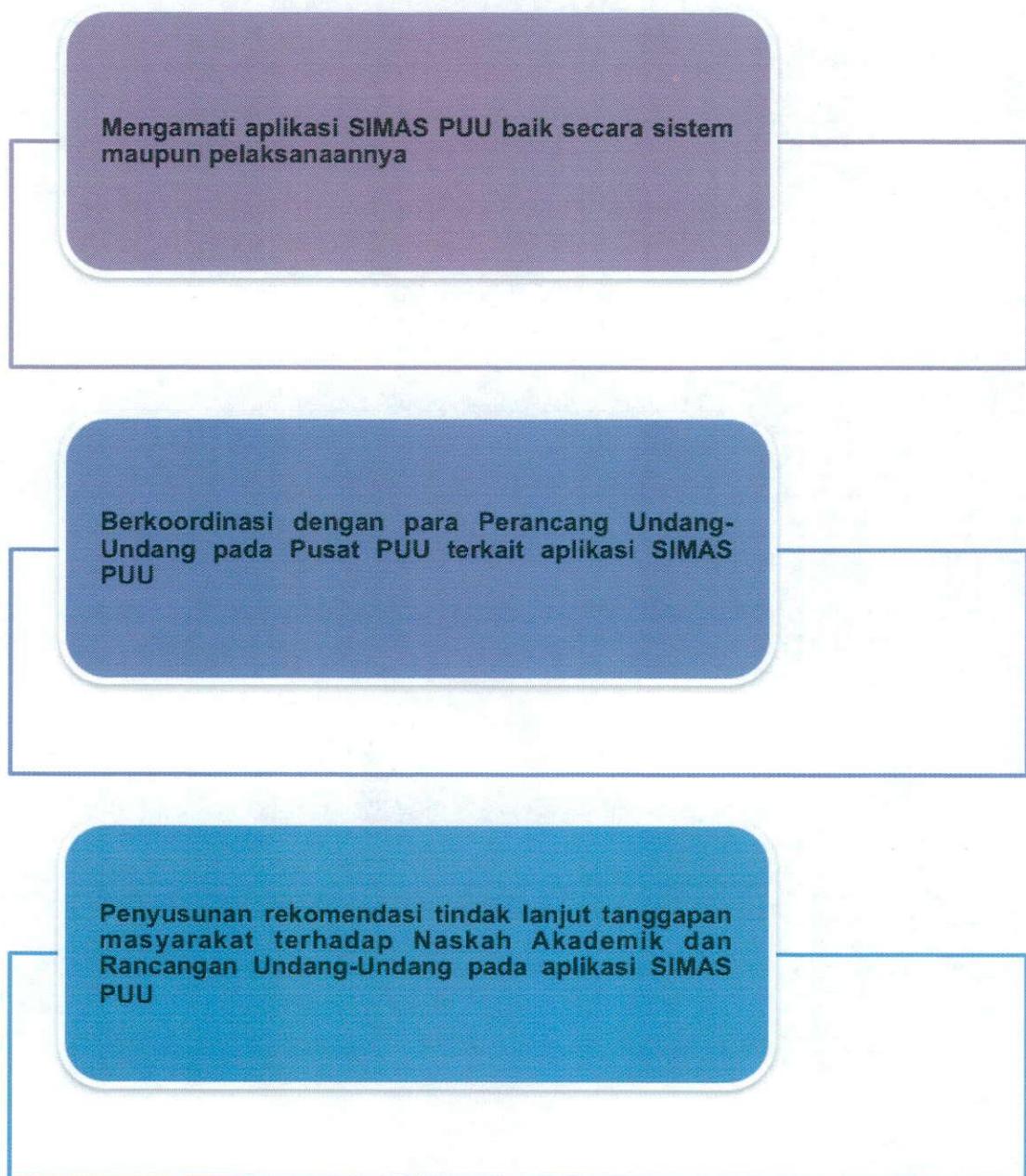
2. Whole of Government (WoG)

Dari kegiatan ketiga ini, tercermin nilai-nilai WoG ketika Penulis berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Pranata Komputer dari BDTI terkait dengan penambahan fitur no-reply email pada aplikasi SIMAS PUU. Penulis juga mengkoordinasikan teman-teman CPNS Latsar Angkatan II yang aktualisasinya memerlukan koordinasi dengan BDTI sehingga terkoordinir secara satu pintu dan mempermudah BDTI dalam mengakomodir kegiatan aktualisasi CPNS Latsar Angkatan II yang memerlukan bantuan BDTI.

B.X. *Flowchart* Kegiatan Keempat

Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU

Gambar B.X.1. *Flowchart* Tahapan Kegiatan – Kegiatan Keempat



B.XI. Uraian Tahapan Kegiatan – Kegiatan Keempat

1. Mengamati aplikasi SIMAS PUU baik secara sistem maupun pelaksanaannya

Pada tahapan kegiatan pertama ini, Penulis melakukan pengamatan baik secara sistem maupun pelaksanaan terkait aplikasi SIMAS PUU saat ini. Pengamatan ini berlangsung dari bulan April 2019 hingga sekarang. Dari pengamatan Penulis, ditemukan masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar terwujudnya optimalisasi aplikasi SIMAS PUU antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengunggahan urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU;
- 2) Belum optimalnya publikasi aplikasi SIMAS PUU kepada masyarakat;
- 3) Belum optimalnya tindak lanjut dari tanggapan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU; dan
- 4) Tidak dapat terunggahnya urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas.

2. Berkoordinasi dengan para Perancang Undang-Undang pada Pusat PUU terkait aplikasi SIMAS PUU

Setelah melakukan pengamatan terhadap aplikasi SIMAS PUU baik secara sistem maupun pelaksanaannya, Penulis melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan para Perancang Undang-Undang pada Pusat Peracangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI terkait aplikasi SIMAS PUU guna penyusunan

rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang pada aplikasi SIMAS PUU.

Penulis mendiskusikan poin-poin dari rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap naskah akademik dan rancangan undang-undang pada aplikasi SIMAS PUU bersama dengan Bapak Noval Ali Mochtar, Perancangan Undang-Undang Pertama yang juga merupakan salah satu admin SIMAS PUU.

Koordinasi sebagaimana diuraikan di atas dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 pada pukul 09.00 s/d 10.30 WIB bertempat di Lt. 7 Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Gambar B.XI.1. Penulis Berkoordinasi dengan Salah Satu Admin SIMAS PUU Terkait Rekomendasi Tindak Lanjut Tanggapan Masyarakat Terhadap Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Pada Aplikasi SIMAS PUU



3. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU

Penulis melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya dengan melakukan penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada aplikasi SIMAS PUU. Adapun rekomendasi tindak lanjut tersebut dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran X.

B.XII. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan Kedudukan serta Peran ASN

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan pertama ini yaitu "*Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU*" terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, Whole of Government dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut:

Nilai-Nilai ANEKA

1. Akuntabilitas

Penyusunan rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU mencerminkan nilai akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengamatan Penulis terhadap aplikasi SIMAS PUU dan koordinasi yang telah Penulis lakukan bersama dengan para Perancang Undang-Undang

pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

2. Komitmen Mutu

Dalam kegiatan ini juga tercermin nilai komitmen mutu karena adanya kebaruan yaitu adanya belum pernah adanya rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU. Adapun nilai kemanfaatan dari rekomendasi tindak lanjut ini adalah agar para Perancang Undang-Undang dapat memiliki panduan dalam memindaklanjuti tanyaapan dan/atau masukan masyarakat terhadap NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU.

3. Etika Publik

Dalam kegiatan pertama ini, Penulis melakukan koordinasi dengan Perancang Undang-Undang sehingga tercermin nilai Etika Publik yaitu *menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama*. Karena hingga rampungnya kegiatan ini, Penulis telah berkomunikasi, berkonsultasi maupun bekerjasama dengan pihak yang telah Penulis uraikan di atas.

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN

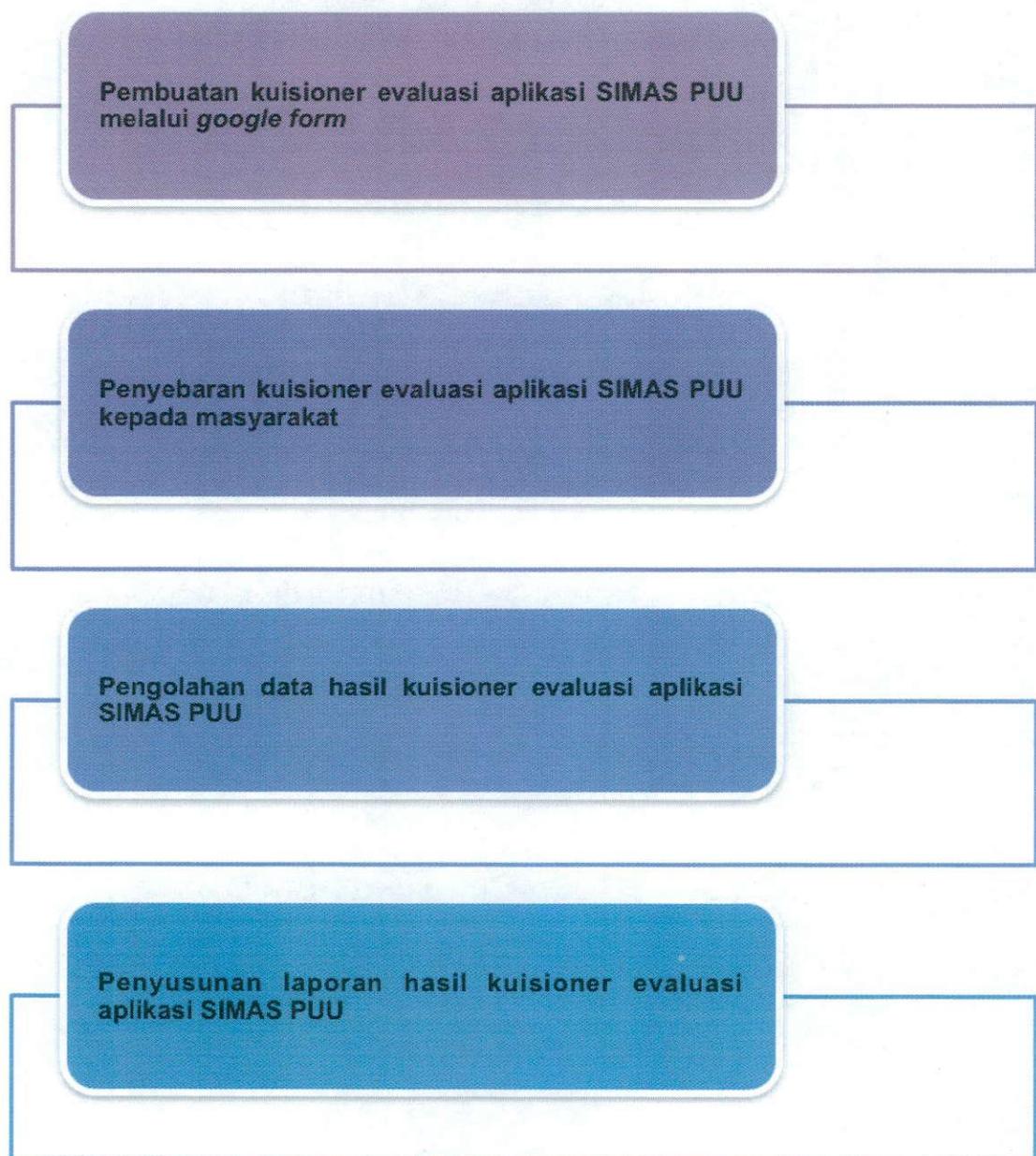
1. Whole of Government (WoG)

Dari kegiatan ketiga ini, tercermin nilai-nilai WoG ketika Penulis berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Perancang Undang-Undang terkait rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang pada Aplikasi SIMAS PUU.

B.XIII. *Flowchart* Kegiatan Kelima

5. Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi SIMAS PUU dengan Pembuatan Kuisioner yang Ditujukan Kepada Masyarakat

Gambar B.XIII.1. *Flowchart* Tahapan Kegiatan – Kegiatan Kelima



B.XIV. Uraian Tahapan Kegiatan – Kegiatan Kelima

1. Pembuatan kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU melalui *google form*

Pada tahapan kegiatan pertama dalam kegiatan kelima ini, Penulis membuat *paperless* kuisioner aplikasi SIMAS PUU melalui aplikasi *google form* agar mempermudah pembuatan, penyebaran dan pengolahan data kuisioner. Pembuatan kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU ini dilakukan pada hari Senin, 12 Agustus 2019 pada pukul 08.00 s/d 12.00 WIB bertempat di Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU ini ditujukan kepada masyarakat yang isinya terdiri dari 6 (enam) pertanyaan dan 1 (satu) kritik dan saran. Pertanyaan kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU tersebut dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran XI.

2. Penyebaran kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU kepada masyarakat

Setelah kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU selesai, Penulis melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu menyebarkan kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU kepada masyarakat melalui media sosial Instagram milik Penulis.

Gambar B.XIV.1. Penyebaran Kuisioner Evaluasi Aplikasi SIMAS PUU Melalui Media Sosial Instagram Penulis.

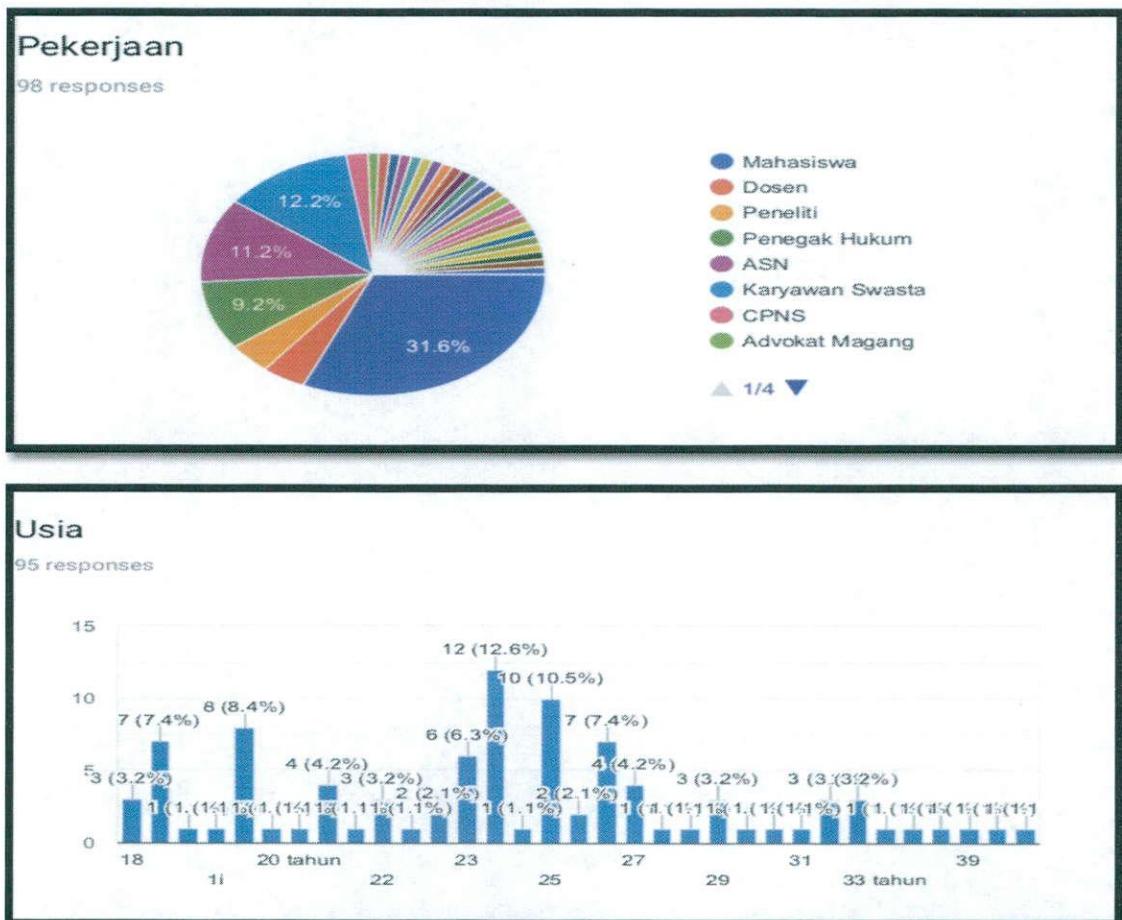


Penyebaran kuisioner aplikasi SIMAS PUU ini berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 12 Agustus 2019 hingga 14 Agustus 2019 dengan jumlah 100 (seratus) responden yang mengisi terdiri dari berbagai elemen masyarakat antara lain peneliti, dosen, mahasiswa, ASN, pegawai swasta, dokter, buruh, dan sebagainya.

3. Pengolahan data hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU

Setelah terdapat 100 (seratus) responden yang mengisi kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU, Penulis melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu mengolah data hasil kuisioner. Dikarenakan ketika mengisi kuisioner, banyak dari masyarakat yang mengisi kolom pertanyaan pekerjaan dan usia secara berulang, sehingga Penulis harus mengolah data kembali secara manual melalui grafik agar mendapatkan data yang *valid*.

Gambar B.XIV.2. Pengolahan data hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU



4. Penyusunan laporan hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU

Setelah melakukan pengolahan data hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU, Penulis melanjutkan dengan melakukan penyusunan laporan hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU melalui *google form*. Penyusunan laporan hasil evaluasi aplikasi SIMAS PUU tersebut dilakukan pada hari Jumat, 13 Agustus 2019 bertempat di Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun hasil

kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran XII.

B.XV. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan Kedudukan serta Peran ASN

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan pertama ini yaitu **“Evaluasi Pelaksanaan Aplikasi SIMAS PUU dengan Pembuatan Kuisioner yang Ditujukan Kepada Masyarakat”** terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, *Whole of Government* dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut:

Nilai-Nilai ANEKA

1. Akuntabilitas

Dalam kegiatan ini tercermin nilai akuntabilitas yaitu dari penyusunan laporan hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU sebagai bentuk pertanggungjawaban dilaksanakannya penyebaran kuisioner terkait evaluasi aplikasi SIMAS PUU.

2. Komitmen Mutu

Dalam kegiatan ini juga tercermin nilai komitmen mutu karena adanya kebaruan yaitu belum pernah adanya evaluasi aplikasi SIMAS PUU yang langsung dari pendapat masyarakat sebagai sasaran utama terbentuknya aplikasi SIMAS PUU. Adapun nilai kemanfaatan dari kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat sejauh ini terkait aplikasi SIMAS PUU dan bagaimana saran dari masyarakat untuk aplikasi SIMAS PUU ke depan.

3. Etika Publik

Dalam kegiatan kelima ini juga tercermin nilai etika publik yaitu bagaimana Penulis berkomunikasi dan bekerja sama secara langsung dengan masyarakat untuk mengisi kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PU.

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN

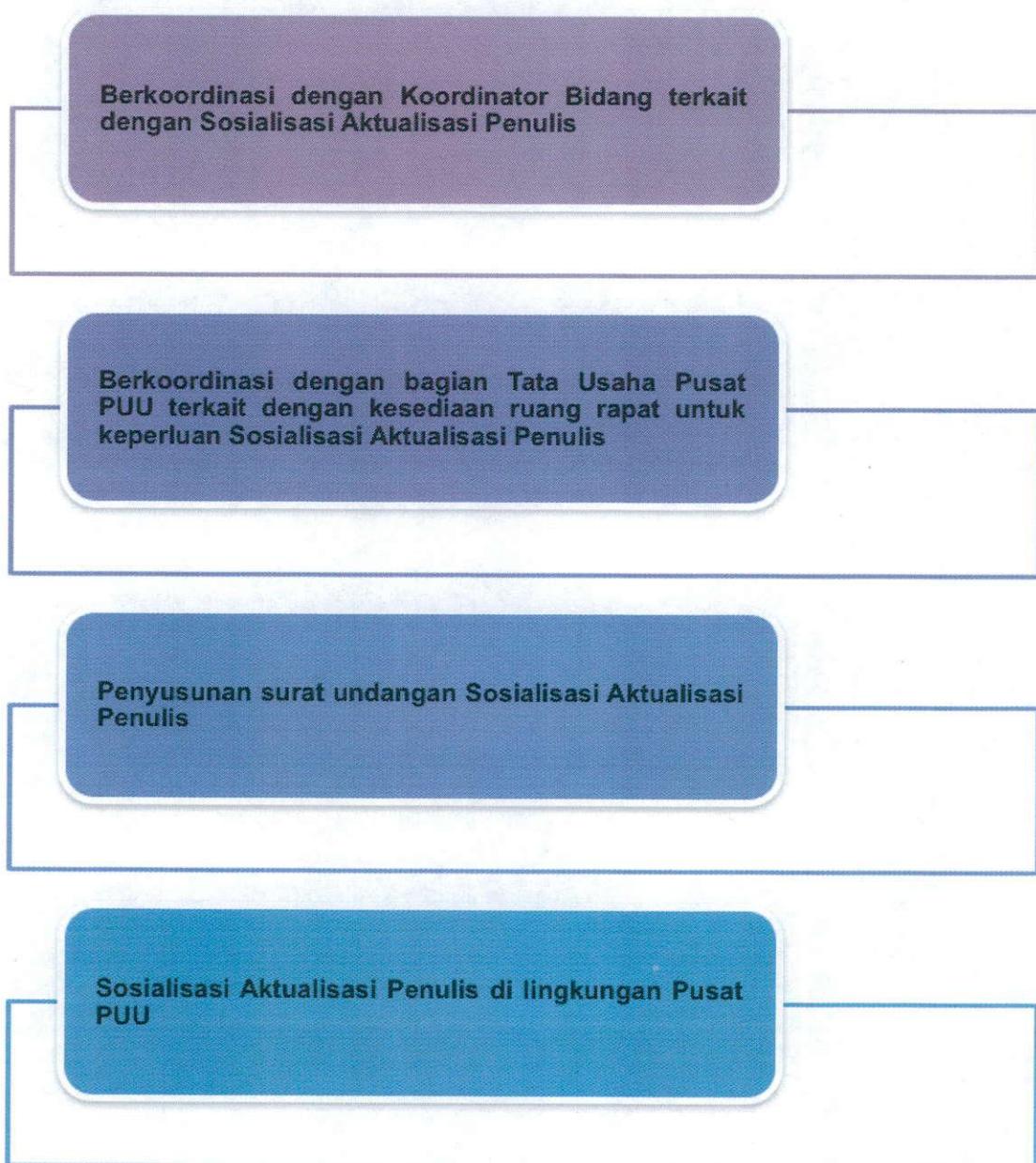
1. Pelayanan Publik

Dari kegiatan kelima ini, tercermin nilai pelayanan publik yaitu dengan adanya kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU ini, Penulis dapat mengetahui bagaimana pandangan masyarakat saat ini terkait aplikasi SIMAS PUU dan saran-saran yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadi bahan perbaikan bagi Pusat Perancangan Undang-Udang untuk memperbaiki aplikasi SIMAS PUU menjadi lebih baik lagi agar dapat meningkatkan salah satu fungsi ASN sebagai pelayan publik.

B.XVI. *Flowchart* Kegiatan Keenam

6. Sosialisasi Program Aktualisasi Penulis Di Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI

Gambar B.XVI.1. *Flowchart* Tahapan Kegiatan – Kegiatan Keenam



B.XVII. Uraian Tahapan Kegiatan – Kegiatan Keenam

1. Berkoordinasi dengan Koordinator Bidang terkait dengan Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi Penulis

Pada tahapan kegiatan yang pertama, Penulis melakukan koordinasi dengan Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Ricko Wahyudi, S.H., M.H terkait dengan rencana pelaksanaan sosialisasi kegiatan aktualisasi Penulis pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Koordinasi tersebut dilakukan pada hari Senin, 16 Agustus 2019.

2. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat PUU terkait dengan kesediaan ruang rapat untuk keperluan Sosialisasi Aktualisasi Penulis

Setelah berkoordinasi dengan Koordinator Bidang, Penulis melanjutkan tahapan kegiatan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan bagian tata usaha Pusat PUU terkait dengan kesediaan ruang rapat untuk keperluan sosialisasi aktualisasi Penulis. Setelah berkoordinasi akhirnya diperoleh izin pelaksanaan sosialisasi aktualisasi Penulis pada hari Selasa, 27 Agustus 2019 pada pukul 09.00 s/d selesai bertempat di ruang rapat 714, Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

3. Penyusunan surat undangan Sosialisasi Aktualisasi Penulis

Penulis kemudian melanjutkan tahapan kegiatan dengan melakukan penyusunan surat undangan sosialisasi kegiatan aktualisasi yang ditujukan kepada seluruh perancang undang-undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Adapun

surat undangan sosialisasi aktualisasi Penulis dapat ditinjau lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIII.

Gambar B.XVII.2. Penulis menyebarkan undangan rapat sosialisasi beserta bahan paparan aktualisasi kepada seluruh Perancang Undang-Undang Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



4. Sosialisasi Aktualisasi Penulis di lingkungan Pusat PUU

Setelah melakukan penyebaran undangan sosialisasi beserta dengan bahan paparan kepada seluruh perancang undang-undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, pada hari Selasa, 27 Agustus 2019, pukul 09.00 s/d 12.00, bertempat di ruang rapat 714, Lt. 7, Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Penulis melaksanakan sosialisasi kegiatan aktualisasi.

Gambar B.XVII.3. Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi Penulis pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI





Dalam sosialisasi kegiatan aktualisasi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa masukan dari para Perancang Undang-Undang yang dapat ditinjau lebih lanjut dalam laporan singkat dan daftar hadir rapat sosialisasi kegiatan aktualisasi Penulis sebagaimana terlampir dalam Lampiran XIV.

B.XVIII. Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan Kedudukan serta Peran ASN

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan pertama ini yaitu **“Sosialisasi Program Aktualisasi Penulis di Pusat Perancangan Undang-undang Badan Keahlian DPR RI”** terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu

dan Anti-Korupsi) dan kedudukan serta Peran ASN (Manajemen ASN, *Whole of Government* dan Pelayanan Publik), yaitu sebagai berikut:

Nilai-Nilai ANEKA

1. Akuntabilitas

Dalam kegiatan ini tercermin nilai akuntabilitas yaitu sosialisasi program aktualisasi penulis kepada seluruh perancang undang-undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagai pertanggungjawaban Penulis dalam melaksanakan seluruh kegiatan aktualisasi.

2. Etika Publik

Dalam kegiatan keenam ini juga tercermin nilai etika publik yaitu bagaimana Penulis berkomunikasi dalam memaparkan program kegiatan aktualisasi Penulis pada rapat sosialisasi Aktualisasi pada tanggal 27 Agustus 2019.

Nilai-Nilai Kedudukan serta Peran ASN

1. Whole of Government (WoG)

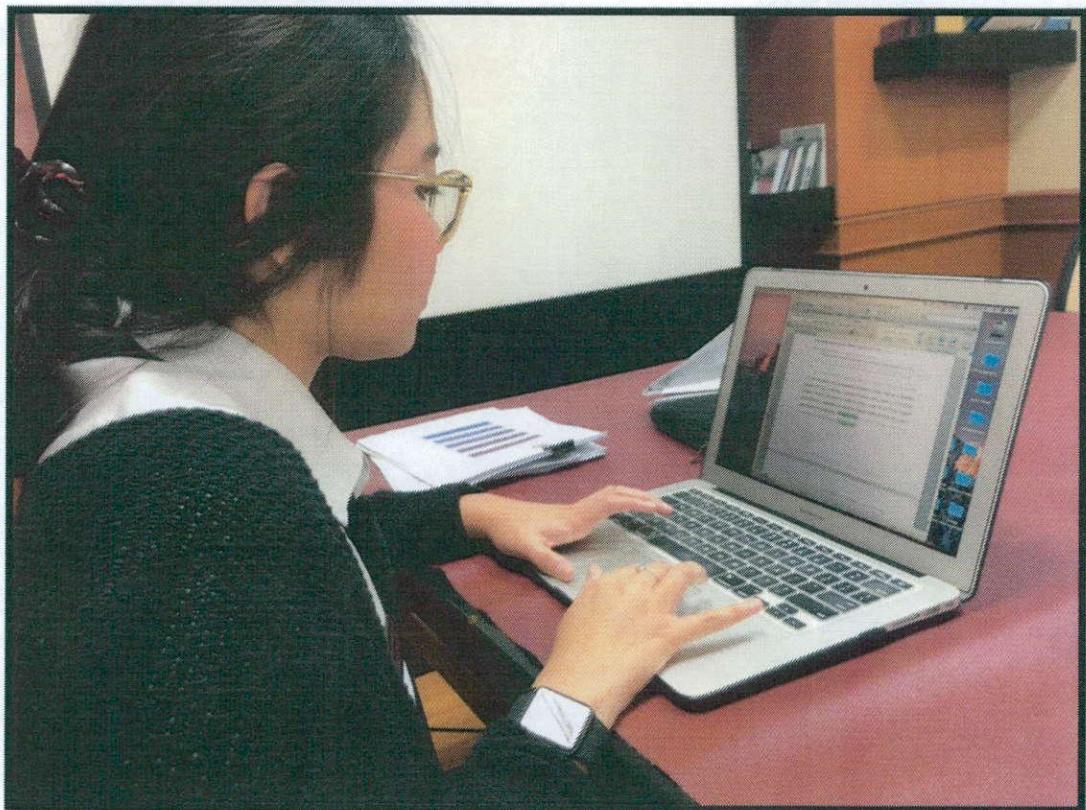
Dari kegiatan ketiga ini, tercermin nilai-nilai WoG ketika Penulis berkomunikasi dan berkonsultasi dengan dengan Perancang Undang-Undang terkait rapat sosialisasi kegiatan aktualisasi Penulis.

B.XIX. Kegiatan Ketujuh

7. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi

Setelah menyelesaikan keenam kegiatan sebagaimana diuraikan di atas, Penulis melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi yang dilakukan secara berkala setiap minggu dengan jenjang waktu dari minggu pertama hingga minggu keempat bulan Agustus.

Gambar XIX.1. Penulis melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi



Keterkaitan Kegiatan Aktualisasi dengan Nilai-Nilai ANEKA dan Kedudukan serta Peran ASN

Setelah menyelesaikan keempat tahapan kegiatan pada kegiatan pertama ini yaitu **“Penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi”** terdapat keterkaitan antara kegiatan aktualisasi yang Penulis telah lakukan dengan nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti-Korupsi).

Nilai-Nilai ANEKA

1. Akuntabilitas

Dalam kegiatan terakhir ini tercermin nilai akuntabilitas yaitu penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi sebagai pertanggungjawaban Penulis atas setiap kegiatan, tahapan kegiatan dan *output* program aktualisasi Penulis.

C. STAKEHOLDER

Penulis membagi ke dalam 2 bagian, pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aktualisasi ini, sebagai berikut:

Internal

Perancang Undang-Undang pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

Eksternal

1. Bidang Data dan Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI;
2. Bidang Sosial Media pada Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
3. Masyarakat.

D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa kemungkinan masalah yang timbul dalam proses pelaksanaan aktualiasasi Penulis, sebagai berikut:

Tabel II.D.1 Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan

No.	Internal	Eksternal
1.	Tidak terdapatnya ketentuan baku indikator Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang seperti apa yang dapat diunggah di SIMAS PUU sehingga tidak semua Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun dapat diunggah di SIMAS PUU.	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait adanya media untuk menyampaikan tanggapan terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun dalam Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui SIMAS PUU.
2.	Tidak terdapatnya <i>permanent admin</i> yang bertugas untuk memantau tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU.	
3.	Kurangnya publikasi dari Pusat Perancangan Undang-Undang terkait program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).	

E. ANTISIPASI MASALAH

Tabel II.E.1 Antisipasi Masalah

No.	Kendala yang Mungkin Terjadi	Strategi Mengatasi Kendala
1.	Tidak terdapatnya ketentuan baku indikator Naskah Akademik dan Rancangan	Melakukan rapat koordinasi para Perancang Undang-Undang untuk menentukan indikator Naskah

No.	Kendala yang Mungkin Terjadi	Strategi Mengatasi Kendala
	Undang-Undang yang seperti apa yang dapat diunggah di SIMAS PUU sehingga tidak semua Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun dapat diunggah di SIMAS PUU.	Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang seperti apa yang dapat diunggah di SIMAS PUU.
2.	Tidak terdapatnya <i>permanent admin</i> yang bertugas untuk memantau tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU.	Melakukan rapat koordinasi para Perancang Undang-Undang untuk penunjukan <i>permanent admin</i> yang bertugas untuk memantau tanggapan masyarakat yang masuk di SIMAS PUU.
3.	Kurangnya publikasi dari Pusat Perancangan Undang-Undang terkait program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).	Melakukan rapat koordinasi para Perancang Undang-Undang terkait kegiatan yang diperlukan untuk publikasi program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).

F. TIME SCHEDULE

No.	Kegiatan	Juli		Agustus				September	
		Minggu ke-		Minggu ke-				Minggu ke-	
		4	5	1	2	3	4	1	
1.	Pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada SIMAS PUU.								
2.	Publikasi program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) dalam bentuk konten videografis yang diunggah di seluruh media sosial DPR RI.								
3.	Penambahan fitur <i>no-reply email</i> pada website SIMAS PUU guna memberikan konfirmasi langsung kepada email masyarakat yang bersangkutan bahwa tanggapannya telah diterima dan akan ditindaklanjuti.								
4.	Pembuatan alur tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU yang perlu dilakukan oleh Perancang Undang-Undang.								
5.	Sosialisasi program aktualisasi Penulis di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.								
6.	Evaluasi pelaksanaan aktualiasi dengan pembuatan								

EVALUASI PELAKSANAAN
AKTUALISASI

No.	Kegiatan	Juli		Agustus				September
		Minggu ke-		Minggu ke-				Minggu ke-
		4	5	1	2	3	4	1
	kuisioner yang ditujuan kepada <i>stakeholder</i> .							
7.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi.							

Keterangan:

 = Proses Aktualisasi Kegiatan

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penulis telah menyelesaikan seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan sebagaimana diuraikan di atas dari minggu keempat bulan Juli hingga minggu keempat bulan Agustus. Terdapat beberapa perubahan dalam aplikasi SIMAS PUU setelah Penulis menyelesaikan seluruh kegiatan aktualisasi antara lain sebagai berikut:

1. Terunggahnya urgensi dan *draft* konsep awal Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada aplikasi SIMAS PUU;
2. Terpublikasikannya aplikasi SIMAS PUU dalam bentuk videografis pada seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen;
3. Tersedianya fitur tambahan pada aplikasi SIMAS PUU yaitu fitur no-reply email sebagai pemberitahuan penerimaan dan tindak lanjut masukan masyarakat yang masuk pada aplikasi SIMAS PUU;
4. Tersedianya rekomendasi tindak lanjut tanggapan masyarakat terhadap NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU;
5. Tersedianya hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMAS PUU; dan
6. Terlaksanakannya sosialisasi kegiatan aktualisasi Penulis pada Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat Penulis berikan dalam aktualisasi ini antara lain sebagai berikut:

1. Penambahan fitur baru pada aplikasi SIMAS PUU yaitu fitur “print” agar mempermudah admin SIMAS PUU dalam menyusun rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU; dan

2. Sosialisasi aplikasi SIMAS PUU berkelanjutan dari perancang undang-undang setiap melakukan kunjungan ke daerah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

**UNDANGAN RAPAT, DAFTAR HADIR DAN LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI PORGRAM AKTUALISASI PENULIS BERSAMA
DENGAN KOORDINATOR BIDANG DAN KEPALA PUSAT
PERANCANGAN UNDANG-UNDANG SEKRETARIAT JENDERAL DAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id

Nomor : 309A /PU/07/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Perihal : Undangan Rapat.

22 Juli 2019

Yth. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan kegiatan aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan II, Golongan 3, Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Acara : Rapat Awal Koordinasi Aktualisasi CPNS Tahun 2019
Tempat : Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 7 Ruang Rapat Kepala Pusat PUU
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Bapak guna memberikan arahan dan masukannya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pusat Perancangan Undang-Undang,

Fahmi Asy'ari, S.Sos.
NIP. 19680615 199003 1 007



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id

Nomor : 399 A /PU/07/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Perihal : Undangan Rapat.

22 Juli 2019

Yth. 1. Koordinator Bidang
2. Mentor CPNS
3. CPNS
di Lingkungan Pusat PUU
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan kegiatan aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan II, Golongan 3, Tahun 2019.

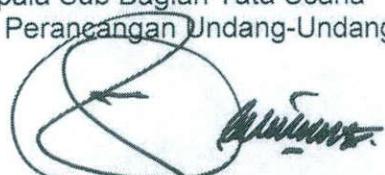
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Acara : Rapat Awal Koordinasi Aktualisasi CPNS Tahun 2019
Tempat : Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 7 Ruang Rapat Kepala Pusat PUU
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Saudara guna memberikan arahan dan masukannya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

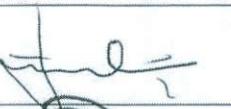
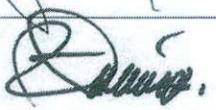
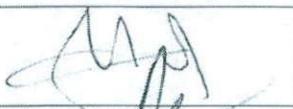
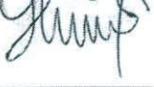
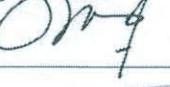
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pusat Perancangan Undang-Undang,



Fahmi Asy'ari, S.Sos.
NIP. 19680615 199003 1 007

DAFTAR HADIR
RAPAT AWAL KOORDINASI AKTUALISASI CPNS TAHUN 2019

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Gedung Setjen dan BK DPR RI, Lantai 7 Ruang Rapat
 Kepala Pusat PUU

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.	Kepala Pusat PUU	
2.	Fahmi Asy'ari, S.Sos.	Kasubag TU Pusat PUU	
3.	Mardisantori, S.Ag., LLM.	Perancang PUU Madya (Korbid Polhukam)	
4.	Akhmad Aulawi, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya (Korbid Ekuinbang)	
5.	Ricko Wahyudi, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya (Korbid Kesra dan Mentor)	
6.	Yeni Handayani, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya (Mentor)	
7.	Chairul Umam, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya (Mentor)	
8.	Nur Ghenasyarifa Albany Tanjung, S.H.	Calon Perancang PUU (CPNS)	
9.	Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.	Calon Perancang PUU (CPNS)	
10.	Della Asfarina Cahyaningrum, S.H.	Calon Perancang PUU (CPNS)	
11.	M. Gadmon Kaisar, S.H.	Calon Perancang PUU (CPNS)	
12.	Sumitra Abdi Negara, S.H	Calon Perancang PUU (CPNS)	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT RAPAT KOORDINASI PROGRAM AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II TAHUN 2019 PADA
UNIT KERJA PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Tahun Sidang	:	2019
Masa Persidangan	:	V (lima)
Triwulan	:	III (tiga)
Rapat ke	:	1 (satu)
Sifat	:	Terbuka
Jenis rapat	:	Rapat Koordinasi
Hari, tanggal	:	Selasa, 23 Juli 2019
Pukul	:	08.00 - 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Kepala Pusat PUU Lt. 7, Gedung Setjen dan BK DPR RI
Ketua Rapat	:	Ricko Wahyudi, S.H.,M.H
Hadir	:	12 orang (terlampir)
Acara	:	Pembahasan Kegiatan Aktualisasi Peserta Latsar CPNS Angkatan II Tahun 2019 pada unit kerja Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

I. PENDAHULUAN

1. Rapat pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019 dibuka pukul 08.00 WIB oleh Ricko Wahyudi, S.H., M.H, selaku ketua rapat.
2. Adapun agenda rapat adalah pembahasan kegiatan aktualisasi peserta latsar CPNS angkatan II tahun 2019 pada unit kerja Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI atas nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H memaparkan rancangan aktualisasinya yang berjudul “Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”.
- Adapun kegiatan, tahapan kegiatan dan *output* dari rancangan aktualisasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
1.	Pengunggahan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun pada Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI pada SIMAS PUU.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU, Koordinator Bidang dan Perancang Undang-Undang terkait program aktualisasi Penulis. 2. Berkoordinasi dengan Kepala Pusat PUU terkait persetujuan pengunggahan NA dan RUU di SIMAS PUU. 3. Berkoordinasi dengan Ketua Tim serta Koordinator Bidang Pusat PUU terkait pengunggahan NA dan RUU di SIMAS PUU. 4. Berkoordinasi dengan bagian Tata Usaha Pusat Perancangan Undang-Undang untuk pengajuan Penulis sebagai admin SIMAS PUU. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Rapat Koordinasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang terkait pembahasan program aktualisasi Penulis. 2. Laporan singkat hasil rapat koordinasi terkait pembahasan program aktualisasi Penulis. 3. Daftar hadir rapat koordinasi terkait pembahasan program aktualisasi Penulis. 4. Naskah Akademik dan Rancangan

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
			Undang-Undang yang diunggah di SIMAS PUU sesuai dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun.
2.	<p>Publikasi program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) dalam bentuk konten videografis yang diunggah di seluruh media sosial DPR RI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kerangka substansi konten videografis terkait program SIMAS PUU dan tutorial pemberian tanggapan pada Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang terdapat di SIMAS PUU. 2. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pusat PUU terkait penyusunan surat tugas pembuatan videografis oleh Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen Badan Keahlian DPR RI. 3. Berkoordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen terkait pembuatan konten videografis terkait SIMAS PUU. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan singkat hasil rapat koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen. 2. Daftar hadir rapat koordinasi dengan Bagian Media Sosial Biro Pemberitaan Parlemen. 3. Konten videografis terkait program SIMAS PUU dan tutorial pemberian tanggapan pada Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
			terdapat di SIMAS PUU yang telah diunggah di seluruh media sosial DPR RI.
3.	Penambahan fitur <i>no-reply email</i> pada website SIMAS PUU guna memberikan konfirmasi langsung kepada email masyarakat yang bersangkutan bahwa tanggapannya telah diterima dan akan ditindaklanjuti.	<p>1. Berkoordinasi dengan Bagian Tata Usaha Pusat PUU terkait penyusunan surat tugas terkait penambahan fitur <i>no-reply email</i> pada website SIMAS PUU yang oleh BDTI Setjen BK DPR RI.</p> <p>2. Berkoordinasi dengan BDTI terkait penambahan fitur <i>no-reply email</i> pada website SIMAS PUU yang oleh BDTI Setjen BK DPR RI.</p>	<p>1. Laporan singkat hasil rapat koordinasi dengan BDTI.</p> <p>2. Daftar hadir rapat koordinasi dengan BDTI.</p> <p>3. Adanya fitur tambahan baru pada website SIMAS PUU berupa <i>no reply-email</i> guna memberikan konfirmasi langsung kepada email masyarakat yang bersangkutan bahwa tanggapannya telah diterima dan akan ditindaklanjuti.</p>
4.	Pembuatan alur tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU yang	1. Menganalisa kondisi saat ini terkait bagaimana tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU.	Alur tindak lanjut dari Perancangan Undang-Undang terkait tanggapan masyarakat yang masuk

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
	perlu dilakukan oleh Perancang Undang-Undang.	<p>2. Berkoordinasi dengan para Perancang Undang-Undang di pusat PUU terkait tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU.</p> <p>3. Menyusun alur tindak lanjut tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU.</p>	pada SIMAS PUU.
5.	Sosialisasi program aktualisasi Penulis di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.	Berkoordinasi dengan Perancang Undang-Undang di Pusat PUU terkait beberapa perubahan dalam program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).	Laporan hasil koordinasi dengan Perancang Undang-Undang di Pusat PUU terkait beberapa perubahan dalam program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).
6.	Evaluasi pelaksanaan aktualisasi dengan pembuatan kuisioner yang ditujuan kepada stakeholder	<p>1. Penyusunan konsep kuisioner</p> <p>2. Perincian daftar stakeholder yang akan diberikan stakeholder</p> <p>3. Menghubungi stakeholder terkait pengisian kuisioner</p> <p>4. Pembuatan kuisioner melalui google form</p> <p>5. Penyebaran kuisioner kepada para stakeholder</p>	Laporan singkat hasil kuisioner terkait evaluasi pelaksanaan aktualisasi

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output
		6. Pengumpulan kuisioner 7. Pembuatan laporan singkat hasil kuisioner	
7.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi	1. Pengumpulan data baik tulisan maupun gambar mengenai hasil tiap tahapan kegiatan aktualisasi 2. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan aktualisasi	Laporan hasil pelaksanaan aktualisasi

III. KESIMPULAN

- Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum selaku kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR menyatakan dukungan dan memberikan izin kepada Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H untuk melaksanakan seluruh kegiatan dan tahapan kegiatan pelaksanaan aktualisasi yang berjudul "Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel".

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 23 Juli 2019
Ketua Rapat,



Ricko Wahyudi, S.H., M.H
NIP. 197802082002121005

LAMPIRAN II

**NOTA DINAS DARI PUSAT PUU KEPADA BDTI PERIHAL
PERMOHONAN AKSES ADMIN SIMAS PUU ATAS NAMA PENULIS**



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 402 /PU/VII/2019

Kepada Yth. : Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi
Dari : Kasub. Bag Tata Usaha Perancangan Undang Undang
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Akses

Dengan ini diberitahukan bahwa terkait dengan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo Cisarua dari tanggal 1..sd 20 dan sebagai tindak lanjut dari Rancangan Aktualisasi mengenai Optimalisasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Perundang Undangan Yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel, dengan ini kami mohon perkenan bapak dan untuk kelancaran tugas tugasnya dapat diberikan **Akses Sebagai Admin SIMAS PUU** di portal Setjen DPR RI kepada Sdri. **Esther Putri Lamaida Panjaitan NIP. 199606232019032002**

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 23 Juli 2019

Fahmi Asyari, S. Sos

NIP. 196806151990031007

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Keahlian;
2. Kepala Pusat Perancangan Undang Undang.

LAMPIRAN III

**NOTA DINAS DARI PUSAT PUU KEPADA BIRO PEMBERITAAN
PARLEMEN PERIHAL PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN
VIDEOGRAFIS APLIKASI SIMAS PUU PADA SELURUH MEDIA
SOSIAL DPR RI DAN TV PARLEMEN**



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN: www.dpr.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 415 /PU/VII/2019

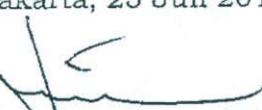
Kepada Yth. : Kepala Biro Pemberitaan Parlemen
Dari : Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Sifat : Penting
Hal : Permohonan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Legislasi, dan menindaklanjuti hasil dari Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI di Wisma Griya Sabha DPR RI Kopo Cisarua dari tanggal 1 sd 20 Juli 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Rancangan Aktualisasi Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Pertama Pusat Perancangan Undang Undang **Sdri. Esther Putri Lamaida Panjaitan NIP. 19960623 2019032002**, dengan ini kami mohon kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk :

1. Melakukan pembuatan videografis terkait tata cara pemberian masukan pada SIMAS Perancangan Undang Undang.
2. Pengunggahan videografis terkait tata cara pemberian masukan pada SIMAS Perancangan Undang Undang di TV Parlemen.
3. Pengunggahan videografis terkait tata cara pemberian masukan pada SIMAS PUU di seluruh media sosial DPR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 25 Juli 2019


Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP. 19650710 199003 1 0078

Tembusan Yth. :

1. Plt. Kepala Badan Keahlian;
2. Kabag. Televisi dan Radio Parlemen;
3. Kabag. Media Cetak dan Media Sosial.

LAMPIRAN IV

**UNDANGAN RAPAT DAN DAFTAR HADIR RAPAT KOORDINASI
DENGAN BAGIAN PROGRAM DAN PRODUKSI TELEVISI PERIHAL
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN VIDEOGRAFIS APLIKASI
SIMAS PUU PADA TV PARLEMEN**



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id

Nomor : 406 /PU/07/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Perihal : Undangan Rapat.

23 Juli 2019

Yth. 1. Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi
2. Editor Program dan Produksi Televisi
di Gedung Nusantara IV DPR RI
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI atas nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H akan mengadakan kegiatan aktualisasi yang berkaitan dengan pembuatan dan pengunggahan videografis pada TV Parlemen terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan II, Golongan 3, Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

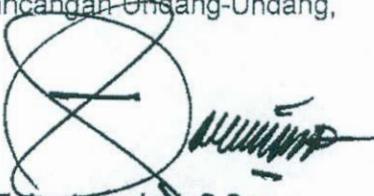
Hari, tanggal	: Rabu, 24 Juli 2019
Waktu	: Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Acara	: Rapat Koordinasi Pembuatan dan Pengunggahan Videografis SIMAS PUU pada TV Parlemen
Tempat	: Ruang Rapat Program dan Produksi Televisi, Gedung Nusantara IV DPR RI Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Saudara guna memberikan arahan dan masukannya.

Untuk kelancaran komunikasi dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H. Hp. 081289772956.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Saudara kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Pusat
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pusat Perancangan Undang-Undang,

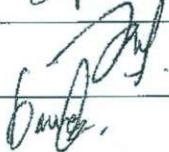

Fahmi Asy'ari, S.Sos.
NIP. 19680615 199003 1 007

Tembusan:

- Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN
VIDEOGRAFIS SIMAS PUU PADA TV PARLEMEN

Hari, Tanggal : Rabu, 24 Juli 2019
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Program dan Produksi Televisi,
Gedung Nusantara IV DPR RI

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bayu Setiadi, S.IP.	Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi	
2.	Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.	Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	
3.	Ferdiyan	Penyelia Editor	
4.	Ganda Tumanggor	Editor	

LAMPIRAN V

**LAPORAN SINGKAT RAPAT KOORDINASI DENGAN BAGIAN
PROGRAM DAN PRODUKSI TELEVISI PERIHAL PEMBUATAN DAN
PENGUNGGAHAN VIDEOGRAFIS APLIKASI SIMAS PUU PADA TV
PARLEMEN**



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN PEMBUATAN
DAN PENGUNGGAHAN VIDEOGRAFIS SIMAS PUU PADA TV PARLEMEN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN AKTUALISASI PESERTA
LATSAR CPNS ANGKATAN II TAHUN 2019**

Tahun Sidang : 2019
Masa Persidangan : V (lima)
Triwulan : III (tiga)
Rapat ke : 1 (satu)
Sifat : Terbuka
Jenis rapat : Rapat Koordinasi
Hari, tanggal : Rabu, 24 Juli 2019
Pukul : 08.00 - 10.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Program dan Produksi Televisi, Gedung Nusantara IV DPR RI
Ketua Rapat : Bayu Setiadi, S.IP.
Hadir : 4 orang (terlampir)
Acara : Pembahasan Pembuatan dan Pengunggahan Videografis SIMAS PUU pada TV Parlemen dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Peserta Latsar CPNS Angkatan II Tahun 2019

I. PENDAHULUAN

1. Rapat pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2019 dibuka pukul 08.00 WIB oleh Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi, Bayu Setiadi, S.IP, selaku ketua rapat.
2. Adapun agenda rapat adalah Pembahasan Pembuatan dan Pengunggahan Videografis SIMAS PUU pada TV Parlemen dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi Peserta Latsar CPNS Angkatan II Tahun 2019 atas nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H memaparkan maksud dan tujuan diselenggarakannya rapat koordinasi dengan bagian Program

SIMAS PUU pada TV Parlemen dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktualisasi peserta Latsar CPNS angkatan II tahun 2019.

- Bapak Bayu Setiadi, S.IP menyampaikan hal-hal yang perlu dilakukan sehubungan dengan tindak lanjut rapat koordinasi sebagai berikut:

1. Pembuatan konsep videografis oleh Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H diserahkan paling lambat Kamis, 25 Juli 2019.
2. Pembuatan videografis akan dikerjakan oleh Sdr. Ferdiyan selaku Penyelia Editor dan Ganda Tumanggor selaku Editor.
3. Video akan menggunakan pengisi suara (voice over) oleh Sdri. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H yang naskah videografisnya dibuat dan diserahkan oleh Sdri. Esther paling lambat Kamis, 25 Juli 2019.
4. Perekaman suara (voice over) untuk keperluan videografis dilakukan pada hari Kamis, 25 Juli 2019.

III. KESIMPULAN

Bagian Program dan Produksi Televisi menyatakan dukungan dan siap membantu pelaksanaan aktualisasi peserta latsar CPNS angkatan II tahun 2019 atas nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 24 Juli 2019
Ketua Rapat,



Bayu Setiadi, S.IP.
NIP. 197903262005021002

LAMPIRAN VI

NASKAH VOICE OVER VIDEOGRAFIS APLIKASI SIMAS PUU

Naskah Video SIMAS PUU

Naskah	Keterangan
<p>Mari Berpartisipasi dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang!</p> <p>Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU.</p> <p>Bagaimana caranya? Yuk simak sampai akhir!</p>	Animasi
<p>Pertama silahkan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian klik menu aplikasi SIMAS PUU lalu pilih Naskah Akademik atau RUU.</p>	Web Pusat PUU SIMAS PUU Naskah Akademik + RUU
<p>Setelah muncul daftar NA atau RUU, silahkan klik kolom "detail", kemudian isi data diri Anda pada kolom kuisioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia.</p>	Detail Data diri Pertanyaan + Jawaban
<p>Kemudian Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda.</p>	Upload Dokumen
<p>Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam Perancangan Undang-Undang!</p>	#Tagline

LAMPIRAN VII

**UNDANGAN RAPAT, DAFTAR HADIR DAN LAPORAN SINGKAT
RAPAT AKTUALISASI PENULIS DENGAN BDTI TERKAIT
PENAMBAHAN FITUR NO-REPLY EMAIL PADA
APLIKASI SIMAS PUU**

83



Airlangga BDTI



Hari ini mas airlangga bisa pukul berapa?
Di ruang rapat diklat gapapa Mas?

07.52 ✓

kalo pagi2 ini bisa gak? jam 8.30

07.54

biar cepet saya juga kemungkinan mau
pulang cepet

07.55

kalo iya kita ketemu di diklat

07.56

Baik mas saya infokan dulu ke temen2

07.59 ✓

Kalau nota dinasnya menyusul gapapa
mas? Pak rus blm dtg kebetulan

07.59 ✓

gak apa2, yg penting ditanyakan ke
diklat dulu boleh langsung rapat
dadakan gak

08.00

Udh diinfokan, gapapa kok Mas Angga

08.02 ✓

ok

08.03

Mas Angga 8.30 di pusdiklat yaaa

08.1

Ok

08.18

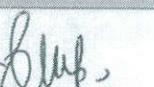
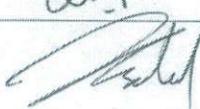
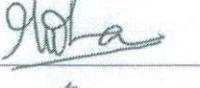


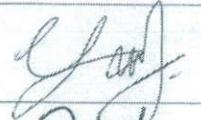
**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

**Daftar Hadir Peserta
Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI**

Hari, tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
Waktu : Pukul 08.30 – 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pusdiklat

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Esther Putri Lasmaida Panjaitan	Pusat Perancangan Undang-Undang	1. 
2.	Hesekiel Marudut Morsa	Inspektorat 1	2. 
3.	Dandy Adrian Azkara	Pusat Penelitian	3. 
4.	Tasya Armani Putri	Tu Pusat PUU	4. 
5.	Yudi Prawira	BKSAP	5. 
6.	Nalia Anasiya	Bagian Kepegawaian	6. 
7.	Ridha Khoirunnisa	Bagian Pengaduan Masyarakat	7. 
8.	Muhammad Iranda	Bagian Sekretariat Komisi III	8. 
9.	Refaini Hasna Ghassani	Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	9. 
10.	Anisa Rahmasari	Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU	10. 
11.	Burhanudin M faturahman	Pusat Penelitian	11. 
12.	Destya Andini	Sekretariat Komisi V	12. 

No	Nama	Unit Kerja	Tanda Tangan
13.	Faisal Riyadi	Inspektorat II	13. 
14.	Yusuf Satrio Pambudi	Unit Layanan Pengadaan	14. 
15.	Rhesa Ardiansyah	Bidang Pelaksanaan Diklat	15. 

LAPORAN SINGKAT

RAPAT PEMBUATAN APLIKASI BERSAMA BDTI

Tahun sidang	:	2018 – 2019
Jenis Rapat	:	Rapat Koordinasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Selasa, 27 Juli 2019
Pukul	:	08.30 – 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Pusdiklat Gedung Sekretariat Jenderal lantai 4
Acara	:	Pembahasan Pembuatan Aplikasi Bagi Proyek Aktualisasi CPNS
Ketua Rapat	:	Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
Hadir	:	<u>BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI</u> 1. Airlangga Eka Wardhana, S.Kom., M.T.I. 2. Muhammad Sasmito Adi Wibowo, A.Md. 3. Daniel Tri Widiatmoko, A.Md

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.
 2. Tasya Armani Putri, S.I.A
 3. Ridha Khoirunnisa, S.I.P.
 4. Dandy Adrian Azkara, S. E.
 5. Yudi Prawira
 6. Faisal Riyadi, S.E.
 7. Refaini Hasna Ghassani, S. H.
 8. Anisa Rahmasari, S. H.
 9. Hesekiel Marudut Morsa, S.E.
 10. Yusuf Satrio Pambudi, S.E.
 11. Rhesa Ardiansyah, S.Pd
 12. Muhammad Iranda, S.M.
 13. Destya Andini, S.E.

I. PEMBUKAAN

1. Kepala Evaluasi Diklat, Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si, selaku Ketua Rapat membuka rapat pada pukul 08.30 WIB.

II. PEMBAHASAN

1. Rapat dilaksanakan dalam rangka pembuatan aplikasi untuk proyek aktualisasi CPNS 2019.
2. Masing-masing peserta mengutarakan kepentingannya kepada BDTI dan kemudian dilakukan pendataan sesuai kebutuhan masing-masing untuk ditidak lanjuti.

III. KESIMPULAN

1. BDTI menyatakan dukungan dan siap membantu pembuatan aplikasi untuk proyek aktualisasi CPNS 2019.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat.

KETUA RAPAT,



Heny Widyaningsih, S.Psi., M.Si
NIP. 197212031998032003

LAMPIRAN VIII

TEMPLATE ISI NO-REPLY EMAIL PADA APLIKASI SIMAS PUU

Nama	Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H
NIP	19960623 201903 2 002
Judul Aktualisasi	Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel
Nama Proyek Aktualisasi	Penambahan fitur <i>Auto Reply Email</i> ke Pemberi Masukan di SIMAS PUU
Input	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Template auto reply email</i> ke pemberi masukan bahwa masukan telah diterima 2. <i>Template auto reply email</i> ke pemberi masukan bahwa masukan telah ditindaklanjuti
Proses	Membuat template <i>auto reply email</i> yang akan dikirimkan ke email pemberi masukan di SIMAS PUU
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Template <i>auto reply email</i> ke pemberi masukan bahwa masukan telah diterima <p><u>Naskah Akademik</u></p> <p><i>Subject:</i> Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam SIMAS PUU</p> <p><i>Body Email:</i> Terima kasih telah berpartisipasi memberikan pendapat Anda dalam Naskah Akademik Undang-Undang [...]. Masukan dengan keterangan sebagai berikut:</p> <p>Nama: [...] Pekerjaan: [...] No HP: [...] Status: Dalam Proses Moderasi</p> <p>Telah diterima dan akan ditindaklanjuti.</p> <p>Hormat Kami,</p> <p>Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706</p>

Rancangan Undang-Undang

Subject:

Pemberitahuan Penerimaan Masukan dalam SIMAS PUU

Body email:

Terima kasih telah berpartisipasi memberikan pendapat Anda dalam Rancangan Undang-Undang [...]. Masukan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama: [...]

Pekerjaan: [...]

No HP: [...]

Status: Dalam Proses Moderasi

Telah diterima dan akan ditindaklanjuti.

Hormat Kami,

Pusat Perancangan Undang-Undang

Badan Keahlian DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7,

Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.

Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706

2. *Template auto reply email* ke pemberi masukan bahwa masukan telah ditindaklanjuti

Naskah Akademik

Subject:

Pemberitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam SIMAS PUU

Body Email:

Terima kasih telah berpartisipasi memberikan pendapat Anda dalam Naskah Akademik Undang-Undang [...]. Masukan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama: [...]

Pekerjaan: [...]

No HP: [...]

Telah ditindaklanjuti dengan catatan sebagai

berikut: [...]

Hormat Kami,

**Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI Lantai 7,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706**

Rancangan Undang-Undang

Subject:

Pemberitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam
SIMAS PUU

Body email:

Terima kasih telah berpartisipasi memberikan
pendapat Anda dalam Rancangan Undang-
Undang [...]. Masukan dengan keterangan
sebagai berikut:

Nama: [...]

Pekerjaan: [...]

No HP: [...]

Telah ditindaklanjuti dengan catatan sebagai
berikut: [...]

Hormat Kami,

**Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian DPR RI Lantai 7,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta
Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706**

LAMPIRAN IX

**BUKU PANDUAN APLIKASI SIMAS PUU (NOTIFIKASI AUTO REPLY
EMAIL APLIKASI SIMAS PUU)**



Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian
DPR RI

Buku Panduan

APLIKASI SIMAS PU

(Notifikasi Auto-Reply Email Aplikasi SIMAS PU)

Disusun oleh:

- 1. Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H
(Pusat Perancangan Undang-Undang)**
- 2. Daniel Tri Widyatmoko, A.Md
(Bidang Data dan Teknologi Informasi)**

Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI

2019

DAFTAR ISI

1. MASUK (LOG IN) KE PORTAL.....	3
2. MASUK (LOG IN) KE APLIKASI PUSAT PUU.....	3
3. NOTIFIKASI AUTO - <i>REPLY EMAIL</i> KETIKA MASYARAKAT MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK DAN/ATAU RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA APLIKASI SIMAS PUU.....	4
4. NOTIFIKASI AUTO - <i>REPLY EMAIL</i> FEEDBACK DARI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MASUKAN MASYARAKAT PADA APLIKASI SIMAS PUU.....	5

1. MASUK (LOG IN) KE PORTAL

Sebelum masuk ke Aplikasi Pusat PUU kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam Portal Setjen DPR RI. Portal berfungsi sebagai pintu masuk tunggal aplikasi-aplikasi yang ada di lingkungan Setjen DPR RI.

Dengan adanya Portal, kita hanya perlu mengingat satu nama pengguna dan satu password untuk mengakses email DPR dan semua aplikasi yang diijinkan.

Gunakan versi terbaru dari program penjelajah internet, kami merekomendasikan Mozilla Firefox dan Google Chrome.

Buka alamat <http://portal.dpr.go.id/>

Isi kolom Pengguna dan Password lalu klik tombol

MASUK

Bila berhasil, Nama Lengkap dan Peran Anda akan tertera di kotak pada pojok kiri atas.



2. MASUK (LOG IN) KE APLIKASI PUSAT PUU



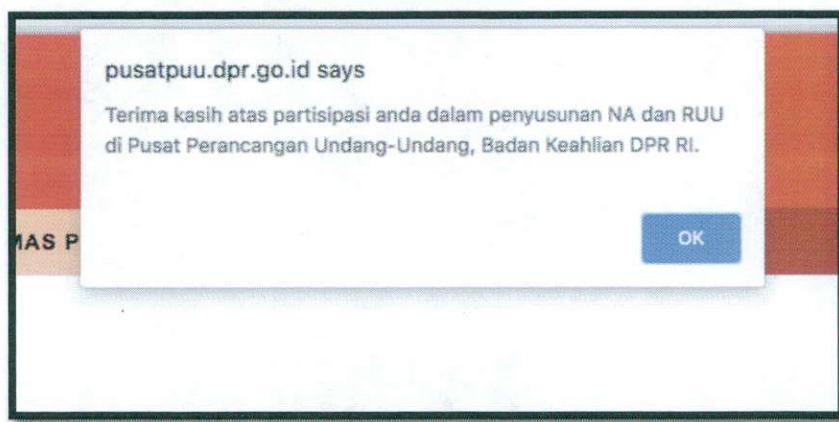
Pada halaman utama Portal akan ditampilkan aplikasi-aplikasi yang dapat Anda Akses.

Klik pada logo Aplikasi Pusat PUU

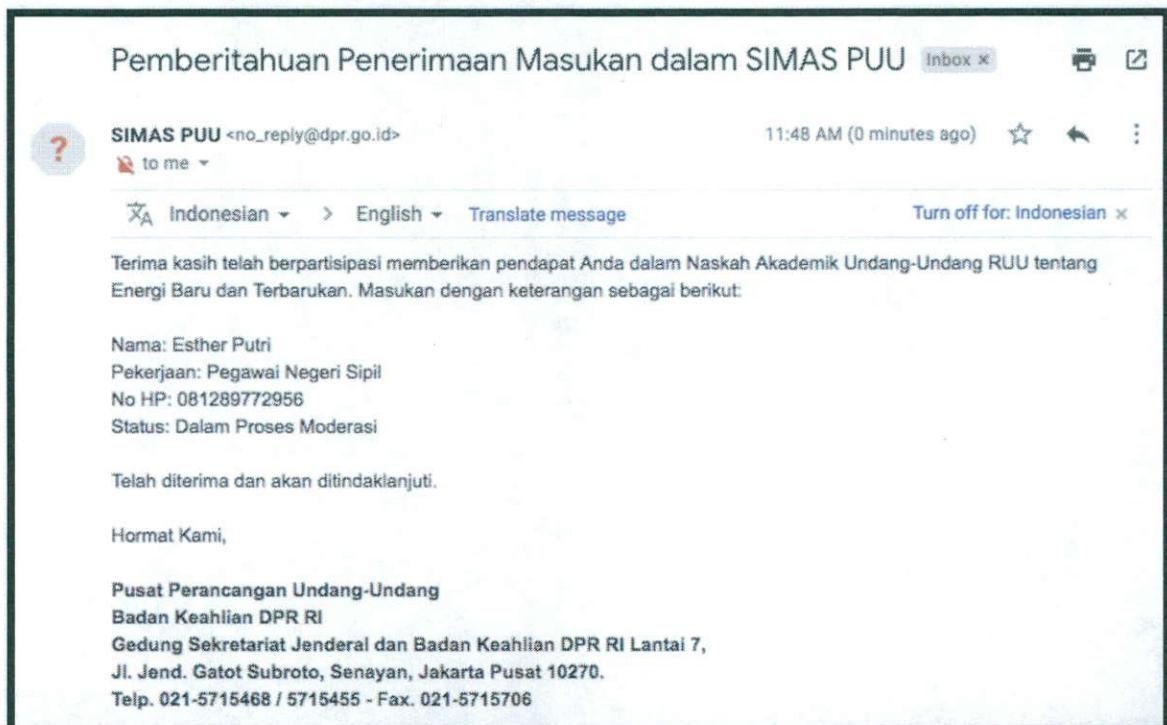
Bila berhasil maka halaman depan Aplikasi Pusat PUU akan ditampilkan dan logo Portal Setjen DPR akan berganti menjadi logo **Pusat PUU Admin**.

3. NOTIFIKASI AUTO - REPLY EMAIL KETIKA MASYARAKAT MEMBERIKAN MASUKAN TERHADAP NASKAH AKADEMIK DAN/ATAU RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA APLIKASI SIMAS PUU

Ketika masyarakat telah memberikan masukan pada aplikasi SIMAS PUU, akan muncul *pop - up notification* seperti berikut:



Selanjutnya pada email pengisi kuesioner akan secara otomatis terkirim email balasan notifikasi *auto-reply* dari sistem.



Setelah itu admin akan melakukan moderasi terhadap tanggapan yang masuk ke dalam aplikasi SIMAS PUU.

4. NOTIFIKASI AUTO - REPLY EMAIL FEEDBACK DARI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG TERHADAP MASUKAN MASYARAKAT PADA APLIKASI SIMAS PUU

Setelah masyarakat memberikan tanggapan terhadap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Undang – Undang pada aplikasi SIMAS PUU, tanggapan tersebut akan terekam dalam aplikasi PUSATPUU (admin).

PusatPUU Admin

Pengguna: Esther Putri
Lasmaida Panjaitan
Peran: admin

- [Daftar Tim](#)
- [Daftar Pegawai](#)
- [Daftar Penulis Eksternal](#)
- [Daftar Agenda](#)
- [Daftar Album Foto](#)
- [Daftar Kontak](#)
- [Daftar Konten Statis](#)
- [Daftar Video](#)

- [Produk Ilmiah](#)
- [Naskah Akademik](#)
- [RUU](#)
- [Jurnal Prodigy](#)
- [Proceeding](#)
- [Pedoman Kerja](#)
- [Buku](#)

- [Simas PUU](#)
- [Pekerjaan](#)
- [Pendidikan Terakhir](#)
- [Indikator](#)
- [Database Mitra](#)
- [Kelompok Lobi](#)
- [Pertanyaan](#)
- [Responden](#)
- [Penyusunan](#)

Edit Penyusunan

[Back to Daftar Penyusunan](#)

[Log Out](#)
[Portal](#)

Administrasi

Tanggal:

Judul RUU:

Tahapan:

Deskripsi:

Contact Person:

File:

File Kuesioner:

Status Posting:

Kuesioner **Susunan Tim**

Page:	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Nama:	<input type="text" value="Esther Putri"/>	Usia:	<input type="text" value="24"/>	Pekerjaan:	<input type="text" value="Pegawai Negeri Sipil"/>	Pendidikan Terakhir:	<input type="text" value="Sarjana"/>	Email:	<input type="text" value="esthrput@gmail.com"/>	Telepon:	<input type="text" value="081289772956"/>	Status Posting:	<input type="text" value="Draft"/>	<input type="button" value="EDIT DELETE"/>								

Klik **EDIT** untuk melihat tanggapan masyarakat tersebut.

Setelah muncul tanggapan masyarakat pada Naskah Akademik dan/atau Rancangan Undang-Undang tersebut, apabila tanggapannya diakomodir, silahkan klik **STATUS AKOMODIR** dan ubah menjadi **DIAKOMODIR** lalu berikan keterangan pada kolom **KETERANGAN AKOMODIR** kemudian klik tombol **SIMPAN**.

PusatPUU Admin

Pengguna: Esther Putri
Lasmaida Panjaitan
Peran: admin

Edit Pertanyaan

Back to Daftar Pertanyaan

Administrasi

- Daftar Tim
- Daftar Pegawai
- Daftar Penulis Eksternal
- Daftar Agenda
- Daftar Album Foto
- Daftar Kontak
- Daftar Konten Statis
- Daftar Video

Produk Ilmiah

- Naskah Akademik
- RUU
- Jurnal Prodigy
- Proceeding
- Pedoman Kerja
- Buku

Simas PUU

Tahapan : Konsep Awal NA
No. Urut : 1
Pertanyaan : Apakah ada saran dan masukan mengenai latar belakang yang diuraikan dalam Bab I Naskah Akademik?
Jawaban : [...]

Status Akomodir : Diakomodir
Keterangan Akomodir : Sangat relevan

SIMPAN **Kembali**

Kemudian ubah kolom **STATUS POSTING** menjadi **PUBLISHED** pada bagian atas kuisioner lalu klik tombol **SIMPAN** seperti berikut:

PusatPUU Admin

Pengguna: Esther Putri
Lasmaida Panjaitan
Peran: admin

Edit Kuesioner

Back to Edit Penyusunan

Administrasi

- Daftar Tim
- Daftar Pegawai
- Daftar Penulis Eksternal
- Daftar Agenda
- Daftar Album Foto
- Daftar Kontak
- Daftar Konten Statis
- Daftar Video

Produk Ilmiah

- Naskah Akademik

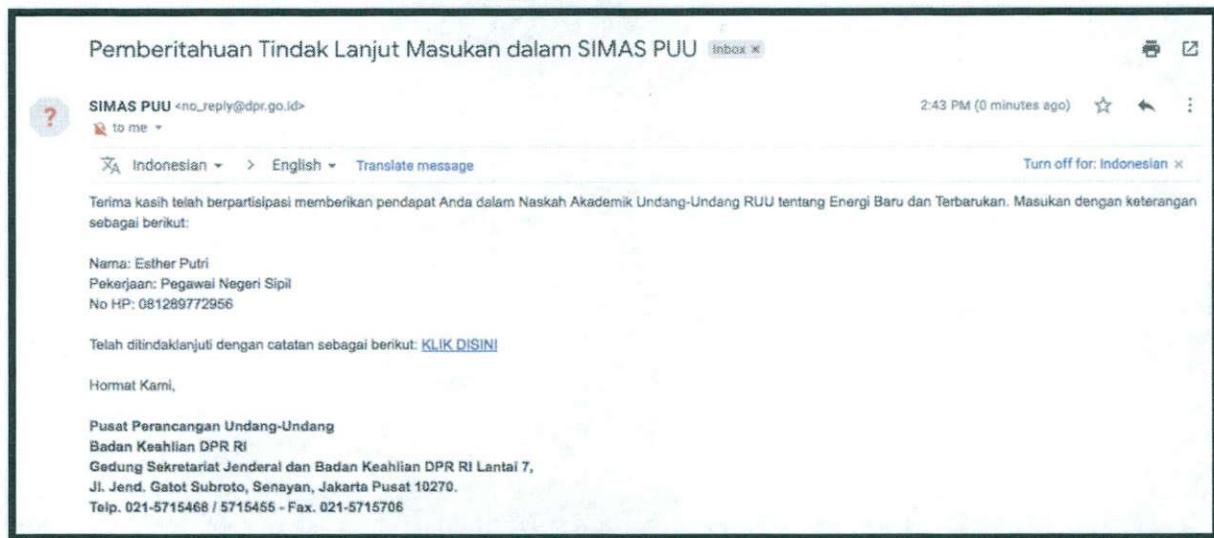
Nama Responden : Esther Putri
Usia : 24
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : Sarjana
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Email : esthrput@gmail.com
Telepon : 081289772956

Upload File ... Pilih Status Posting ... (.pdf, max 128 MB)

Status Posting ✓ Draft **Published**

SIMPAN **Kembali**

Setelah mengubah status posting menjadi *published*, secara otomatis akan terkirim *auto reply-email* kepada responden seperti berikut:



Pemberitahuan Tindak Lanjut Masukan dalam SIMAS PUU [Inbox](#)

SIMAS PUU <no_reply@dpr.go.id> 2:43 PM (0 minutes ago)

[to me](#) Turn off for: Indonesian

Indonesian English [Translate message](#)

Terima kasih telah berpartisipasi memberikan pendapat Anda dalam Naskah Akademik Undang-Undang RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Masukan dengan keterangan sebagai berikut:

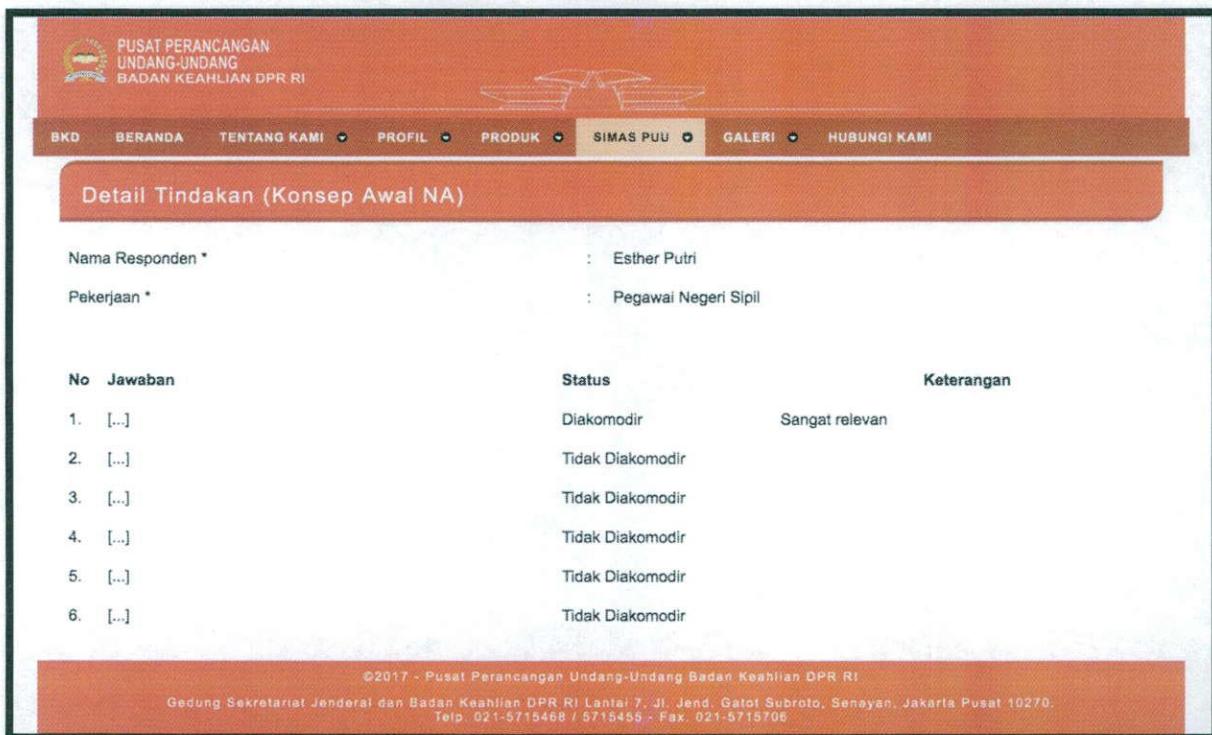
Nama: Esther Putri
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil
No HP: 081289772956

Telah ditindaklanjuti dengan catatan sebagai berikut: [KLIK DISINI](#)

Hormat Kami,

Pusat Perancangan Undang-Undang
Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706

Selain notifikasi *auto - reply email* langsung kepada email responden, responden juga dapat melihat status tanggapannya pada website SIMAS PUU.



PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG
BAND KEAHLIAN DPR RI

BERANDA TENTANG KAMI PROFIL PRODUK SIMAS PUU GALERI HUBUNGI KAMI

Detail Tindakan (Konsep Awal NA)

No	Jawaban	Status	Keterangan
1.	[...]	Diakomodir	Sangat relevan
2.	[...]	Tidak Diakomodir	
3.	[...]	Tidak Diakomodir	
4.	[...]	Tidak Diakomodir	
5.	[...]	Tidak Diakomodir	
6.	[...]	Tidak Diakomodir	

©2017 - Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270.
Telp. 021-5715468 / 5715455 - Fax. 021-5715706

LAMPIRAN X

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP NA DAN RUU PADA APLIKASI SIMAS PUU



REKOMENDASI

**TINDAK LANJUT TANGGAPAN
MASYARAKAT TERHADAP NASKAH
AKADEMIK DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PADA APLIKASI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
(SIMAS PUU)**

DISUSUN OLEH:

**ESTHER PUTRI LASMAIDA PANJAITAN, S.H
NIP. 199606232019032002**

REKOMENDASI

TINDAK LANJUT TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA APLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERANCANGAN UNDANG- UNDANG (SIMAS PUU)

Berdasarkan hasil pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan dengan isu *“Belum optimalnya pelaksanaan aplikasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU)”*, salah satu *output* dari kegiatan aktualisasi ini berbentuk rekomendasi kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang yaitu sebagai berikut:

1. Adanya penunjukan kepada 1 (satu) orang atau lebih dalam setiap susunan tim penyusun Naskah Akademik (“NA”) dan Rancangan Undang-Undang (“RUU”) sebagai **Admin** aplikasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (“**SIMAS PUU**”) yang bertugas untuk:
 - a. mengunggah dokumen NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU yang telah diberikan tanggal *draft* NA dan RUU tersebut pada bagian atas dokumen (*header*) dan *watermark* Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI dengan contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran I;
 - b. memantau tanggapan masyarakat terhadap NA dan RUU yang masuk pada aplikasi SIMAS PUU;
 - c. berkoordinasi dengan tim penyusun NA dan RUU terkait hasil pantauan tanggapan masyarakat masuk pada aplikasi SIMAS PUU;
 - d. menindaklanjuti hasil pertimbangan tim penyusun NA dan RUU terhadap tanggapan masyarakat yang masuk pada SIMAS PUU dengan memberikan *feedback* melalui aplikasi

- Admin SIMAS PUU dengan keterangan lebih lanjut sebagaimana terlampir dalam Lampiran II; dan*
- e. menyusun rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap NA dan RUU tersebut pada aplikasi SIMAS PUU dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.

Catatan huruf e: *Agar lebih efisien, sebaiknya ditambahkan fitur baru pada aplikasi Admin SIMAS PUU yaitu fitur “print” sehingga Perancang tidak perlu menyusun secara manual rekapitulasi tanggapan masyarakat terhadap NA dan RUU pada aplikasi SIMAS PUU (perlu koordinasi dengan BDTI).*

2. Melakukan sosialisasi aplikasi SIMAS PUU secara berkala pada seluruh media sosial DPR RI dan TV Parlemen.

Pada dasarnya tindak lanjut terhadap rekomendasi ini diserahkan kembali kepada wewenang Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi salah satu referensi dalam pengambilan kebijakan di Pusat Perancangan Undang-Undang terkait dengan pelaksanaan aplikasi SIMAS PUU.

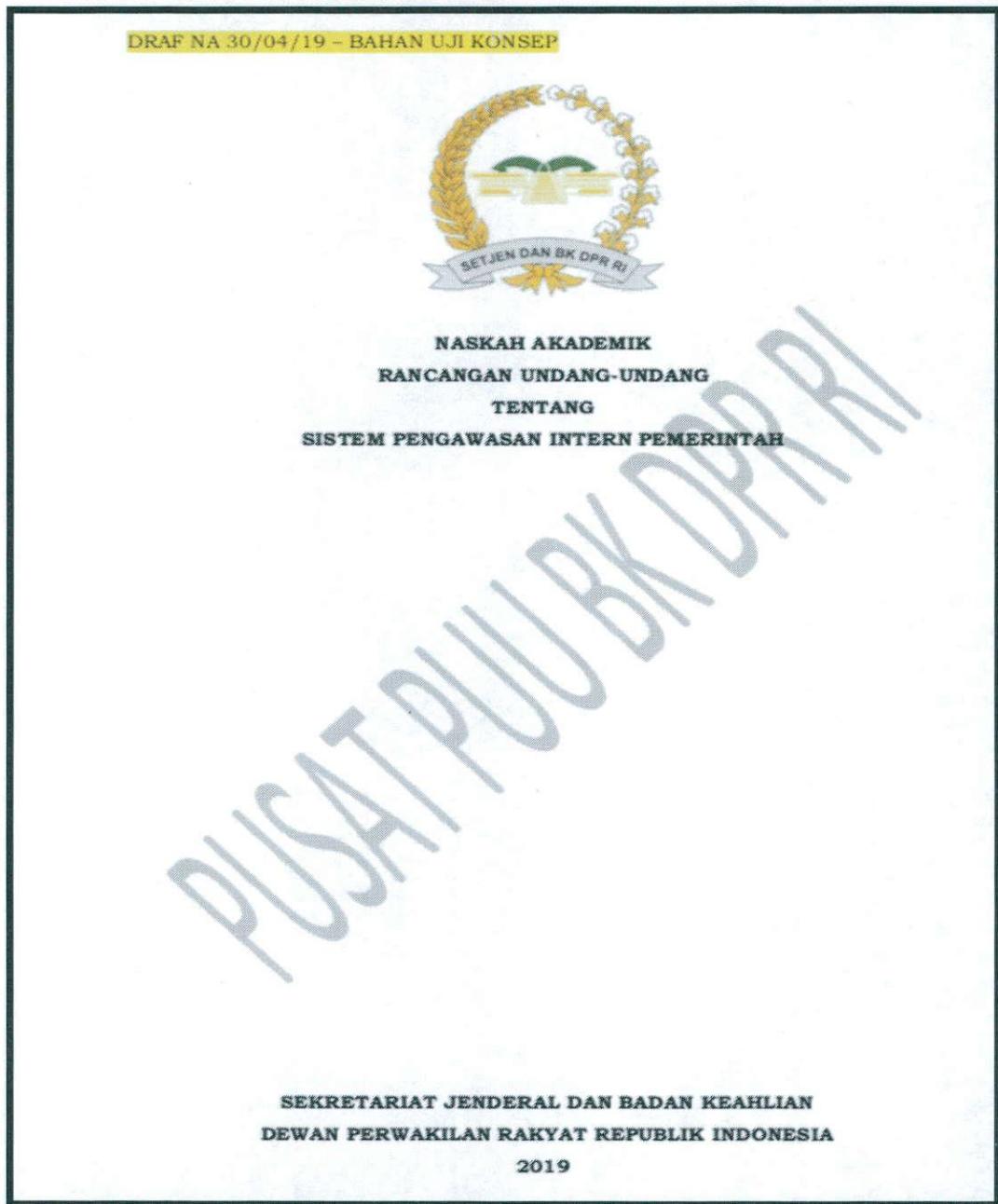
Jakarta, Agustus 2019

Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H
NIP. 199606232019032002

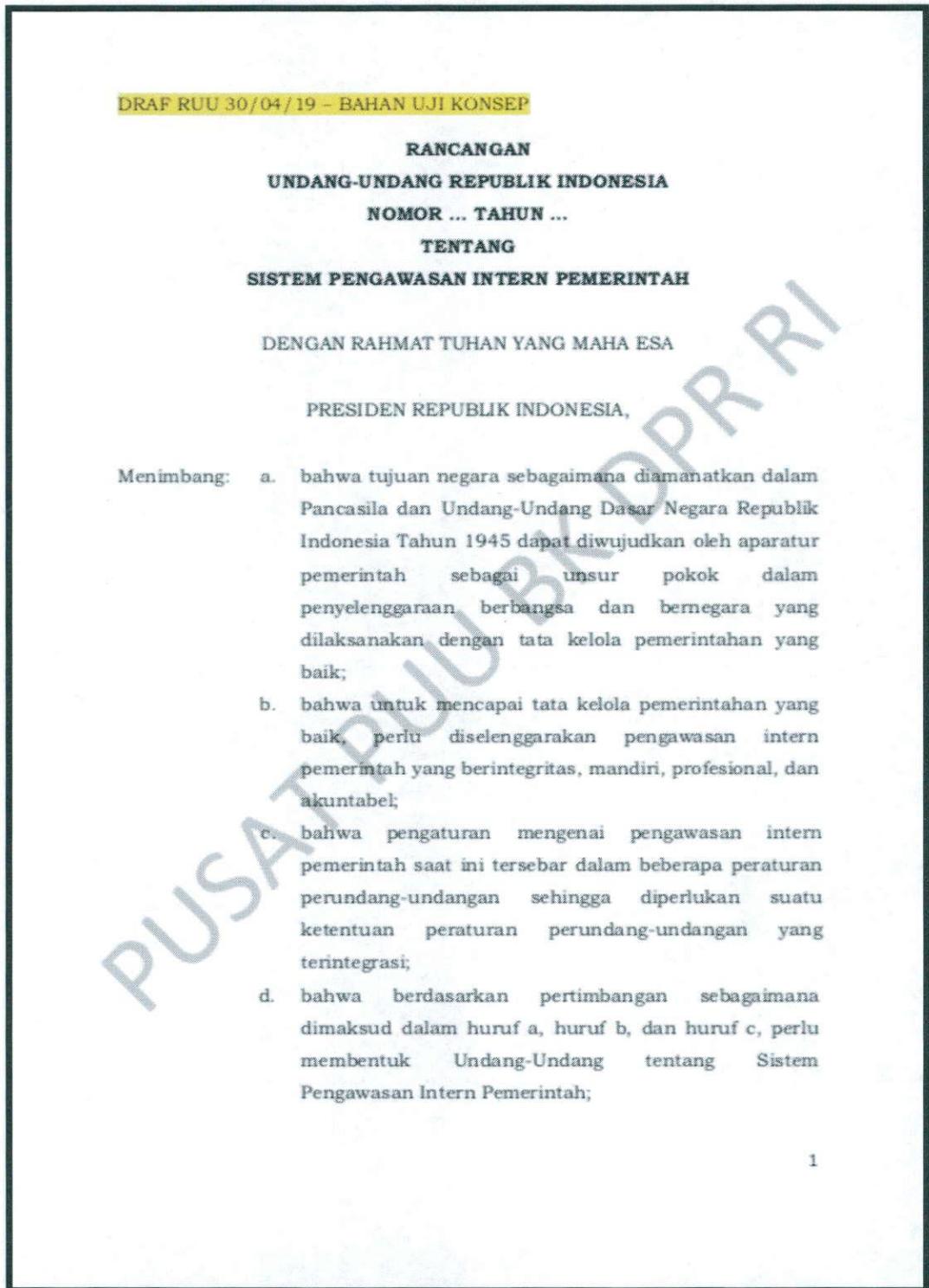
Lampiran I

Contoh Pemberian Tanggal dan *Watermark* Pada *Draft* Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Yang Akan Diunggah Pada Aplikasi SIMAS PUU

Gambar I. Contoh Pemberian Tanggal dan *Watermark* pada *Draft* Naskah Akademik Yang Akan Diunggah Pada Aplikasi SIMAS PUU



Gambar II. Contoh Pemberian Tanggal dan Watermark pada *Draft Rancangan Undang-Undang (RUU)* Yang Akan Diunggah Pada Aplikasi SIMAS PUU



Lampiran II

Pemberian Feedback Kepada Masyarakat Yang Telah Memberikan Tanggapan Pada Aplikasi SIMAS PUU Melalui Admin SIMAS PUU

Edit Penyusunan
[Back to Daftar Penyusunan](#)

Tanggal: 30-08-2017 *

Judul RUU: RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor *

Tahapan: Konsep Awal RUU *

Deskripsi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang tentang Kepolisian) telah didasarkan pada paradigma baru yang menjadikan Polri berorientasi sipil (Civilian Police), namun faktya Polri belum sepenuhnya mampu mewujudkan diri sebagai *

Contact Person: Tim Penyusun NA dan RUU Bidang Polhukham

File: na-14.pdf (740,03 KB) [Delete]

File Kuesioner: No file selected. (.pdf, max 2 MB)

Status Posting: Published *

Keterangan:

Di bagian bawah data akan ditampilkan data koresponden / masyarakat yang telah memberikan masukan melalui Aplikasi SIMAS PUU pada Website Pusat PUU. Klik **EDIT** untuk melihat daftar pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan.

Kuesioner								Susunan Tim
Page: 1								1 - 1 / 1 (1)
Nama	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Email	Telepon	Status Posting		
JEREMY	31	Karyawan Swasta	Doktor	purpleholbox@gmail.com	628111336331	Draft	EDIT DELETE	

Page: 1 1 - 5 / 5 (5) 20

Tahapan	No.	Pertanyaan	Jawaban	Status Akomodir	Keterangan Akomodir	
Konsep Awal RUU	1.	Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?	b. Bawa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, diperlukan penguatan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai UU nasional dan hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi	X		EDIT

Keterangan:

Klik **EDIT** untuk memberikan komentar/ tanggapan terhadap masukan tersebut apakah dapat diakomodir atau tidak.

Setelah selesai jangan lupa klik tombol **Simpan**.

Edit Pertanyaan
Back to Daftar Pertanyaan

Tahapan : Konsep Awal RUU

No. Urut : 1 *

Pertanyaan : Apakah ada saran dan masukan mengenai konsiderans menimbang dalam RUU ini?

Jawaban : b. Bawa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara, diperlukan penguatan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai UU nasional dan hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi

Status Akomodir : Tidak Diakomodir

Keterangan Akomodir :

Simpan **Kembali**

LAMPIRAN III

FORMAT REKAPITULASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP NA DAN RUU PADA APLIKASI SIMAS PUU

(JUDUL) REKAPITULASI TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP NASKAH AKADEMIK RUU [...] / RUU [...] PADA APLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (SIMAS PUU)

Identitas Responden

Nama:

Pekerjaan:

Usia:

Email:

No Telepon:

No.	Tahapan	Pertanyaan	Jawaban	Status Akomodir	Keterangan Akomodir
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

LAMPIRAN XI

**DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER EVALUASI
APLIKASI SIMAS PUU**

Kuisisioner Evaluasi Aplikasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU)

Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) merupakan aplikasi berbasis website di mana masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya berupa tulisan terkait dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang di susun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kuisisioner ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan masyarakat terkait dengan aplikasi SIMAS PUU, kemudian untuk memberikan gambaran bagaimana pendapat masyarakat terkait aplikasi SIMAS PUU yang sudah ada dan saran untuk aplikasi SIMAS PUU ke depan. Terima kasih atas partisipasi Anda!

Tentang SIMAS PUU

SIMAS PUU

SIMAS PUU atau Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-undang mewujudkan pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan, akuntabel, berintegrasi, efisien dan efektif melalui beberapa instrumen :

1. Penyusunan database stakeholder yang meliputi data kepakaran, ketekunan, lembaga kemasyarakatan umum, atau yang terdaftar serta mitra strategis yang telah melakukan MOU dengan Badan Keahlian DPR RI.
2. Menginformasikan kepada publik rencana penyusunan Naskah Akademik dan draft RUU di Badan Keahlian DPR RI.
3. Menyampaikan masukan masyarakat secara tersistematis dan terstruktur terhadap Naskah Akademik dan RUU yang sedang disiapkan.
4. Pengolahan masukan masyarakat secara transparan, akuntabel, efisien serta berintegritas.
5. Menyampaikan atau menginformasikan kepada masyarakat hasil dari pengolahan masukan serta tindak lanjutnya.

Videografi SIMAS PUU!



Terima kasih dan Selamat Berpartisipasi dalam SIMAS PUU!

1. Pekerjaan

Mark only one oval.

Mahasiswa

Dosen

Peneliti

Penegak Hukum

ASN

Karyawan Swasta

Other: _____

2. Usia

3. 1. Apakah Anda pernah menyampaikan aspirasi terkait dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI?

Mark only one oval.

Pernah

Tidak pernah

4. 2. Jika pernah, media apa yang Anda gunakan untuk menyampaikan aspirasi Anda?

Tidak perlu diisi, jika jawaban Anda pada pertanyaan No. 1 tidak pernah

5. 3. Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat aplikasi SIMAS PUU sebagai aplikasi berbasis website untuk menjaring masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI?

Mark only one oval.

Ya, saya mengetahui

Tidak mengetahui

Silahkan simak videografi aplikasi Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) berikut ini!



<http://youtube.com/watch?v=DXbLcoTOvHI>

6. 4. Jika iya, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut?

Tidak perlu diisi, jika jawaban Anda pada pertanyaan No. 3 tidak mengetahui

Mark only one oval.

Media Sosial DPR RI

Website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

Informasi dari rekan

Other: _____

7. 5. Apakah Anda pernah memberikan masukan terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU?

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang Anda ketahui tentang substansi pengaturan RUU ini?	
2.	Apakah permasalahan yang terjadi di masyarakat dan kebutuhan masyarakat terkait pengaturan RUU ini?	
3.	Teori dan asas/prinsip apa sajakah yang sesuai dan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kajian awal mengenai pengaturan RUU ini?	
4.	Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang penting untuk dikaji, dianalisis, dan dievaluasi terkait dengan muatan yang diatur dalam RUU ini?	
5.	Apakah yang dapat menjadi dasar pemikiran (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dalam penyusunan kajian awal pengaturan RUU ini?	
6.	Bagaimana pendapat Anda jika ada pengaturan mengenai RUU ini dalam bentuk undang-undang? Apa saja yang sebaiknya diatur?	

Upload Dokumen

Choose File No file chosen

[Submit](#) [Cancel](#)

Mark only one oval.

- Pernah
 Tidak pernah

8. 6. Setelah menonton videografis pengenalan aplikasi SIMAS PUU pada pertanyaan No. 3, menurut Anda, apakah SIMAS PUU mempermudah masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI?

Mark only one oval.

- Ya
 Tidak

9. 7. Silahkan berikan kritik terhadap aplikasi SIMAS PUU saat ini dan saran untuk aplikasi SIMAS PUU ke depan!

LAMPIRAN XII

HASIL KUISIONER EVALUASI APLIKASI SIMAS PUU



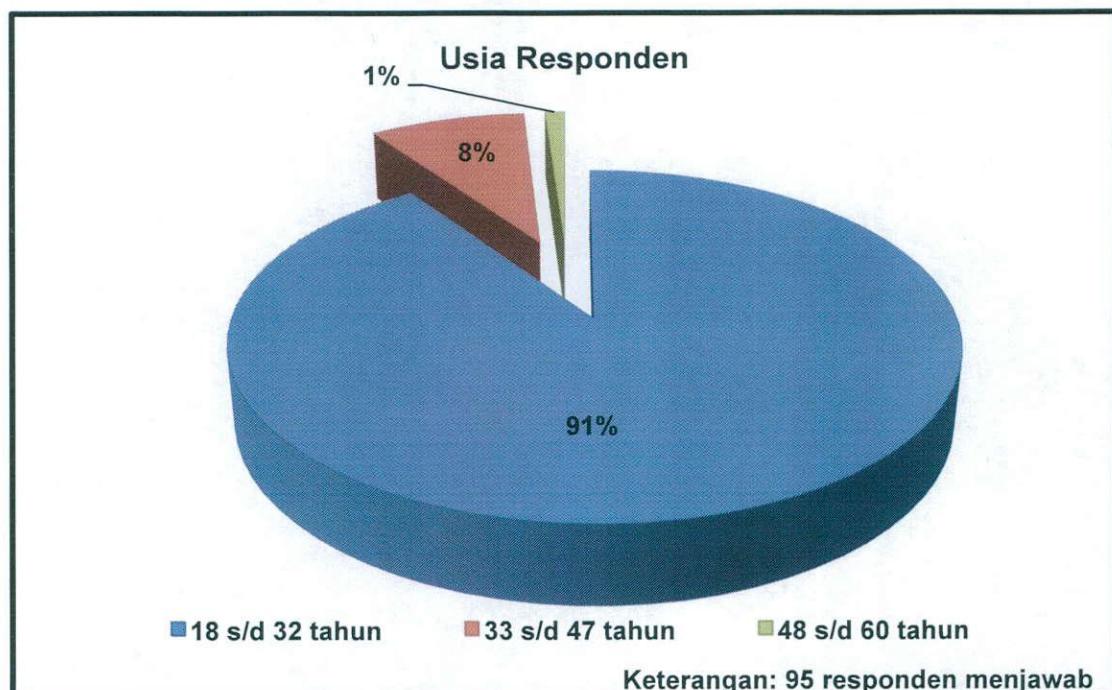
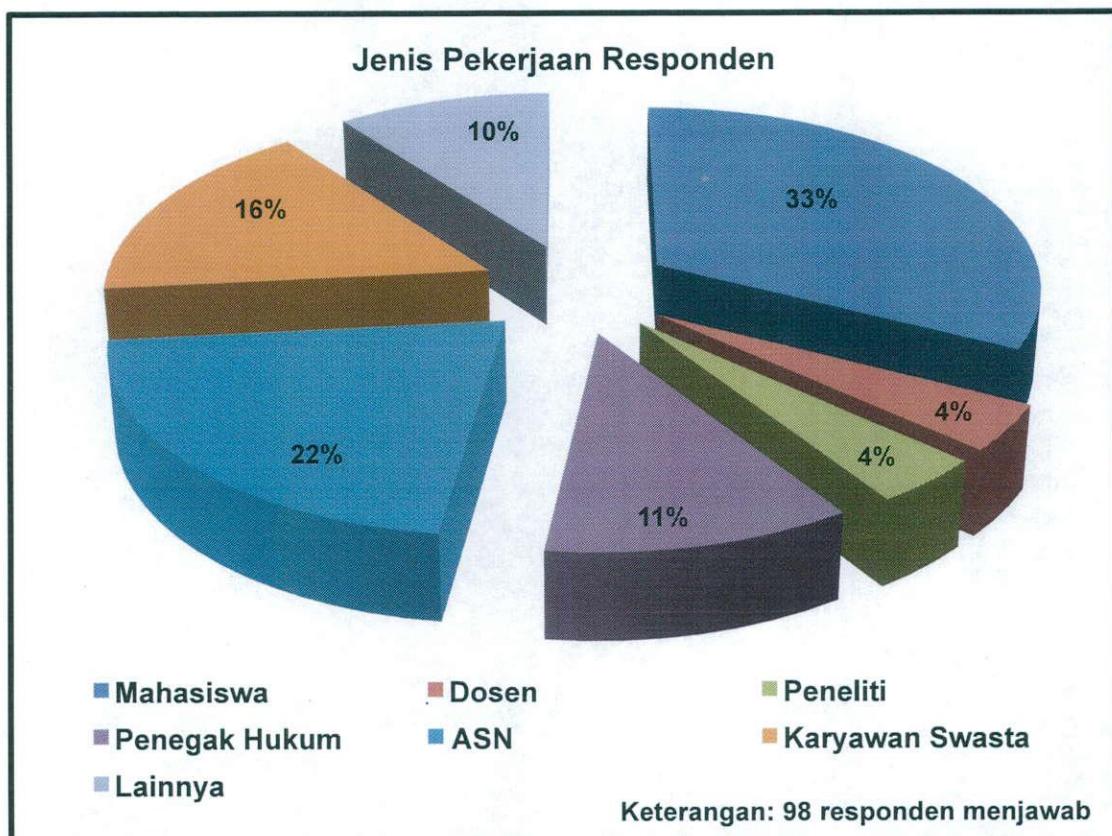
HASIL KUISIONER EVALUASI APLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERANCANGAN UNDANG-UNDANG (SIMAS PUU)

DISUSUN OLEH:

**ESTHER PUTRI LASMAIDA PANJAITAN, S.H
NIP. 199606232019032002**

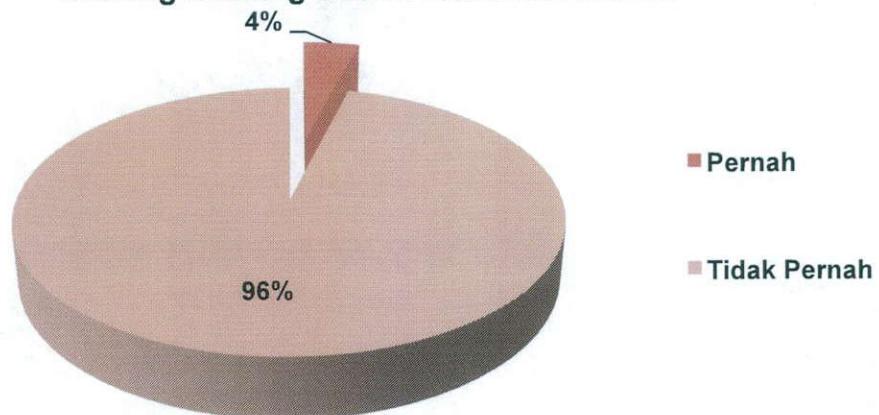
**PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2019**

**Hasil Kuisioner Evaluasi Aplikasi Partisipasi Masyarakat dalam
Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU)**



Pertanyaan ke – 1

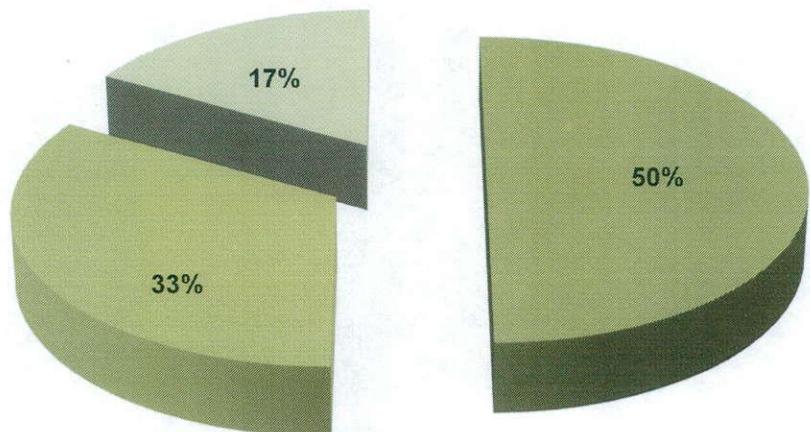
Apakah Anda pernah menyampaikan aspirasi terkait dengan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI?



Keterangan: 100 responden menjawab

Pertanyaan ke – 2

Jika pernah, media apa yang Anda gunakan untuk menyampaikan aspirasi Anda?

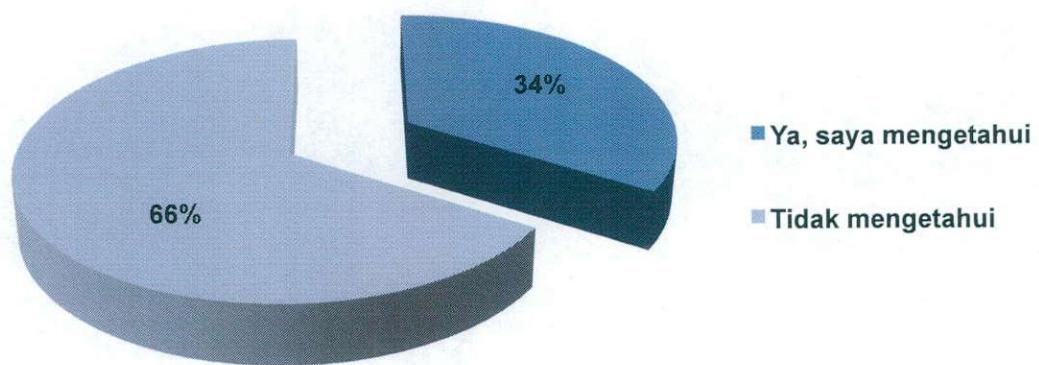


- Melalui FGD atau diskusi kelompok terarah antara tim peneliti dan perancang undang-undang Badan Keahlian DPR RI dan Akademisi
- Media Sosial
- Melalui lomba legislative drafting. berkas yg lolos final dikirimkan ke DPR sbg salah satu aspirasi utk jadi bahan pertimbangan

Keterangan: 9 responden menjawab

Pertanyaan ke – 3

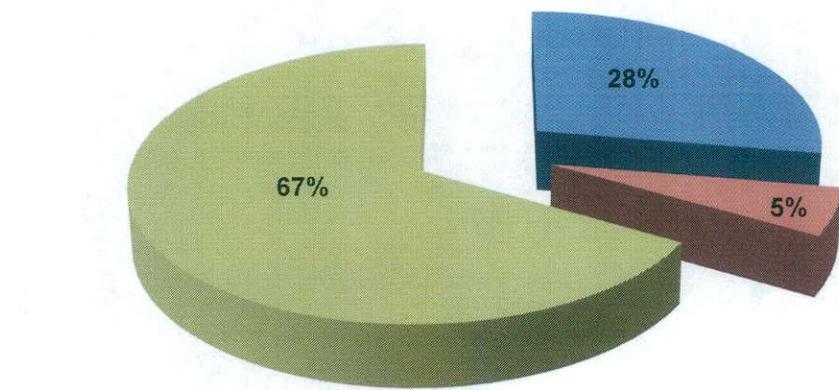
Apakah Anda mengetahui bahwa terdapat aplikasi SIMAS PUU sebagai aplikasi berbasis website untuk menjaring masukan masyarakat terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



Keterangan: 100 responden menjawab

Pertanyaan ke – 4

Jika iya, dari mana Anda mengetahui informasi tersebut?

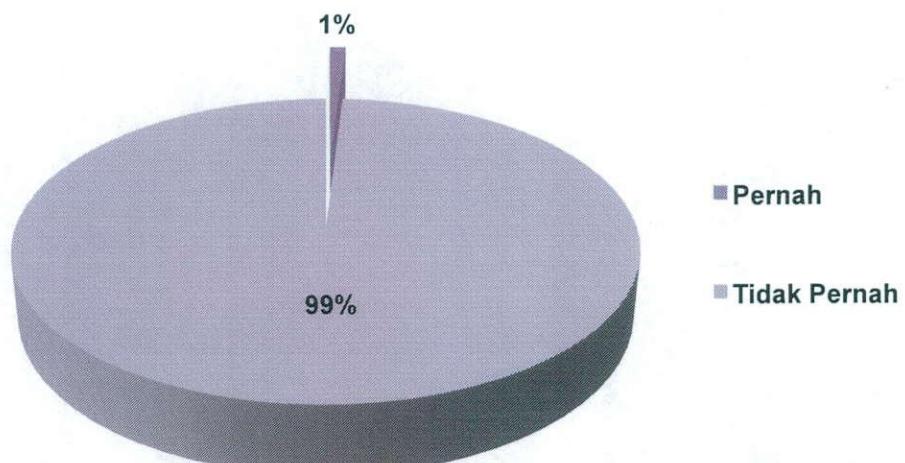


- Media Sosial DPR RI
- Website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
- Informasi dari rekan

Keterangan: 54 responden menjawab

Pertanyaan ke – 5

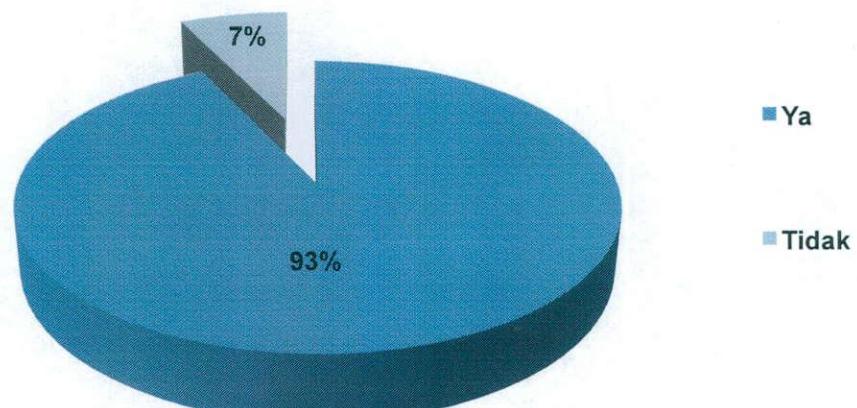
Apakah Anda pernah memberikan masukan terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU?



Keterangan: 100 responden menjawab

Pertanyaan ke – 6

Setelah menonton videografi pengenalan aplikasi SIMAS PUU pada pertanyaan No. 3, menurut Anda, apakah SIMAS PUU mempermudah masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan



Keterangan: 99 responden menjawab

Pertanyaan ke – 7

Silahkan berikan kritik terhadap aplikasi SIMAS PUU saat ini dan saran

No.	Kritik dan Saran
1.	mengingat skrg eranya media sosial, mungkin penyebaran info melalui media sosial bisa menjadi salah satu jalan dan perlu untuk digalakkan supaya merambah kalangan masyarakat lebih luas
2.	Terus memberikan edukasi tentang aplikasi ini kepada masyarakat awam,karena banyak masyarakat yg belum tau tentang aplikasi ini
3.	Aplikasi SIMAS PUU tidak diketahui masyarakat luas, karena itu diharap aplikasi ini harus lebih disosialisasikan terutama pada kalangan mahasiswa yang kebanyakan berfikiran kritis
4.	Aplikasi SIMAS lebih disosialisasikan lagi pada masyarakat. Terutama bagi kaum milenial yang sudah melek akses teknologi
5.	Semoga aplikasi nya semakin baik berkat kerja keras dan inovasi dari Mbak Esther "gaksi" Putri
6.	Lebih disosialisasikan lagi ke masyarakat
7.	Semoga bisa mempermudah masyarakat
8.	Harapannya SIMAS PUU dapat diterapkan guna memperkuat pembentukan undang-undang
9.	Apa bener siti badriah kalau lagi baik jadi siti goodriah(?)
10.	Sosialisasi
11.	Lebih disosialisasikan lagi ke masyarakat luas, agar masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam Perancangan Undang-Undang
12.	Alangkah lebih baik jika terdapat fitur yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui apakah terdapat tindak lanjut atas saran yang telah disampaikan melalui SIMAS PUU
13.	Lanjutkan
14.	di Mobilekan gitu jadi aplikasi HP tersendiri, orang-orang jaman now kan gamau ribet ok!

No.	Kritik dan Saran
15.	Tidak ada
16.	Aplikasi harus dimanfaatkan dengan benar karna anggaran sudah ada!!!
17.	Udah oke koq mbak esther, mantab.
18.	Lebih disosialisasikan ke masyarakat. Agar UU dimasa depan menjadi lebih baik
19.	Harus di beritahukan kemasyarakatan terkait aplikasi ini, agar masyarakat tau bahwa adanya aplikasi tersebut
20.	Semakin lebih baik lagi supaya masyarakat kita turut berpartisipasi dalam membuat negara kita lebih maju
21.	Kalau bisa jika ada jadwal FGD atau seminar dalam rangka menyusun draft NA RUU disosialisasikan secara terbuka agar masyarakat bisa menyampaikan secara langsung.
22.	sangat bagus
23.	Sosialisasinya harus lebih supaya dapat diketahui masyarakat
24.	Harus bermitra dgn mahasiswa atau stakeholder terkait sehingga partisipasi masyarakat dapat maksimal. Contohnya dalam kunjungan ke DPR pihak DPR sekaligus bermitra dgn universitas yg melakukan kunjungan. (Kerjasama dengan Humas) Semangatt estherrrr ☺☺☺
25.	Kata katanya yang singkat aja jangan panjang"
26.	Sosialisasi SIMAS sebaiknya lebih massif sehingga dapat diketahui masyarakat lebih luas
27.	Lebih di tingkatkan lagi dalam mendengarkan aspirasi rakyat jadi dalam uu nya tidak hanya menguntungkan yang di atas saja tetapi untuk kepentingan bersama agar negara RI lebih maju lagi
28.	Sosialisasi bisa digencarkan lewat sosial media
29.	Sebagai lembaga negara harusnya lebih masif lagi melakukan

No.	Kritik dan Saran
	promosi terkait keberadaan SIMAS PUU, entah menggandeng publik figur/influencer, dan melakukan promosi ke beberapa media2 lain. Jangan sampai masyarakat baru peduli terhadap RUU saat RUU tidak penting/tidak substansial
30.	Seyogiyanya perlu menggandeng perguruan tinggi tidak hanya yang negeri tetapi juga khusus nya swasta. Untuk menyebarluaskan simas puu ini. Apalagi dosen memiliki kewajiban untuk pengabdian masyarakat.
31.	Lebih disosialisasikan. Akan lebih baik kalau juga menyentuh daerha dalam ebentukan produk hukum daerah
32.	Iya
33.	Aplikasi ini sangat inovatif dan tentunya diharapkan dapat lebih meningkatkan mutu kualitas pembentukan undang-undang agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Sarannya ke depan adalah agar lebih disosialisasikan lagi kepada masyarakat awam dan para generasi muda melalui berbagai program seperti seminar atau workshop supaya aplikasi ini bisa tercapai kepada orang-orang yang membutuhkan aspirasinya untuk didengar. Penyediaan fasilitas juga perlu diadakan agar aspirasi yang sampai ke pusat bisa lebih merata.
34.	Perlunya di libatkan semua elemen masyarakat sangat membantu terciptanya UU yg sangat relevan dan berkesinambungan.
35.	Ide yg sangat bagus,sayang sekali masyarakat blm mengakrabi simas puu tsb. Kedepan..dgn adanya simas puu ini,masyarakat akan lebih mengerti dan memahami salah satu " dapur " legislatip dan boleh ikut serta di dalam programnya.
36.	Ada laporan ketika saran dan aspirasi masyarakat sudah diterima oleh anggota dewan
37.	Semoga lebih dipersumole dan semoga semua perundsng

No.	Kritik dan Saran
	undangan yang direncanakan akan dishare ke publik melalui media mainstream
38.	Aplikasi yang luar biasa. Hanya perlu waktu untuk sosialisasi ke publik.
39.	Mohon banyak sosialisasi
40.	Kiranya aplikasi SIMAS PUU disosialisasikan lebih masif lg supaya lebih tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yg mau berpartisipasi. Aplikasi Simas PUU bisa mengubah pandangan masyarakat mengenai adanya titipan-titipan pasal kelompok tertentu di DPR. Selain itu bisa mendorong pembentukan peraturan perundang-undangan yang bottom up. Terimakasih.
41.	Semoga semakin baik perundang undangan yang akan dibuat
42.	Semakin diperbanyak informasinterkait aplikasi ini
43.	Lebih disosialisasikan ke instansi pemerintah/bumn/masyarakat /kaum milenial dalam kemasan acara yg menarik
44.	Untuk sosialisasinya lebih digencarkan lagi
45.	Sosialisasi SIMAS PUU sebaiknya juga harus dilaksanakan oleh tim yang melakukan pengumpulan data dan uji konsep RUU ke daerah, karena tidak setiap daerah mengetahui aplikasi ini.
46.	Layout yang menarik dan lebih persuasif
47.	belum coba, tp ide nya bagus
48.	Aplikasi SIMAS PUU menguntungkan bagi masyarakat apabila ingin memberi masukan karena memudahkan proses penyampaiannya.
49.	Pentingnya menyebarluaskan ke masyarakat berbagai kalangan terkait hal ini, tp lbh penting lagi jika DPR mau mengedukasi masyarakat terkait hukum dan perundang2an serta dampak dari adanya suatu aturan, sehingga masyarakat tidak hanya tahu, memahami, tapi juga mau menaati apa yg sudah diatur dalam

No.	Kritik dan Saran
	perundang-undangan dengan sebagaimana mestinya
50.	Mantab
51.	semoga kedepannya ini tidak hanya sebatas formil saja. tp bener bener diimplementasikan sesuai dgn tupoksinya
52.	Narasinya lebih padat lagi dan intonasi naratornya lebih semangat
53.	karena tidak mengertib
54.	this is make it easier. I never knew that we can really involved in a government
55.	Semoga app nya lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat, apalagi sekarang udh banyak pengguna smartphone sehingga informasi mudah diakses. Ini saja saya baru tau beberapa hari setelah teman ngomong.
56.	Harus disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat umum agar mereka mengetahui tentang adanya aplikasi SIMA PUU ini. Supaya kedepanya lebih banyak masyarakat yang bisa berpartisipasi untuk menyampaikan aspirasinya.
57.	Lebih diperbanyak sosialisasi agar masyarakat luas dari sabang smpai merauke mengetahui aplikasi SIMAS dengan lisan ataupun dngan tulisan
58.	Sudah cukup baik untuk tampilan, dan memudahkan saya dalam memahami konteks.
59.	Terkait pemberitahuan atau penyebaran informasi mengenai aplikasi ini harus lebih diperluas lagi agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui bahwa mereka juga dapat berperan dalam mewujudkan pembentukan perundang-undangan
60.	mohon lebih update lagi terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun dan lebih masif lagi sosialisasi ke masyarakat supaya terwujud pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Keterangan: 60 responden menjawab

LAMPIRAN XIII

**SURAT UNDANGAN SOSIALISASI AKTUALISASI PENULIS PADA
PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG SEKRETARIAT
JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI**



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id

Nomor : 473 /PU/08/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Perihal : Undangan Rapat.

21 Agustus 2019

Yth. **Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Jakarta**

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan sosialisasi kegiatan aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan II, Golongan 3, Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d. 09.00 WIB
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Tahun 2019
Tempat : Ruang Rapat Kapus PUU, Lt. 7, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Bapak guna memberikan arahan dan masukannya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pusat Perancangan Undang-Undang,

Fahmi Asy'ari, S.Sos.
NIP. 19680615 199003 1 007



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 WEBSITE: www.dpr.go.id

Nomor : 474 /PU/08/2019
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Perihal : Undangan Rapat.

23 Agustus 2019

Yth. 1. Koordinator Bidang
2. Mentor Latsar CPNS 2019
3. Perancang Undang-Undang
di Lingkungan Pusat PUU BK DPR RI
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI akan mengadakan sosialisasi kegiatan aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan II, Golongan 3, Tahun 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Acara : Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi CPNS Tahun 2019
Tempat : Ruang Rapat 714, Lt.7, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mengharapkan kehadiran Saudara guna memberikan arahan dan masukannya.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kesediaan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pusat Perancangan Undang-Undang,

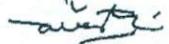
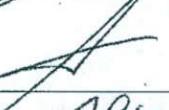
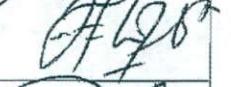
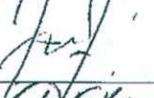
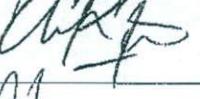
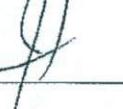
Fahmi Asy'ari, S.Sos.
NIP. 19680615 199003 1 007

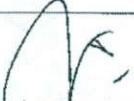
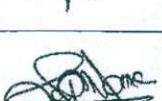
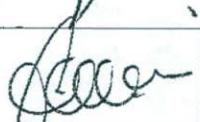
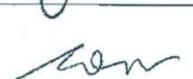
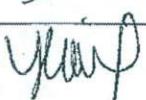
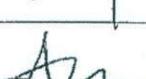
LAMPIRAN XIV

**DAFTAR HADIR DAN LAPORAN SINGKAT RAPAT SOSIALISASI
AKTUALISASI PENULIS**

DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019
 Tempat : R. Rapat 714, Pusat PUU, Setjen dan BK DPR RI
 Pukul : 09.00 s/d selesai
 Agenda Kegiatan : Sosialisasi Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai
 Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR
 RI Angkatan II Tahun 2019 pada Unit Kerja Pusat
 Perancangan Undang-Undang

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	MARDISON TONI	Perancang Madya	
2.	RICKO Widyudi	Perancang Madya	
3.	Arrista. Trimaya	Perancang Madya	
4	Chairul Umar	—i.—	
5	Bagus Prasetyo	— " —	
6	HERIYANTI PENGARIDI	Calon Perancang	
7	ASMAI LIA NIFAH	—	
8.	SHINTYA ANDRIAH.S.	—a—	
9.	Novai Ali M	Calon Perancang	
10.	Aan Andrianah	Perancang Madya	
11.	ARIF USMAN	—i.—	
12-	Khopiatuziandah	—	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
13.	R. Bintarta Budiprasetya E.P.Y	Perancang Muda	
14.	APRIYANI DEWI AZIS	Perancang Pertama	
15.	Christina Devi Natalia	Perancang Pertama	
16.	Ihsan Bahruni N.	—n—	
17.	Woro W	Perancang	
18.	Nora Manda Sari	PUU	
19.	Yuwinda Sari p.	perancang	
20.	Stephanie Rebecca	PUU	
21.	MARIA PRISCILA STEPHFANIE F. W	PUU	
22.	ZAQIY RAHMAN	PUU	
23.	Kuntari	Percl	
24.	Wiwin Sri Rahyani	Perancang PUU Madya	
25.	Yeni Handayani	Perancang PUU	
26.	Achmadudin Rayb	PUU	
27.	Teguh W. Yanto	"	
28.	Aryani Sinduringrum	—n—	
29.	Sindy Amelia	—n—	



**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT RAPAT SOSIALISASI KEGIATAN AKTUALISASI
DALAM RANGKA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN II, GOLONGAN 3, TAHUN 2019 PADA UNIT KERJA PUSAT
PERANCANGAN UNDANG-UNDANG**

Tahun Sidang	:	2019
Masa Persidangan	:	V (lima)
Triwulan	:	III (tiga)
Rapat ke	:	1 (satu)
Sifat	:	Terbuka
Jenis rapat	:	Rapat Sosialisasi
Hari, tanggal	:	Selasa, 27 Agustus 2019
Pukul	:	09.00 - 12.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat 714, Lt.7, Gedung Setjen dan BK DPR RI, Jl. Jend Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	:	Ricko Wahyudi, S.H., M.H
Hadir	:	33 orang (terlampir)
Acara	:	<i>Sosialisasi Kegiatan Aktualisasi "Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (Simas Puu) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif, Transparan, Dan Akuntabel"</i>

I. PENDAHULUAN

1. Rapat pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 dibuka pukul 09.00 WIB oleh Ricko Wahyudi, S.H., M.H, selaku ketua rapat.
2. Adapun agenda rapat adalah sosialisasi kegiatan aktualisasi peserta latihan CPNS angkatan II tahun 2019 pada unit kerja Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI atas nama Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

- Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H memaparkan hasil pelaksanaan aktualisasinya yang berjudul *“Optimalisasi Program Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU) Guna Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel”*.



- Terdapat masukan dari beberapa senior Perancang Undang-Undang terhadap aktualisasi Penulis, antara lain sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Masukan
1.	Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum	Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang	Sangat membantu optimalisasi aplikasi SIMAS PUU, agar dibantu kawal publikasi aplikasi SIMAS PUU menjadi berkelanjutan dan tindak lanjut SIMAS PUU berjalan dengan baik. Videografi SIMAS PUU wajib dipublikasikan setiap ada kunjungan ke daerah.
2.	Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	Sudah sangat baik dan jelas, agar ditindaklanjuti rekomendasi yang telah disusun.

No.	Nama	Jabatan	Masukan
3.	Arrista Trimaya, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	Proyek aktualisasi sangat baik, milenial, inovatif dan breakthrough. Perlu ada penunjukan admin aplikasi SIMAS PUU yang tetap
4.	Titi Asmara Dewi, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Diintegrasikan dengan aplikasi DPRNow.
5.	Kuntari, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Perbaikan penempatan kegiatan 5 (lima) dan 6 (enam) yang tertukar.
6.	<u>Zaqiu Rahman, S.H., M.H.</u>	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	Penegasan kapan pengunggahan urgensi dan draft konsep awal NA dan RUU yang akan diunggah pada aplikasi SIMAS PUU.
7.	<u>Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.</u>	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Pengajuan akses admin super pada aplikasi SIMAS PUU.

III. KESIMPULAN

- Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum selaku kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR dan Para Perancang Undang-Undang mengapresiasi dengan baik proyek aktualisasi Penulis dan akan menindaklanjuti rekomendasi dan kegiatan-kegiatan yang telah Penulis selesaikan demi terwujudnya pembentukan undang-undang yang partisipatif, transparan dan akuntabel.

IV. PENUTUP

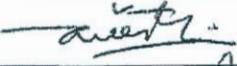
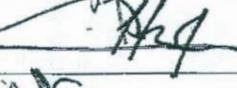
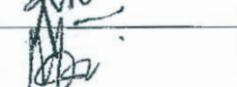
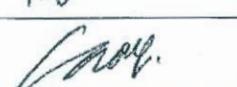
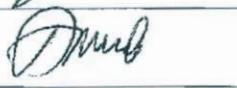
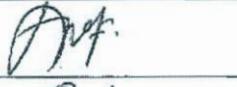
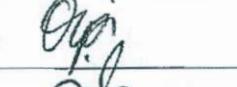
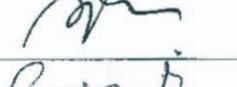
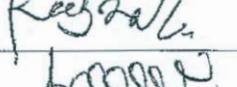
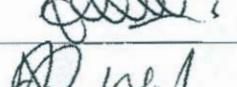
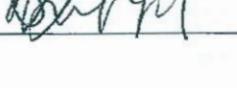
Rapat ditutup pada pukul 12.00 WIB oleh Ketua Rapat.

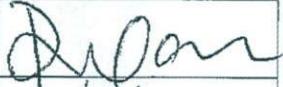
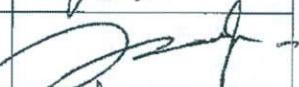
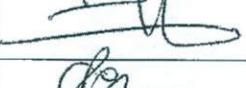
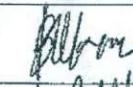
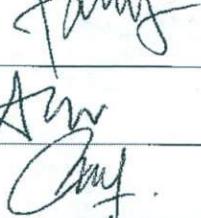
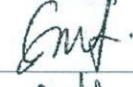
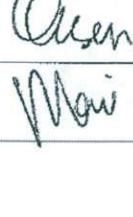
Jakarta, 27 Agustus 2019
Ketua Rapat,

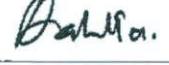


Ricko Wahyudi, S.H., M.H
NIP. 197802082002121005

Daftar Penerimaan Sosialisasi
Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Angkatan II Tahun 2019 pada
Unit Kerja Pusat Perancangan Undang-Undang

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Woro Wulaningrum, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
2.	Arrista Trimaya, S.H. M.H.	Perancang PUU Madya	
3.	Atisa Praharini, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
4.	Aan Andrianih, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
5.	Nita Ariyulinda, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
6.	Chairul Umam, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
7.	Ricko Wahyudi, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
8.	Bagus Prasetyo, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
9.	Teguh Nirmala, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
10.	Yeni Handayani, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
11.	Laily Fitriani, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
12.	Mardisontori, S.Ag., LLM	Perancang PUU Madya	
13.	Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
14.	Akhmad Aulawi, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
15.	Arif Usman, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
16.	Khopiatuziadah, S.Ag., LLM	Perancang PUU Madya	
17.	Zaqiu Rahman, S.H., M.H.	Perancang PUU Madya	
18.	Rachmat Wahyudi Hidayat, S.H., M.H.	Perancang PUU Muda	
19.	Kuntari, S.H.	Perancang PUU Muda	
20.	Raden Priharta Budiprasetya Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn.	Perancang PUU Muda	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
21.	Yudarana Sukarno Putra, S.H., LLM.	Perancang PUU Muda	
22.	Titi Asmara Dewi., S.H., M.H.	Perancang PUU Muda	
23.	Riyani Shelawati, S.H., M.Kn.	Perancang PUU Muda	
24.	Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.	Perancang PUU Muda	
25.	Nova Manda Sari, S.H., M.H.	Perancang PUU Pertama	
26.	Ihsan Badruni Nasution, S.Sy, S.H.	Perancang PUU Pertama	
27.	Yanuar Putra Erwin, S.H.	Perancang PUU Pertama	
28.	Sindy Amelia, S.H.	Perancang PUU Pertama	
29.	Yuwinda Sari Pujianti, S.H.	Perancang PUU Pertama	
30.	Agus Priyono, S.H.	Perancang PUU Pertama	
31.	Apriyani Dewi Azis, S.H.	Perancang PUU Pertama	
32.	Christina Devi Natalia, S.H.	Perancang PUU Pertama	
33.	Maria Priscyla Stephfanie Florencia Winoto, S.H.	Perancang PUU Pertama	
34.	Stephanie Rebecca Magdalena R. Purba., S.H., M.H.	Perancang PUU Pertama	
35.	Tommy Cahya Trinanda, S.H.	Perancang PUU Pertama	
36.	Achmadudin Rajab, S.H., M.H.	Perancang PUU Pertama	
37.	Febri Liany., S.H., M.H.	Perancang PUU Pertama	
38.	Sutriyanti., S.H., M.H.	Perancang PUU Pertama	
39.	K. Zulfan Andriansyah, S.H.	Perancang PUU Pertama	
40.	M. Nurfaik, S.H.I.	Perancang PUU Pertama	
41.	Muhammad Yusuf, S.H.	Perancang PUU Pertama	
42.	Olsen Peranto, S.H.	Perancang PUU Pertama	
43.	Meirina Fajarwati, S.H.	Perancang PUU Pertama	

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
44.	Noor Ridha Widiyani, S.H.	Perancang PUU Pertama	
45.	Aryudhi Permadi, S.H., M.H.	Calon Perancang PUU	
46.	Asma' Hanifah, S.H.	Calon Perancang PUU	
47.	Noval Ali Muchtar, S.H.	Calon Perancang PUU	
48.	Shintya Andini Sidi, S.H.	Calon Perancang PUU	
49.	Aryani Sinduningrum, S.H.	Calon Perancang PUU	
50.	Dahlia Andriani, S.H.	Calon Perancang PUU	

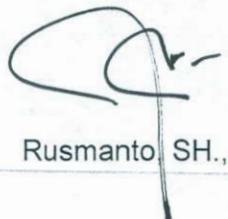
KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA COACH DENGAN PESERTA
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN.II..
TAHUN 2019

Nama : Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H Nama Coach : Dr. Fitriani, AP., M. Si.
Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang
NIP. : 199606232019032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	Kamis, 18 Juli 2019	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi	Tatap Muka	Follow-up dan komunikasi dengan PDTI	
2	Jumat, 19 Juli 2019	Evaluasi dari Coach & Pembimbingan / Revisi Rancangan Aktualisasi yang sudah dipresentasikan	Tatap Muka	Follow-up dan komunikasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen	
3	Jumat, 26 Juli 2019	Koordinasi terkait hasil kegiatan pertama dan kedua dari Aktualisasi	Tatap Muka	Sambil berjalan kegiatan sambil menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi	
4	Jumat, 9 Agustus 2019	Koordinasi terkait draft laporan aktualisasi dan hasil kuisioner evaluasi aplikasi SIMPIS PUU	Tatap Muka	Rekomendasi kepada pimpinan Pusat PUU agar diberi SE Aplikasi SIMPIS PUU	
5	Senin, 2 September 2019	Pembimbingan laporan hasil Aktualisasi Penulis	Tatap Muka	Sudah baik	
6					

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

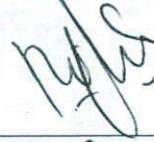
Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI



Rusmanto, SH., MH

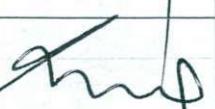
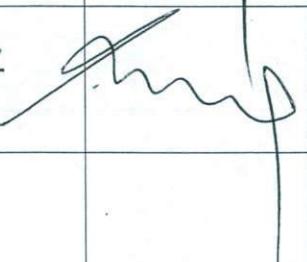
KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN MENTOR
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II.
TAHUN 2019

Nama : Esther Putri L. Panjaitan, S.H Nama Mentor : Ricko Wahyudi, S.H., M.H
Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang
NIP. : 199606232019032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Mentor*
1	22 /07 /2019	Koordinasi terkait Rapat Koordinasi Aktualisasi Bersama Kpus PNU	Tatap Muka	Mengajukan Nota Dinas ke BDTI terkait permohonan akses Admin Aplikasi SIMAS PNU	
2	29 /07 /2019	Koordinasi terkait pengunggahan urgensi & draft konsep awal NA dan RUU yang sedang disusun di Pusat PNU	Tatap Muka	Diberikan daftar kontak ke Tim RUU yg dihubungi terkait pengunggahan pada aplikasi SIMAS PNU	
3	05 /08 /2019	Diskusi terkait progres pembuatan dan pengunggahan videografi Aplikasi SIMAS PNU pada TV Parlemen	Tatap Muka	Sambil berjalan / tidak kpa follow up status penggaran fitur tumbuhan aplikasi SIMAS PNU di BDTI	
4	12 /08 /2019	Diskusi terkait videografi yang sudah diunggah pada seluruh media sosial DPR RI dan penambahan fitur no-reply Email pada aplikasi SIMAS PNU	Tatap Muka	Pengunggahan videografi Aplikasi SIMAS PNU dibuat berkelanjutan secara berkala.	
5	19 /08 /2019	Koordinasi terkait hasil penyebaran kuisiner aplikasi SIMAS PNU dan rapat sosialisasi aktualisasi	Tatap Muka	Koordinasi kuisiner dengan Baleg dan BDTI terkait pengunggahan kuis dan RUU pada aplikasi SIMAS PNU	
6	26 /08 /2019	Koordinasi terkait hasil rapat sosialisasi aktualisasi dan laporan hasil aktualisasi	Tatap Muka	Rejoran ke 5 dan ke-6 tertukar agar diperbaiki ppt dan di laporan.	

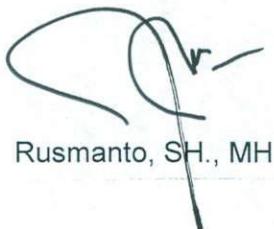
KARTU KENDALI
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II
TAHUN 2019

Nama : Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H Nama Coach : Dr. Fitriani, AP., M. Si.
Instansi : Pusat Perancangan Undang-Undang
NIP. : 199606232019032002

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu Permasalahan yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach*
1	Kamis, 18 Juli 2019	Pembimbingan Rancangan Aktualisasi	Tatap Muka	Follow-up dan komunikasi dengan BDTI	
2	Jumat, 19 Juli 2019	Evaluasi dari Coach & Pembimbingan / Revisi Rancangan Aktualisasi yang sudah di presentasikan	Tatap Muka	Follow-up dan komunikasi dengan Biro Pemberitaan Parlemen	
3	Jumat, 26 Juli 2019	Koordinasi terkait hasil kegiatan pertama dan kedua dari Aktualisasi	Tatap Muka	Sambil berjalan kegiatan sambil menyusun laporan hasil pelaksanaan aktualisasi	
4	Jumat, 9 Agustus 2019	Koordinasi terkait draft laporan aktualisasi dan hasil kuisiher evaluasi aplikasi SIMAS PUU	Tatap Muka	Rekomendasi kepada pimpinan pusat PUU agar dibuat SE Aplikasi SIMAS PUU	
5	Senin, 2 September 2019	Pembimbingan laporan hasil Aktualisasi Penulis	Tatap Muka	Sudah baik	
6					

(*) Pembimbingan yang sah adalah pembimbingan yang ditandatangani oleh Coach

Kepala Bidang Pelaksanaan
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI


Rusmanto, SH., MH



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

SURAT PERMOHONAN IZIN

Yth.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi

u.p Kepala Bagian Kepegawaian

Di tempat

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Esther Putri Lasmaida Pangaitan, S.H
NIP : 199606232019032002
Pangkat/Golongan : Penata Muda / IIIa
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Unit Kerja : Pusat Perancangan Undang- Undang

Dengan ini mengajukan permohonan izin untuk tidak masuk kerja selama 2 hari pada hari Kamis & Jumat, tanggal 7-8/11/2019 dengan alasan yaitu keperluan keluarga (pernikahan saudara kandung) di Balam, Provinsi Riau.

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Jakarta,

Menyetujui/Tidak Menyetujui *)

Kepala Sub Bagian TU
Perancangan Undang-Undang

Hormat kami,

Fahmi Asy'ari, S.Sos
NIP. 196806151990031007

Esther Putri L. Pangaitan, S.H
NIP. 199606232019032002